

LAPORAN *SURVEILLANCE*
PERBANKAN INDONESIA
LSPI
TW I 2025

LAPORAN *SURVEILLANCE*
PERBANKAN INDONESIA

TW I 2025

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kata Pengantar

Dian Ediana Rae

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan - Otoritas Jasa Keuangan



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia Triwulan I-2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun atas jerih payahnya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Kami berharap agar pembaca dan pengguna laporan ini dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari data dan informasi maupun analisis/ulasan yang disajikan.

Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia Triwulan I-2025 ini memuat *overview* dan analisis kondisi perekonomian global maupun domestik, serta kaitannya terhadap perkembangan kinerja, penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, dan profil risiko yang dihadapi perbankan. Selain itu, dalam laporan ini tercakup juga kebijakan perbankan yang diterbitkan oleh OJK pada periode laporan, perkembangan kelembagaan perbankan, serta koordinasi antar lembaga terkait perbankan. Pada laporan ini juga disajikan pembahasan khusus dengan topik **"Kontribusi, Tantangan, dan Strategi Adaptasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia di Tengah Dinamika Ekonomi dan Geopolitik"**.

Secara umum, pada periode laporan, kondisi perekonomian global cenderung beragam di tengah sentimen pasar keuangan dan pasar saham global terhadap *Trump Risk* (stimulus ekonomi AS dan pengenaan tarif impor) yang mendorong retaliasi tarif impor secara global). Selain itu, OECD merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global seiring dengan meningkatnya hambatan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan sehingga PDB global tahun 2025 diperkirakan tumbuh moderat sebesar 3,1% (yoy) lebih rendah dari perkiraan 2025 sebelumnya sebesar 3,3%. Pertumbuhan ekonomi beberapa negara besar yaitu AS, Uni Eropa, dan Tiongkok diperkirakan melambat pada 2025 ini. Laju inflasi global tercatat beragam, seperti AS, Eropa, dan UK sedang mengalami perlambatan sementara Tiongkok meningkat. The Fed menyadari sedang mengalami kesulitan dalam mengatur moneter AS sehingga memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan yang diikuti oleh PBoC dan BoE yang juga mempertahankan suku bunga. Namun, ECB memutuskan untuk memangkas suku bunganya. Selain itu, perlu diperhatikan faktor risiko lain yaitu eskalasi *trade war* yang masih akan berlanjut dan melemahnya ekonomi di berbagai negara. Hal ini utamanya dipicu oleh penerapan kebijakan tarif impor Presiden Trump yang mempengaruhi negara-negara mitra. Selain itu, tensi geopolitik di Timur Tengah juga masih berlanjut. Di tengah ketidakpastian perekonomian global dan menghadapi pengenaan tarif oleh AS, pada Triwulan I-2025 ekonomi domestik tumbuh sebesar 4,87% (yoy). Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (5,11%) dan triwulan sebelumnya yaitu 5,02%. Angka tersebut merupakan capaian pada awal tahun yang terendah sejak Triwulan I-2021 ketika pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi domestik ditopang oleh komponen konsumsi rumah tangga dan ekspor impor barang dan jasa yang tumbuh lebih tinggi. Di sisi lain, pertumbuhan investasi atau penanaman modal tetap bruto (PMTB) melambat dibandingkan triwulan I tahun lalu.

Ekonomi domestik yang tetap kuat juga tecermin pada indikator perbankan di triwulan I-2025 sebagaimana terlihat pada pertumbuhan kredit (bank umum) yang masih cukup baik yaitu sebesar 10,85% (yoy), meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya (8,96%, yoy). Pertumbuhan kredit tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit pada seluruh jenis penggunaan (Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, dan Kredit Konsumtif). Di sisi lain, DPK juga masih tumbuh yaitu sebesar 4,75% meski melambat dari periode yang sama tahun sebelumnya 7,44% (yoy). Selain itu, likuiditas perbankan masih terjaga ditopang oleh rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masih terjaga tinggi di atas *threshold* masing-masing sebesar 116,05% dan 26,22%. Tingkat permodalan juga cukup solid dengan CAR sebesar 25,43% meski sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya (25,56%) dikarenakan pertumbuhan modal yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ATMR yang tumbuh melambat 9,11% dari tahun lalu. Risiko kredit terpantau membaik dengan rasio NPL gross yang menurun menjadi sebesar 2,17% dan NPL net menjadi 0,80%. Sejalan dengan kinerja bank umum, kinerja BPR dan BPRS juga cukup baik meski kredit/pembiayaan dan

DPK tumbuh relatif melambat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Rasio permodalan cukup solid dengan CAR BPR dan BPRS masing-masing sebesar 31,49% dan 24,47%.

Ke depan, tetap perlu diperhatikan risiko perbankan utamanya risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas di tengah masih tingginya ketidakpastian global seperti risiko akibat semakin intensifnya *trade war* termasuk kebijakan penerapan tarif impor oleh AS, ketidakpastian penurunan laju suku bunga, perkembangan ekonomi global, serta kenaikan tensi geopolitik. Kondisi-kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tekanan dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi domestik. Perbankan harus tetap mengedepankan aspek prudensial dan mengantisipasi terjadinya pemburukan kualitas kredit ke depan di tengah masih tingginya ketidakpastian global seperti risiko akibat eskalasi perang dagang dan tekanan pada ekonomi domestik.

Dari sisi permodalan, bank masih cukup solid dan ditopang ketersediaan likuiditas yang memadai. Namun OJK terus melakukan monitoring dan mendorong bank untuk meningkatkan daya tahannya serta menjaga coverage CKPN secara memadai. Dalam mengukur ketahanan bank, OJK meminta agar bank secara rutin melakukan *stress test* dan asesmen terhadap kekuatan permodalannya untuk mengukur kemampuannya dalam menyerap potensi penurunan kualitas kredit akibat perubahan kondisi makro ekonomi. Selain itu, likuiditas perbankan juga perlu untuk dijaga dan terus dimonitor utamanya dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan perubahan kebijakan global maupun domestik yang cukup cepat.

OJK senantiasa berupaya memperkuat mitigasi risiko secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ke depan dengan melakukan peningkatan kualitas pengawasan diiringi dengan penguatan regulasi. Dalam hal penguatan regulasi, pada periode laporan OJK menerbitkan beberapa ketentuan perbankan berupa satu POJK, satu SEOJK, dan satu surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan. Adapun ketentuan perbankan tersebut mengatur mengenai laporan Bank Umum sebagai Kustodian, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat, dan Dukungan Perbankan dalam rangka Implementasi PP Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Di samping itu, OJK juga berpartisipasi aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan LPS dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

OJK secara rutin melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan dinamika ekonomi global serta dampaknya kepada ekonomi domestik dan perbankan Indonesia. Hal tersebut dilakukan seiring dengan pengawasan perbankan secara individual yang intensif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan Indonesia saat ini dan di masa mendatang. Selanjutnya, OJK juga senantiasa mendorong bank-bank agar selalu memperhatikan aspek kehati-hatian (*prudential banking*), profesionalisme, inovatif, dan selalu menjaga integritas untuk bisa mencapai pertumbuhan yang tinggi dan sehat.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi semua niat baik kita, termasuk melalui penyampaian laporan ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Jakarta, Juli 2025



Dian Ediana Rae

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	viii
Ringkasan Eksekutif	ix
Infografis	xi

Bab 1

Overview dan Analisis Perekonomian Global dan Domestik

1. Perekonomian Global	3
2. Perekonomian Domestik	8

Bab 2

Kinerja Industri Perbankan Nasional

1. Kinerja Bank Umum	17
2. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR)	23
3. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)	26

Bab 3

Penyaluran Kredit/Pembiayaan Perbankan

A. Penyaluran Kredit/Pembiayaan Bank Umum (BUK dan BUS)	31
1. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi	31
2. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Lokasi Proyek (Spasial)	34
3. Perkembangan Penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKM	38
B. Penyaluran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS	39
1. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi	39
2. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Lokasi (Spasial)	40

Daftar Box

Boks 1. Kontribusi, Tantangan, dan Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia di Tengah Dinamika Ekonomi dan Geopolitik	81
--	----

Bab 4

Profil Risiko Perbankan

- | | |
|----------------------|----|
| 1. Risiko Kredit | 45 |
| 2. Risiko Pasar | 55 |
| 3. Risiko Likuiditas | 58 |
| 4. Risiko Hukum | 60 |

Bab 5

Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

- | | |
|--------------------------|----|
| 1. Pengaturan Perbankan | 63 |
| 2. Kelembagaan Perbankan | 65 |

Bab 6

Koordinasi Antar Lembaga terkait Perbankan

- | | |
|--|----|
| 1. Koordinasi Multi-Lembaga dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan | 73 |
| 2. Koordinasi Bilateral | 75 |
| 3. Partisipasi OJK dalam Fora Internasional | 76 |

Lampiran

- | | |
|--|----|
| I. Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko | 93 |
| II. <i>Glossary</i> | 95 |

Daftar Tabel

Tabel 1 Indikator Umum Bank Umum	17
Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset Bank Umum	18
Tabel 3 Perkembangan Aset Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan	18
Tabel 4 DPK Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan Bank	20
Tabel 5 Penyebaran DPK Bank Umum berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar	20
Tabel 6 Rasio Keuangan Bank Umum	22
Tabel 7 Rasio Keuangan Bank Umum	22
Tabel 8 Komponen ATMR Bank Umum	22
Tabel 9 Indikator Keuangan BPR dan BPRS	23
Tabel 10 Indikator Umum BPR	24
Tabel 11 Indikator Umum BPRS	26
Tabel 12 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi	33
Tabel 13 Porsi Kredit/Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi menurut Lokasi Proyek (Spasial)	38
Tabel 14 Kredit/Pembiayaan UMKM berdasarkan Kelompok Bank	39
Tabel 15 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan BPR/BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi	40
Tabel 16 Persebaran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS menurut Lokasi (Spasial)	41
Tabel 17 Perkembangan Kualitas Kredit	46
Tabel 18 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	47
Tabel 19 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan	47
Tabel 20 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank	48
Tabel 21 NPL Gross Lokasi Berdasarkan Sektor Ekonomi Periode Desember 2024	55
Tabel 22 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan berdasarkan Kategori	57
Tabel 23 Perkembangan LCR Perbankan	59
Tabel 24 Statistik Penanganan Penyimpangan Ketentuan Perbankan	60
Tabel 25 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi	60
Tabel 26 Jaringan Kantor BUK	65
Tabel 27 Jaringan Kantor BPR	66
Tabel 28 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah	68
Tabel 29 Jaringan Kantor BPRS	69

Daftar Grafik

Grafik 1 Inflasi Konsumen	4
Grafik 2 Suku Bunga Acuan	4
Grafik 3 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara	6
Grafik 4 PMI Manufaktur Beberapa Negara	6
Grafik 5 Perkembangan Harga Komoditas	8
Grafik 6 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran	8
Grafik 7 Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Impor	12
Grafik 8 Neraca Perdagangan Indonesia	12
Grafik 9 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha	14
Grafik 10 Perkembangan Aset Bank Umum	18
Grafik 11 Tren Pertumbuhan DPK per Komponen	19
Grafik 12 Pergerakan DPK Berdasarkan Valuta	19
Grafik 13 Kredit per Valuta	20
Grafik 14 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	21
Grafik 15 Perkembangan Aset BPR	24
Grafik 16 Perkembangan DPK BPR	24
Grafik 17 Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan	25
Grafik 18 Tren ROA dan BOPO BPR	25
Grafik 19 Tren Aset BPRS	26
Grafik 20 Tren Pertumbuhan DPK BPRS	27
Grafik 21 Tren ROA dan BOPO BPRS	28
Grafik 22 Tren Pertumbuhan Kredit Produktif per Sektor Ekonomi	33
Grafik 23 Persebaran Kredit/Pembiayaan Bank Umum menurut Lokasi Proyek (Spasial)	37
Grafik 24 Penyebaran Kredit/Pembiayaan UMKM	39
Grafik 25 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net	45
Grafik 26 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit	45
Grafik 27 Pertumbuhan CKPN	46
Grafik 28 Tren Kredit Restrukturisasi	46
Grafik 29 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi	52
Grafik 30 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi	52
Grafik 31 Tren Rasio NPL Gross berdasarkan Lokasi Proyek (Spasial)	55
Grafik 32 Dolar Index dan VIX Index	55
Grafik 33 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar	56
Grafik 34 Spread Yield UST dan SBN	56
Grafik 35 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia	57
Grafik 36 Potensi Keuntungan/Kerugian Kepemilikan Surat Berharga Perbankan	57
Grafik 37 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan (FVTPL dan FVTOCI) per Tenor	57
Grafik 38 Perkembangan Parameter IRRBB	58
Grafik 39 LDR berdasarkan Valuta	58
Grafik 40 AL/NCD dan AL/DPK	59
Grafik 41 Perkembangan LCR dan NSFR	59
Grafik 42 Perkembangan Suku Bunga PUAB	59
Grafik 43 Penyebaran Jaringan Kantor BUK	66
Grafik 44 Penyebaran Jaringan Kantor BPR	67
Grafik 45 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	67
Grafik 46 Jumlah BPRS berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	67
Grafik 47 Penyebaran Jaringan Kantor BUS	68
Grafik 48 Penyebaran Jaringan Kantor BPRS	69

Ringkasan Eksekutif

Secara umum, pada triwulan I-2025, kondisi perekonomian global cenderung beragam di tengah sentimen pasar keuangan dan pasar saham global terhadap *Trump Risk* (stimulus ekonomi AS dan pengenaan tarif impor) yang mendorong retaliasi tarif impor secara global. Selain itu, OECD merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global seiring dengan meningkatnya hambatan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan sehingga PDB global tahun 2025 diperkirakan tumbuh moderat sebesar 3,1% (yoy) lebih rendah dari perkiraan 2025 sebelumnya sebesar 3,3%. Laju inflasi global tercatat beragam, seperti AS, Eropa, dan UK sedang mengalami perlambatan sementara Tiongkok meningkat. Hingga akhir Maret 2025, The Fed tetap mempertahankan FFR sebesar 4,50%. Data ekonomi AS yang cenderung menunjukkan pelemahan serta kebijakan tarif dagang Trump yang cepat berubah memicu kekhawatiran The Fed mengalami kesulitan dalam mengatur moneter AS. The Fed memberikan sinyal akan menahan penurunan suku bunga acuan dan memandang adanya peluang untuk memangkas suku bunga acuan sebanyak dua atau tiga kali sepanjang tahun 2025.

Di tengah ketidakpastian perekonomian global dan menghadapi pengenaan tarif oleh AS, pada Triwulan I-2025 ekonomi domestik tumbuh sebesar 4,87% (yoy). Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (5,11%) dan triwulan sebelumnya yaitu 5,02%. Angka tersebut merupakan capaian pada awal tahun yang terendah sejak Triwulan I-2021 ketika pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi domestik ditopang oleh komponen konsumsi rumah tangga dan ekspor impor barang dan jasa yang tumbuh lebih tinggi. Di sisi lain, pertumbuhan investasi atau penanaman modal tetap bruto (PMTB) melambat dibandingkan triwulan I tahun lalu.

Ekonomi domestik yang tetap kuat juga tecermin pada indikator perbankan di triwulan I-2025 sebagaimana terlihat pada pertumbuhan kredit (bank umum) yang masih cukup baik yaitu sebesar 10,85% (yoy), meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya (8,96%, yoy). Pertumbuhan kredit tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit pada seluruh jenis penggunaan (Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, dan Kredit Konsumtif). Di sisi lain, DPK juga masih tumbuh yaitu sebesar 4,75% meski melambat dari periode yang sama tahun sebelumnya 7,44% (yoy). Selain itu, likuiditas perbankan masih terjaga ditopang oleh rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masih terjaga tinggi di atas *threshold* masing-masing sebesar 116,05% dan 26,22%. Tingkat permodalan juga cukup solid dengan CAR sebesar 25,43% meski sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya (25,56%) dikarenakan pertumbuhan modal yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ATMR yang tumbuh melambat 9,11% dari tahun lalu. Risiko kredit terpantau membaik dengan rasio NPL *gross* yang menurun menjadi sebesar 2,17% dan NPL net menjadi 0,80%. Sejalan dengan kinerja bank umum, kinerja BPR dan BPRS juga cukup baik meski kredit/pembiayaan dan DPK tumbuh relatif melambat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Rasio permodalan cukup solid dengan CAR BPR dan BPRS masing-masing sebesar 31,49% dan 24,47%.

Untuk menjaga ketahanan industri perbankan, OJK senantiasa berupaya memperkuat mitigasi risiko secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ke depan dengan melakukan peningkatan kualitas pengawasan diiringi dengan penguatan regulasi. Dalam hal penguatan regulasi, pada periode laporan OJK menerbitkan beberapa ketentuan perbankan berupa satu POJK, satu SEOJK, dan satu surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan. Adapun ketentuan perbankan tersebut mengatur mengenai laporan Bank Umum sebagai Kustodian, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat, dan Dukungan Perbankan dalam rangka Implementasi PP Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Di samping itu, OJK juga berpartisipasi aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan LPS dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

INFOGRAFIS

Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia

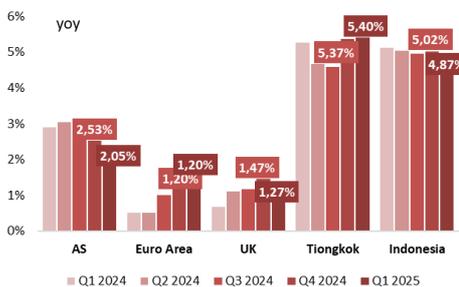
Triwulan I 2025

Ekonomi Global

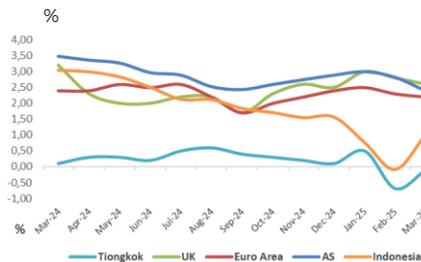


- Pada triwulan I 2025, kondisi perekonomian global cenderung beragam di tengah sentimen pasar keuangan dan pasar saham global terhadap Trump Risk (stimulus ekonomi Amerika Serikat (AS) dan rencana pengenaan tarif impor) yang mendorong retaliasi tarif impor secara global. Selain itu, OECD merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi Global seiring dengan meningkatnya hambatan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan sehingga PDB global tahun 2025 diperkirakan tumbuh moderat sebesar 3,1% (yoy) lebih rendah dari perkiraan 2025 sebelumnya sebesar 3,3%. Pertumbuhan ekonomi beberapa negara besar yaitu AS, Uni Eropa, dan Tiongkok diperkirakan melambat pada 2025 ini.
- Laju inflasi global juga tercatat beragam, seperti AS, Eropa, dan UK sedang mengalami perlambatan sementara Tiongkok meningkat. The Fed menyadari sedang mengalami kesulitan dalam mengatur moneter AS sehingga memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan 4,50%. PBoC dan BoE juga mempertahankan suku bunga, namun ECB memutuskan untuk memangkas suku bunganya
- Faktor risiko lain yang perlu diperhatikan yaitu *trade war* yang masih akan berlanjut dan melemahnya ekonomi di berbagai negara. Hal ini utamanya dipicu oleh penerapan kebijakan tarif impor Presiden Trump yang mempengaruhi negara-negara mitra. Selain itu, tensi geopolitik di Timur Tengah juga masih berlanjut.

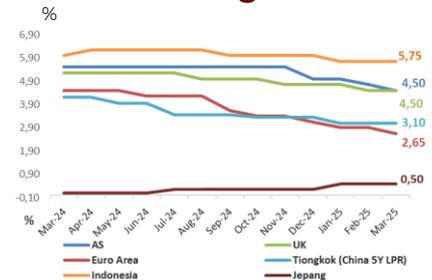
Pertumbuhan Ekonomi



Inflasi Global

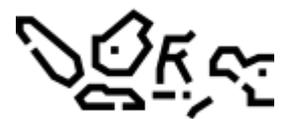


Suku Bunga Global

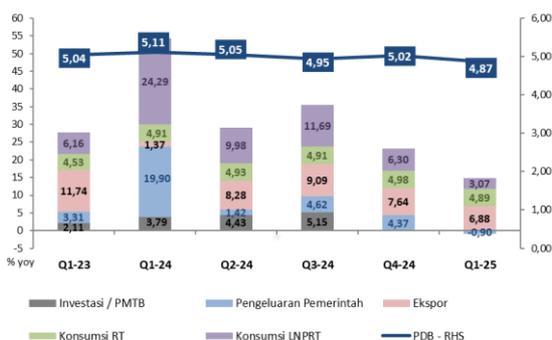


Ekonomi Domestik

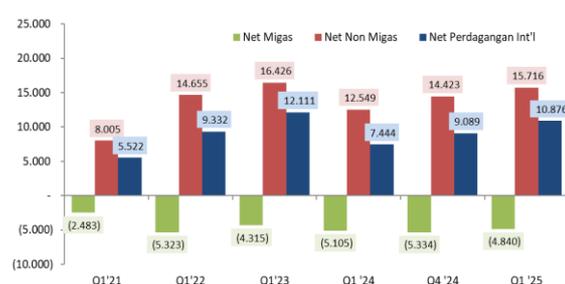
- Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 tumbuh sebesar 4,87% (yoy). Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (5,11%) dan triwulan sebelumnya yaitu 5,02%. Angka tersebut merupakan capaian pada awal tahun yang terendah sejak Triwulan I-2021 ketika pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi domestik ditopang oleh komponen konsumsi rumah tangga dan ekspor impor barang dan jasa yang tumbuh lebih tinggi. Di sisi lain, pertumbuhan investasi atau penanaman modal tetap bruto (PMTB) melambat dibandingkan triwulan I tahun lalu.
- Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Maret 2025 sebesar 121,1 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 123,1. Penurunan ini salah satunya dipicu oleh menurunnya daya beli masyarakat. Meski begitu, beberapa sektor yang memiliki porsi >5% terhadap PDB tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu seperti sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta sektor transportasi dan pergudangan.



PDB Indonesia



Neraca Perdagangan Indonesia



INFOGRAFIS

Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia

Triwulan I 2025

KINERJA



Aset

8,16% (yoy)

7,17% (yoy)

Rp12.726 T



DPK

7,44% (yoy)

4,75% (yoy)

Rp9.010 T



Kredit

12,40% (yoy)

9,16% (yoy)

Rp7.908 T



CAR

25,96%

25,43%



ROA

2,62%

2,58%

TW I-24

TW I-25



Bank Umum



Bank Umum Konvensional



Bank Umum Syariah

7,97% (yoy)

7,10% (yoy)

Rp12.072 T

7,34% (yoy)

4,78% (yoy)

Rp8.512 T

12,30% (yoy)

9,03% (yoy)

Rp7.486 T

25,98%

25,44%

2,65%

2,61%

11,83% (yoy)

8,40% (yoy)

Rp654 T

9,14% (yoy)

4,24% (yoy)

Rp497 T

14,28% (yoy)

11,53% (yoy)

Rp422 T

25,66%

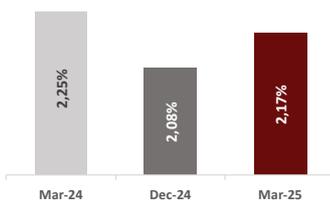
25,13%

2,03%

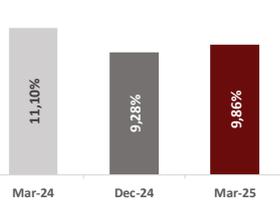
2,07%

Risiko Kredit

NPL Gross

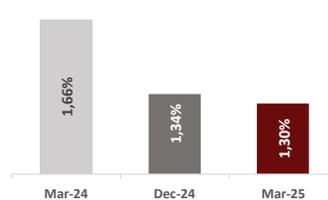


LaR



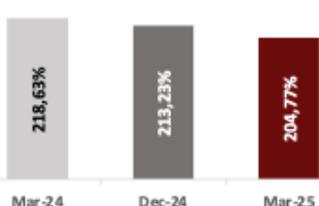
Risiko Pasar

PDN

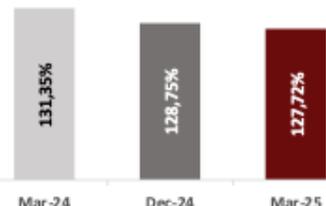


Risiko Likuiditas

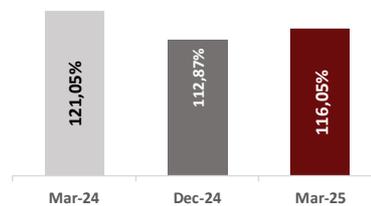
LCR



NSFR



AL/NCD

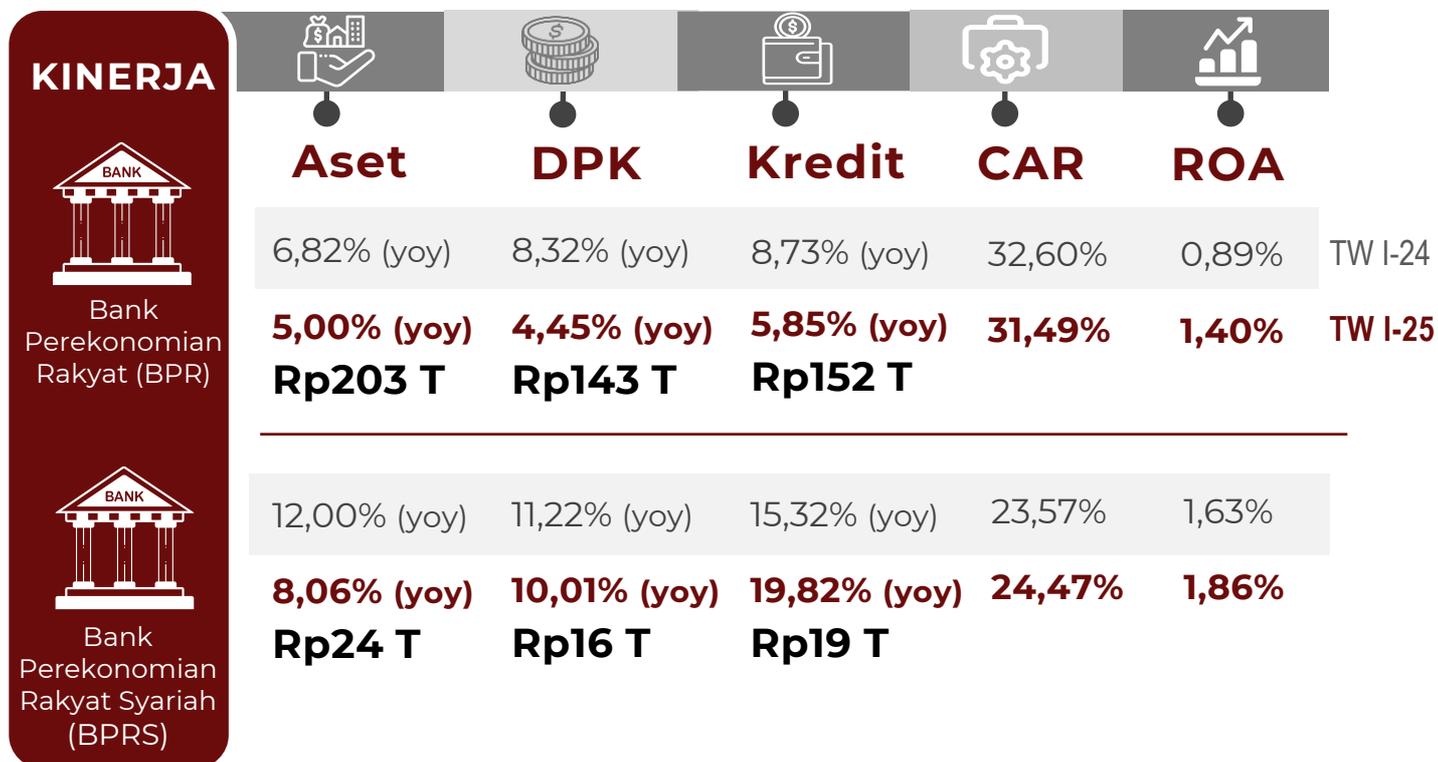


**PROFIL
RISIKO
BANK
UMUM**

INFOGRAFIS

Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia

Triwulan I 2025



KETENTUAN PERBANKAN PADA TRIWULAN I 2025

KETENTUAN	PERIHAL	TANGGAL DIUNDANGKAN/ PENETAPAN	OBJEK PENGATURAN
POJK Nomor 7 Tahun 2025	Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian	27 Maret 2025	Bank Umum
SEOJK Nomor 2/SEOJK.03/2025	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat	11 Maret 2025	BPR
Surat KEPP Nomor S-4/D.03/2025	Dukungan Perbankan dalam rangka Implementasi PP Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.	20 Februari 2025	Bank Umum

Halaman ini sengaja dikosongkan

1 Overview dan Analisis Perekonomian Global dan Domestik

Halaman ini sengaja dikosongkan

1 Overview dan Analisis Perekonomian Global dan Domestik

Pada triwulan I-2025, kondisi ekonomi global cenderung beragam di tengah sentimen pasar keuangan dan pasar saham global terhadap *Trump risk* (stimulus ekonomi AS dan pengenaan tarif impor) yang mendorong retaliasi tarif impor secara global. Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi domestik masih tetap terjaga antara lain ditopang oleh pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi daripada impor, serta komponen konsumsi rumah tangga meski pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya maupun triwulan yang sama pada tahun lalu.

1. Perekonomian Global

Pada triwulan I-2025, kondisi pasar keuangan dan perekonomian global cenderung *mixed*. Sentimen pasar keuangan dan pasar saham global dipengaruhi oleh *Trump Risk* (stimulus ekonomi Amerika Serikat (AS) dan pengenaan tarif impor) yang mendorong retaliasi tarif impor secara global. Meningkatnya hambatan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan menyebabkan OECD merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi Global. Berdasarkan laporan OECD *Economic Outlook, Interim Report Steering through Uncertainty* edisi Maret 2025, PDB global tahun 2025 diperkirakan tumbuh moderat sebesar 3,1% (yoy) lebih rendah dari perkiraan 2025 sebesar 3,3%. Sejalan dengan itu, perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 juga direvisi ke bawah menjadi sebesar 3,0% (yoy) dari sebelumnya diperkirakan sebesar 3,3%. Pertumbuhan ekonomi AS juga diproyeksikan melambat dari perkiraan sebelumnya yang menguat, menjadi 2,2% pada tahun 2025 dan 1,6% pada tahun 2026. Kemudian, pertumbuhan ekonomi di

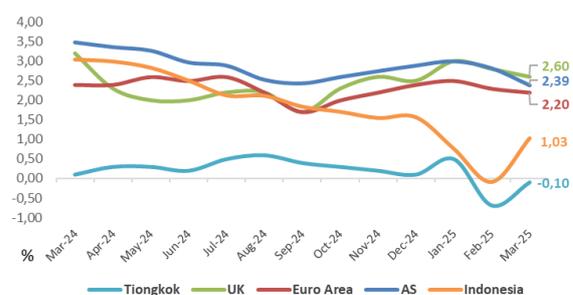
kawasan Uni Eropa diproyeksikan menjadi 1,0% pada tahun 2025 dan 1,2% pada tahun 2026, karena ketidakpastian yang meningkat membuat pertumbuhan tetap rendah. Pertumbuhan di Tiongkok diproyeksikan melambat dari 4,8% tahun ini menjadi 4,4% pada tahun 2026. Di sisi lain, pengenaan tarif impor secara global dikhawatirkan akan semakin mendorong kenaikan inflasi sehingga The Fed berpotensi menahan penurunan FFR. Hal ini akan berdampak pada menguatnya USD, dan potensi *capital outflow* utamanya dari *Emerging Market* (EM). Kondisi tensi geopolitik yang masih cukup tinggi di Timur Tengah akibat gagalannya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas turut membayangi perekonomian global. Pada akhir Maret 2025, Israel kembali menyerang Gaza selama 3 hari dan telah menewaskan hampir 600 orang warga Gaza. Serangan ini dianggap sebagai upaya Perdana Menteri, Israel Benjamin Netanyahu, mempertahankan dukungan kelompok garis kanan yang mengancam mundur karena tidak menyetujui gencatan senjata dengan Hamas. Lebih lanjut, US

National Security Adviser, Mike Waltz mendukung serangan Israel ke Gaza dan menyalahkan Hamas sebagai penyebab tidak berlanjutnya gencatan karena tidak mau membebaskan semua sandera. Sementara itu, Presiden AS, Donald Trump, memerintahkan serangan besar ke Houthi di Yaman (15/3). Serangan berlanjut hingga Houthi menghentikan serangannya di Laut Merah. AS juga mengancam Iran yang diduga mendukung Houthi. Serangan AS ke Yaman diyakini terkait ancaman Houthi kembali akan menyerang kapal di Laut Merah (8/3) apabila Israel tidak membuka blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sebelumnya Houthi menghentikan serangannya di Laut Merah setelah kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas. Di samping itu, Trump juga terlibat secara intensif dalam diskusi diplomatik dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Rusia menyetujui untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina tetapi menolak gencatan senjata secara penuh selama 30 hari. Pada 19 Maret, Rusia dan Ukraina menukar 175 tahanan perang serta Rusia berjanji akan menyerahkan 23 prajurit yang terluka kepada Ukraina.

Laju inflasi global tercatat beragam, seperti AS, Eropa, dan UK yang sedang mengalami perlambatan sementara Tiongkok meningkat. Namun demikian, ketidakpastian kondisi ekonomi global di Tengah kebijakan tarif Trump masih membayangi kondisi pasar keuangan dan perekonomian global. Data ekonomi AS yang cenderung menunjukkan pelemahan serta kebijakan tarif dagang Trump yang cepat berubah memicu kekhawatiran The Fed mengalami kesulitan dalam mengatur

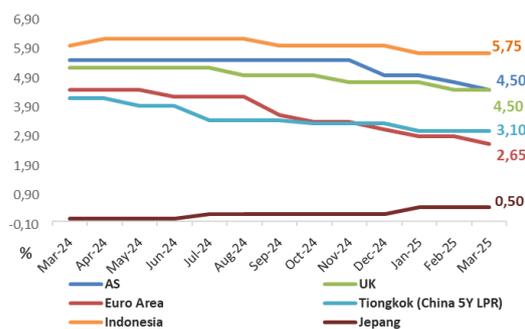
moneter AS. Presiden Trump (6/3) mengumumkan pengecualian sementara untuk barang yang diimpor dari Kanada dan Meksiko di bawah Perjanjian AS – Meksiko - Kanada (USMCA), menunda penerapan tarif 25% hingga 2 April, setelah sebelumnya (4/3) menandatangani tarif impor baru sebesar 25% pada Meksiko dan Kanada. Saat ini, tingkat Inflasi AS sebesar 2,39% terendah sejak September 2024 dan di bawah perkiraan pasar sebesar 2,6%. Meskipun demikian, hingga akhir Maret 2025 The Fed tetap mempertahankan suku bunga acuannya sebesar 4,50%. Deputi Gubernur The Fed, Christopher Waller memandang adanya peluang untuk memangkas suku bunga acuan sebanyak dua atau tiga kali pada tahun 2025. Sementara itu, Gubernur The Fed Bank of Atlanta Raphael Bostic mengisyaratkan para pejabat bank sentral AS akan menahan suku bunga acuan, setidaknya hingga Juni 2025.

Grafik 1 Inflasi Konsumen



Sumber: Reuters

Grafik 2 Suku Bunga Acuan



Sumber: Reuters

Berbeda dengan The Fed, pada 6 Maret 2025 European Central Bank (ECB) memutuskan untuk memangkas suku bunga acuannya sebesar 25bps menjadi 2,65% dan sesuai perkiraan. Pemangkasan ini merupakan yang keenam kalinya sejak inflasi zona Euro. *Deposit Facility Rate* turun dari 3,00% menjadi 2,75% dan *Marginal Lending Rate* turun dari 3,40% menjadi 3,15%. Presiden ECB, Christine Lagarde menyampaikan bahwa tingginya ketidakpastian ekonomi membuat ECB sulit memastikan inflasi akan tetap pada level 2% dalam jangka pendek. Di sisi lain, pemulihan ekonomi diproyeksikan melambat dari sebelumnya. PDB tahun 2025 diproyeksikan sebesar 0,9%.

Sementara itu, Bank of England (BoE) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya pada 4,50% setelah komite kebijakan moneter (*Monetary Policy Committee/MPC*) bank tersebut memberikan suara delapan lawan satu untuk menghentikan siklus penurunan suku bunga setelah tiga kali penurunan dalam setahun terakhir. Para pembuat kebijakan mengadopsi pendekatan *wait and see* di tengah inflasi yang tetap tinggi dan ketidakpastian ekonomi global. Inflasi CPI meningkat menjadi 3,0% pada bulan Januari, dan inflasi diperkirakan akan naik menjadi 3,75% pada Q3 2025 meskipun harga energi global turun. Selain itu, MPC mencatat bahwa ketidakpastian kebijakan perdagangan global dan risiko geopolitik meningkat, dengan volatilitas pasar keuangan yang meningkat. Hal ini sejalan dengan People's Bank of China (PBoC) yang juga memutuskan untuk mempertahankan suku bunga pinjaman utama (LPR) satu tahun pada 3,1% dan LPR lima tahun pada

3,6%, sesuai dengan ekspektasi pasar. PboC mencermati tanda pemulihan ekonomi Tiongkok yang mulai pulih dan menunjukkan momentum positif. Selain itu, bank-bank di Tiongkok sedang menghadapi margin keuntungan yang semakin kecil sehingga bank sentral cenderung hati-hati.

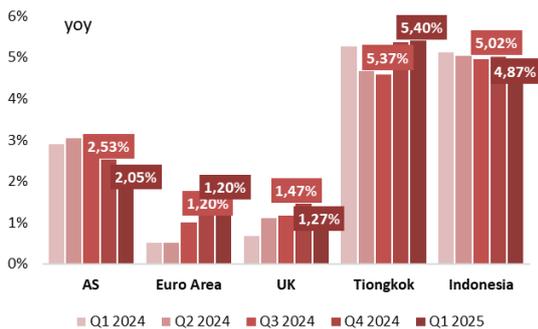
Pada Maret 2025, Bank Indonesia memutuskan mempertahankan BI Rate pada level 5,75% dengan suku bunga *Deposit Facility* sebesar 5,00% dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 6,50%.

Pada triwulan laporan, perekonomian AS tumbuh 2,05% (yoy) namun menurun dari triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 2,53% (yoy). PMI Manufaktur AS sebesar 49,0 (zona kontraksi) melemah dibandingkan bulan sebelumnya yaitu sebesar 50,3. Angka yang terkontraksi tersebut disebabkan antara lain karena ketidakpastian tarif akibat *trade war*, *demand* yang melemah, dan *output* yang melemah (diukur dari *production dan employment index*).

Di sisi lain ekonomi Tiongkok mengalami pertumbuhan pada triwulan I-2025 dibandingkan triwulan IV-2024. Ekonomi Tiongkok tumbuh 5,40% (yoy) dari 5,37% (yoy) pada triwulan sebelumnya, dan di atas ekspektasi pasar sebesar 5,1%. Laju pertumbuhan ini merupakan yang tercepat dalam satu setengah tahun terakhir yang didorong oleh berbagai stimulus kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Tiongkok. Di sisi perdagangan internasional, ekspor Tiongkok tumbuh paling kuat sejak Oktober. Banyak perusahaan mempercepat pengiriman barang karena khawatir akan ada tarif tambahan yang diberlakukan di masa depan. Sementara itu, penurunan

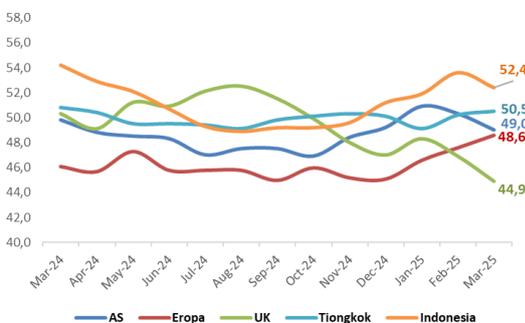
impor juga semakin berkurang. Namun meningkatnya ketegangan perdagangan dengan AS mengakibatkan prospek ekonomi Tiongkok meredup dan memberikan tekanan besar kepada pemerintah Tiongkok untuk dapat memberikan bantuan atau stimulus tambahan agar ekonomi tetap stabil.

Grafik 3 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara



Sumber: *Trading Economics* dan *Reuters*

Grafik 4 PMI Manufaktur Beberapa Negara



Sumber: *Reuters*

Pada triwulan I-2025 ini, penjualan ritel Tiongkok mampu tumbuh 4,6% melebihi triwulan sebelumnya yaitu 3,5% pada triwulan IV-2024 dan hampir menyamai pertumbuhan pada triwulan I-2024 sebesar 4,7%.

Hal ini didorong oleh peningkatan belanja selama periode liburan, seperti Hari Buruh dan Festival Perahu Naga, bersamaan dengan upaya pemerintah Tiongkok untuk mengurangi dampak tarif impor yang

diterapkan oleh AS. Meski begitu, Indeks keyakinan konsumen Tiongkok sempat naik turun pada triwulan I yaitu menjadi 87,50 (Maret '25) dari 88,40 (Februari '25) setelah sebelumnya meningkat dari 87,50 (Januari '25). Selain itu beberapa isu seperti *trade war* dengan AS, krisis hutang properti yang tidak kunjung selesai, dan tingginya angka pengangguran di kalangan anak muda masih membayangi perekonomian Tiongkok triwulan ini.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Eropa pada triwulan I-2025 stabil sebesar 1,20% (yoy). Beberapa negara yang tergabung dalam zona Eropa mencatatkan pertumbuhan pada triwulan I ini. Spanyol membukukan pertumbuhan tertinggi yaitu 0,6%. Disusul oleh Italia dan Jerman yang tumbuh sebesar 0,3% dan 0,2%. Sementara Prancis dan Belanda keduanya tercatat hanya mampu tumbuh 0,1% pada triwulan I-2025 ini. Dari tingkat pertumbuhan secara kuartalan, Irlandia tumbuh paling tinggi meski sedikit melambat dari triwulan sebelumnya. Sementara itu, pada triwulan I-2025 ekonomi UK mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,27% (yoy) melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 1,47%.

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih tertahan, tingkat inflasi di Eropa dan UK mencatatkan perlambatan. Pada periode Maret 2025, inflasi Eropa sebesar 2,20% menurun dari triwulan sebelumnya yaitu 2,40%. Pada Maret 2025, berbagai indikator perekonomian di Eropa beragam cenderung menguat seperti aktivitas produksi yang meningkat, PMI manufaktur juga meningkat meski masih di zona kontraksi (<50), dan aktivitas ekspor yang meningkat lebih tinggi dibandingkan

aktivitas impor sehingga terjadi surplus perdagangan. Sedangkan, aktivitas penjualan stagnan diikuti indeks kepercayaan konsumen dan tingkat pengangguran yang naik tipis.

Berbeda dengan kondisi ekonomi di Eropa, perekonomian UK menunjukkan tanda perlambatan. Ekonomi UK tumbuh sebesar 1,27% (yoy) menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,47% (yoy). Aktivitas konsumsi negara ini mengalami penurunan menjadi sebesar 1,85% (yoy) dari 2,75% (yoy) pada triwulan IV-2024, meskipun tumbuh positif jika dibandingkan dengan posisi yang sama pada tahun lalu sebesar -0,10% (yoy). Kinerja manufaktur di negara ini turun menjadi 44,9 dari sebelumnya 47 pada triwulan IV-2024 dan tetap berada di zona kontraksi (<50), bahkan memburuk jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 50,3 (zona ekspansi). Selain itu, tingkat pengangguran mengalami peningkatan menjadi 4,5% dari 4,4% pada triwulan IV-2024 dan posisi yang sama tahun sebelumnya.

Pada triwulan I-2025, secara umum harga komoditas global berfluktuasi dan dalam tren peningkatan. Pergerakan harga komoditas global masih dipengaruhi oleh jumlah permintaan dan penawaran, faktor geopolitik, serta perubahan iklim. Indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) mencatatkan peningkatan sebesar 550,43 naik dari 506,43 pada triwulan IV-2024, dan tumbuh positif dibandingkan triwulan I-2024 sebesar 486,50. Kinerja harga minyak mentah Brent pada triwulan I-2025 ditutup pada level 74,78 USD/barel naik dibandingkan harga pada triwulan IV-2024

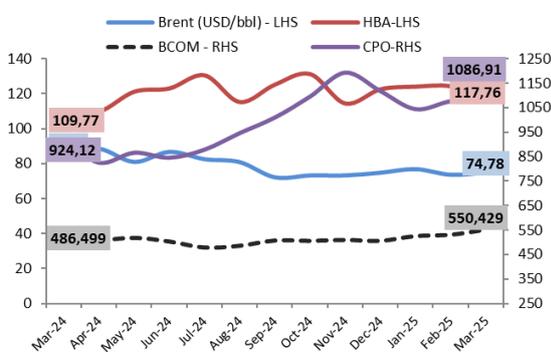
sebesar 74,74 USD/barel, meskipun menurun dibandingkan triwulan I-2024 yaitu pada level 85,8 USD/barel. Di sisi lain, harga batubara juga sangat fluktuatif khususnya dalam satu tahun belakangan. Pada akhir triwulan I-2025, harga batubara mencapai sebesar USD 117,76/ton meningkat dibandingkan tahun lalu USD 109,77/ton. Hal ini sejalan dengan harga CPO yang mengalami kenaikan menjadi USD 1.086,91/ton pada Maret 2025 dari USD 924,12/ton pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara umum, kenaikan harga batubara disinyalir karena sejumlah negara besar mengembangkan pembangkit listrik bertenaga batu bara seperti Tiongkok dan India masih bergantung pada pasokan komoditas ini. Selain itu, produksi batubara dari beberapa negara produsen utama seperti Afrika Selatan dan Australia tengah terganggu akibat cuaca ekstrem dan gangguan logistik. Terlebih permintaan *met-coal* dan *thermal coal* kembali menguat di tengah kencangnya gaung transisi energi. *Met-coal* merupakan bahan baku penting untuk membuat baja dan baja memiliki peran penting dalam perekonomian mulai dari konstruksi, infrastruktur, transportasi hingga teknologi. Permintaan *thermal coal* juga meningkat sebagaimana terjadi di AS dan beberapa negara Asia selama triwulan I 2025 dikarenakan harga gas alam yang tinggi sehingga masyarakat cenderung masih memilih *thermal coal* sebagai sumber energi.

Di sisi lain, kenaikan harga CPO pada triwulan I 2025 didorong oleh beberapa faktor antara lain permintaan global yang cukup kuat ditunjukkan oleh meningkatnya

permintaan pangan dan industri meningkat dari dua negara konsumen utama CPO dunia yaitu Tiongkok dan India. Di sisi lain, menurunnya produksi CPO global khususnya di Indonesia dan Malaysia akibat cuaca buruk (El Nino dan banjir) sehingga menurunkan produksi CPO yang mengakibatkan menipisnya stok secara global. Dari sisi domestik, meningkatnya permintaan CPO diperkirakan akan terus berlanjut mengingat penerapan mandat biodiesel B40 yang diperluas pada Januari 2025. Berdasarkan laporan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), kebijakan tersebut diperkirakan akan menurunkan ekspor sawit Indonesia di 2025 menjadi 27,5 juta ton setelah sebelumnya mampu mengekspor 29,5 juta ton selama 2024. Ke depannya perlu diwaspadai menurunnya permintaan CPO akibat harga yang meningkat mengingat pada bulan Februari 2025, India telah membatalkan pesanan sebanyak 100.000 metric ton CPO yang dijadwalkan untuk dikirim pada bulan Maret dan Juli karena harga acuan CPO Malaysia yang melonjak tinggi serta margin negatif yang dihasilkan oleh perusahaan penyulingan CPO di India.

Grafik 5 Perkembangan Harga Komoditas

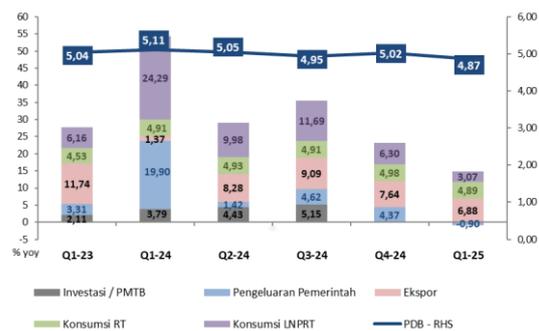


Sumber: Reuters

2. Perekonomian Domestik

Dari sisi domestik, fundamental ekonomi Indonesia masih relatif terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global, meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tecermin pada ekonomi Indonesia yang tumbuh 4,87% (yoy) pada triwulan I-2025 meskipun capaian tersebut melandai dari periode yang sama tahun lalu yaitu 5,11% (yoy) dan triwulan sebelumnya sebesar 5,02% (yoy). Bahkan angka ini merupakan capaian pada awal tahun yang terendah sejak triwulan I-2021 ketika ekonomi Indonesia berkontraksi -0,69% (yoy) akibat Pandemi Covid-19.

Grafik 6 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran



Sumber: BPS

Dari sisi pengeluaran, ekonomi domestik yang tumbuh melambat utamanya dipengaruhi oleh stagnasi komponen Konsumsi Rumah Tangga yang masih menjadi kontributor utama PDB Indonesia dengan porsi mencapai 53,33%. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tercatat tumbuh 4,89% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,98% (yoy) maupun triwulan yang sama tahun lalu yaitu 4,91% (yoy). Angka tersebut menunjukkan bahwa komponen ini masih melanjutkan tren pertumbuhan di bawah 5% selama 18 bulan berturut-turut

atau sejak akhir tahun 2023. Sejalan dengan itu, komponen Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga/LNPRT (porsi: 1,39% terhadap PDB) juga tumbuh melambat dari 24,29% (yoy) pada triwulan I-2024 menjadi 3,07% (yoy). Adapun pertumbuhan konsumsi LNPRT yang tinggi pada triwulan I-2024 antara lain didorong oleh peningkatan aktivitas persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 seperti: sosialisasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), dan konsolidasi nasional. Sehubungan dengan berakhirnya pesta demokrasi pada periode tersebut, maka pertumbuhan belanja konsumsi LNPRT menjadi tidak setinggi tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga yang melambat utamanya dikontribusikan oleh pengeluaran untuk Restoran dan Hotel (porsi: 5,07% terhadap PDB) serta makanan dan minuman selain restoran (porsi: 19,40%) yang masing-masing tumbuh 6,06% (yoy) dan 4,05% (yoy) pada triwulan I-2025, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 6,43% (yoy) dan 4,33% (yoy). Perlambatan tersebut seiring dengan jumlah penduduk kelas menengah yang menurun signifikan pasca-pandemi Covid-19 hingga awal tahun 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah turun ke kelompok *aspiring middle class* (calon kelas menengah) sejak 2019-2024. Hal ini berdampak pada berkurangnya jumlah penduduk kelas menengah menjadi 47,85 juta penduduk atau 17,13% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2024. Kondisi tersebut antara lain dipicu oleh

lonjakan angka pengangguran karena gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masih berlanjut dan terbatasnya ketersediaan lapangan kerja sehingga daya beli masyarakat semakin tertekan. Akibatnya, masyarakat cenderung menunda konsumsi terutama untuk kebutuhan tersier dan lebih banyak menabung sebagai bentuk antisipasi ketidakpastian ekonomi atau biasanya dikenal dengan fenomena "*precautionary saving*".

Meskipun demikian, Konsumsi Rumah Tangga yang tetap tumbuh positif salah satunya didorong oleh momentum bulan Ramadhan dan libur panjang menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri pada akhir Maret 2025. Selain itu, juga dipengaruhi oleh keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi yang tetap terjaga di level optimis (>100) sebagaimana tecermin pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Maret 2025 sebesar 121,1 meskipun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 123,1. Secara umum, perkembangan IKK dapat menjadi alarm peringatan dini terhadap arah pertumbuhan konsumsi domestik. Jika kepercayaan konsumen menurun, maka masyarakat akan cenderung lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang, sehingga dapat menghambat pertumbuhan konsumsi domestik. Sebaliknya, jika kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi tinggi, maka mereka akan cenderung lebih banyak berbelanja, sehingga mendorong peningkatan konsumsi domestik.

Sejalan dengan Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh melambat, komponen Konsumsi Pemerintah memperlihatkan adanya kontraksi -0,90% (yoy) pada triwulan I-2025 atau turun signifikan dari periode yang sama tahun lalu sebesar 19,90% (yoy). Apabila dibandingkan triwulan I-2024, pertumbuhan Konsumsi Pemerintah cukup tinggi karena didorong adanya belanja Pemilihan Umum (Pemilu) sedangkan pada triwulan I-2025 tidak ada momentum tersebut. Selain itu, rendahnya realisasi belanja negara turut memberi tekanan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2025. Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Maret 2025 mencapai Rp620,3 triliun atau 17,1% dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Angka tersebut hanya tumbuh 1,37% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu, utamanya disebabkan oleh turunnya belanja Pemerintah Pusat sebesar -3,37% (yoy) dari Rp427,6 triliun menjadi Rp413,2 triliun (15,3% dari total APBN). Kontraksi ini dipicu oleh penurunan belanja Kementerian/Lembaga sebesar -11,75% (yoy) dari Rp222,2 triliun menjadi Rp196,1 triliun. Padahal, belanja Pemerintah, khususnya belanja Kementerian/Lembaga selama ini berperan penting sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi melalui proyek pembangunan serta pengadaan barang dan jasa.

Komponen Investasi atau Penanaman Modal Tetap Bruto/PMTB (porsi: 30,00% terhadap PDB) juga menjadi salah satu faktor penyebab tertahannya laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-

2025. Komponen Investasi mencatatkan pertumbuhan melambat dari 3,79% (yoy) pada triwulan I-2024 menjadi 1,53% (yoy). Investasi non bangunan seperti sumber daya hayati atau *Cultivated Biological Resources* (CBR) dan peralatan lainnya menjadi penyebab utama dari melambatnya pertumbuhan investasi pada periode laporan. Adapun investasi CBR berkontraksi -13,28% (yoy) dari 3,58% (yoy) pada triwulan I-2024. Sejalan dengan hal tersebut, investasi peralatan lainnya yang semula tumbuh positif sebesar 4,99% (yoy) menjadi berkontraksi -0,29% (yoy). Meskipun demikian, berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Indonesia pada triwulan I-2025 mencapai Rp465,2 triliun atau tumbuh 15,9% (yoy) dari Rp401,5 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Angka realisasi investasi pada periode ini merupakan 24,4% dari total target investasi sepanjang tahun 2025 senilai Rp1.905,6 triliun.

Di sisi lain, komponen Ekspor Barang dan Jasa justru mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi yaitu dari 1,37% (yoy) pada triwulan I-2024 menjadi 6,88% (yoy) pada periode laporan. Sejalan dengan pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang meningkat, kontribusi komponen tersebut terhadap PDB juga menunjukkan adanya peningkatan yaitu menjadi 23,84% pada triwulan I-2025 dari periode yang sama tahun lalu sebesar 23,39%. Hal tersebut didorong oleh pertumbuhan nilai ekspor Indonesia yang tumbuh positif sebesar 3,14% (yoy) pada Maret 2025 setelah berkontraksi -3,75% (yoy) pada Maret 2024. Perkembangan nilai ekspor tersebut

dipengaruhi oleh transaksi migas maupun nonmigas yang masing-masing tumbuh signifikan dari -3,96% (yoy) dan -3,73% (yoy) pada Maret 2024 menjadi 13,05% (yoy) dan 2,54% (yoy) pada periode laporan.

Komoditas utama ekspor migas yang mendorong kenaikan pertumbuhan tersebut adalah gas alam (porsi: 3,05% terhadap total nilai ekspor nonmigas) yang sebelumnya terkontraksi -19,01% (yoy) menjadi tumbuh positif sebesar 13,10% (yoy). Selain itu, komoditas hasil minyak (porsi: 2,69% terhadap total nilai ekspor nonmigas) juga turut berkontribusi terhadap kenaikan pertumbuhan ekspor pada laporan karena tumbuh tinggi mencapai 18,03% (yoy) meskipun lebih rendah dibandingkan Maret tahun lalu sebesar 26,48% (yoy). Di sisi lain, kenaikan pertumbuhan ekspor nonmigas dipengaruhi oleh komoditas *palm oils* (porsi: 6,84% terhadap total nilai ekspor nonmigas) yang tumbuh 49,20% (yoy) pada Maret 2025 atau meningkat signifikan dari yang sebelumnya terkontraksi -7,70% (yoy). Diikuti oleh komoditas besi/baja (porsi: 12,11% terhadap total nilai ekspor nonmigas) dan kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian (porsi: 3,73%) yang sebelumnya terkontraksi -5,14% (yoy) dan -13,70% (yoy) pada Maret 2024 kemudian tumbuh positif mencapai 9,19% (yoy) dan 47,67% (yoy) pada Maret 2025. Selanjutnya, komoditas peralatan listrik (porsi: 4,73%) juga mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi dari 6,99% (yoy) menjadi 20,88% (yoy).

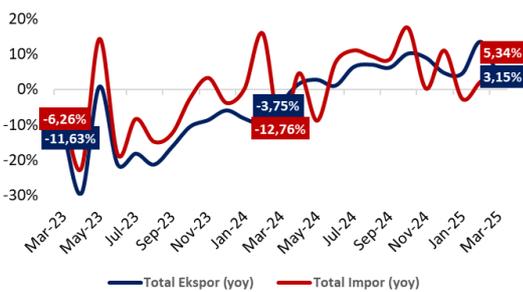
Sejalan dengan perkembangan komponen ekspor, impor barang dan jasa (porsi:

19,02%) juga tumbuh positif sebesar 3,48% (yoy) meningkat dari 1,94% (yoy) pada triwulan I-2024. Perkembangan ini didorong oleh nilai impor yang kembali mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,34% (yoy) pada Maret 2025 dari yang sebelumnya terkontraksi hingga -12,76% (yoy) pada periode yang sama tahun lalu. Peningkatan nilai impor tersebut didorong oleh transaksi nonmigas yang sebelumnya terkontraksi -16,72% (yoy) pada Maret 2024 menjadi 7,91% (yoy) pada Maret 2025. Adapun komoditas impor nonmigas yang mendorong peningkatan terbesar antara lain: produk manufaktur lainnya (porsi: 18,15% terhadap total nilai impor nonmigas); mesin untuk keperluan khusus (porsi: 6,66% terhadap total nilai impor nonmigas); peralatan listrik (porsi: 5,10% terhadap total nilai impor nonmigas); kendaraan bermotor roda empat dan lebih (porsi: 2,84% terhadap total nilai impor nonmigas); dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih (porsi: 1,58% terhadap total nilai impor nonmigas). Komoditas produk manufaktur lainnya dan mesin untuk keperluan khusus yang sebelumnya masing-masing terkontraksi cukup dalam hingga -26,08% (yoy) dan -32,45% (yoy) kemudian tumbuh positif sebesar 10,28% (yoy) dan 44,68% (yoy). Berikutnya, komoditas peralatan listrik serta kendaraan bermotor roda empat dan lebih mencatatkan pertumbuhan sebesar 16,63% (yoy) dan 60,46% (yoy) dari yang semula terkontraksi -26,00% (yoy) dan -28,58% (yoy) pada Maret 2024. Terakhir, komoditas suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 12,71% (yoy) setelah

terkontraksi -42,49% (yoy) pada Maret tahun lalu.

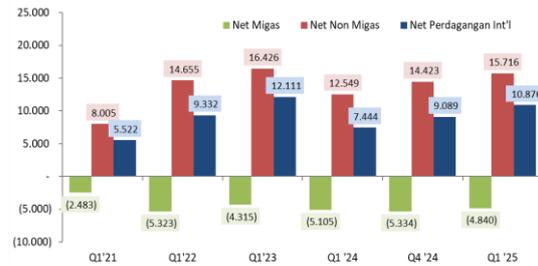
Nilai ekspor pada Maret 2024 sebesar USD23,25 miliar yang lebih tinggi daripada nilai impor sebesar USD 18,92 miliar pada periode laporan mendorong neraca perdagangan melanjutkan surplus selama 59 bulan berturut-turut. Pada Desember 2024, surplus neraca perdagangan tercatat sebesar USD4,33 miliar (defisit migas USD1,68 miliar dan surplus nonmigas US6,00 miliar). Angka surplus neraca perdagangan pada bulan Maret 2025 merupakan yang tertinggi sejak awal tahun (Januari: USD3,45 miliar dan Februari: USD3,1 miliar). Adapun secara kumulatif, surplus neraca perdagangan mencapai USD10,87 miliar selama periode Januari-Maret 2025 atau tumbuh tinggi hingga 46,07% (ctc) dari USD7,44 miliar dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Grafik 7 Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Impor



Sumber: BPS

Grafik 8 Neraca Perdagangan Indonesia



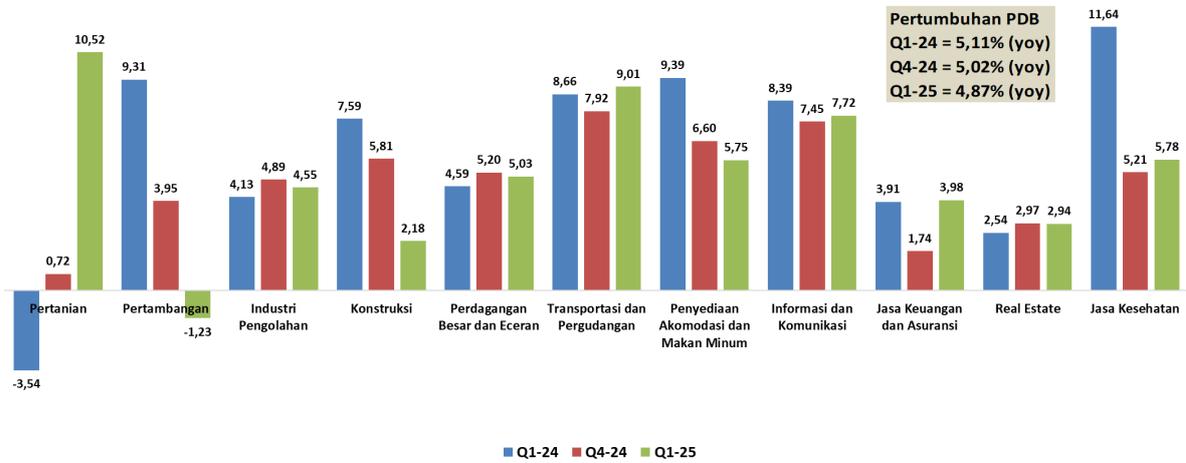
Sumber: BPS

Berdasarkan lapangan usaha, terdapat beberapa sektor dengan kontribusi cukup besar terhadap PDB (>5%) yang tumbuh melambat secara tahunan pada periode laporan. Pertama, sektor pertambangan dan pengalihan (porsi: 7,09%) yang sebelumnya tumbuh tinggi sebesar 9,31% (yoy) menjadi terkontraksi -1,23% (yoy) pada triwulan I-2025. Penurunan ini diperkirakan seiring dengan semakin tertekannya volume ekspor batu bara dari -5,27% (yoy) menjadi -7,765 (yoy) akibat permintaan global menurun. Penurunan volume ekspor batu bara ini berimplikasi pada semakin terkontraksinya pertumbuhan nilai ekspor komoditas batu bara sebesar -23,14% (yoy) pada Maret 2025. Kedua, sektor konstruksi yang tumbuh 2,18% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan I-2024 sebesar 7,59% (yoy). Penurunan ini ditengarai sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah yang berdampak pada penundaan dan pengurangan proyek-proyek infrastruktur yang selama ini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi serta dipengaruhi oleh sentimen *wait and see* investor atas perkembangan kondisi terkini. Ketiga, sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh 7,72% (yoy) namun melambat dari 8,39% (yoy). Pertumbuhan sektor informasi dan

komunikasi yang melambat ditengarai karena terkendala oleh ketimpangan infrastruktur pengembangan sektor tersebut di Indonesia yang masih sangat terfokus di wilayah perkotaan dan Pulau Jawa. Kondisi tersebut diakibatkan dari adanya tantangan geografis serta biaya yang lebih tinggi dan dapat memperparah ketertinggalan terhadap akses informasi, pendidikan berbasis digital, dan peluang ekonomi yang muncul dari transformasi digital itu sendiri. Sementara itu, pertumbuhan pada sektor tersebut sejalan dengan transformasi digital dan adopsi *Artificial Intelligent* (AI) di berbagai sektor yang semakin kuat sehingga meningkatkan *traffic data* dan mendorong pembangunan pusat data. Meskipun demikian, terdapat beberapa sektor dengan porsi di atas 5% terhadap PDB yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2025 tetap positif karena tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Pertama, sektor pertanian (porsi: 11,07%) dengan kenaikan pertumbuhan yang cukup signifikan dari -3,54% (yoy) menjadi 10,52% (yoy). Peningkatan tersebut didukung oleh meningkatnya produksi padi ketika panen raya dan permintaan bahan pangan pada momen Ramadan. Adapun peningkatan produktivitas didukung oleh distribusi pupuk bersubsidi yang semakin membaik. Data *Rice Outlook* April 2025 menunjukkan bahwa produksi beras Indonesia menjadi yang tertinggal di Kawasan Asia Tenggara

pada musim tanam 2024/2025. Kedua, sektor industri pengolahan (porsi: 20,45%) dari 4,13% (yoy) tumbuh lebih tinggi menjadi 4,55% (yoy) lantaran ditopang oleh aktivitas hilirisasi. Ketiga, sektor perdagangan besar dan eceran (porsi: 13,11%) tumbuh dari 4,59% (yoy) menjadi 5,03% (yoy). Tidak hanya itu, sektor transportasi dan pergudangan juga turut mencatatkan kenaikan pertumbuhan dari 8,66% (yoy) menjadi 9,01% (yoy). Perkembangan sektor perdagangan besar dan eceran serta transportasi dan pergudangan tersebut ditengarai sejalan dengan momentum musiman Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri yang berkontribusi mendorong peningkatan aktivitas konsumsi dan distribusi barang secara signifikan. Pada momen tersebut, permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok dan barang konsumsi biasanya meningkat, sehingga mendorong percepatan perputaran barang di sektor perdagangan besar dan eceran. Selain itu, peningkatan volume pengiriman dan distribusi barang di sektor transportasi dan pergudangan juga didorong oleh tingginya mobilitas masyarakat selama masa libur HBKN Idul Fitri. Hal ini berimplikasi pada peningkatan layanan logistik, distribusi, serta transportasi barang dan orang, yang secara simultan mendukung pertumbuhan kedua sektor tersebut.

Grafik 9 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber: BPS

2 Kinerja Industri Perbankan Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

2 Kinerja Industri Perbankan Nasional

Secara umum ketahanan perbankan pada triwulan I-2025 cukup terjaga, tecermin dari tingkat permodalan bank yang cukup solid dan ditopang ketersediaan likuiditas yang memadai. Fungsi intermediasi perbankan masih cukup baik ditandai dengan kredit dan DPK bank umum yang masih tumbuh meskipun mulai melambat dari tahun sebelumnya. Rentabilitas dan efisiensi perbankan juga masih terjaga meskipun menurun dari tahun sebelumnya yang juga diiringi dengan likuiditas yang sedikit mengalami penurunan pada bulan laporan.

1. Kinerja Bank Umum

Secara umum ketahanan perbankan pada triwulan I-2025 cukup terjaga, tecermin dari tingkat permodalan bank yang cukup solid dan ditopang ketersediaan likuiditas yang memadai dengan rasio AL/NCD dan AL/DPK tercatat jauh di atas *threshold* meskipun mengalami penurunan, seiring dengan penyaluran kredit yang tumbuh melebihi penghimpunan dana. Hal ini juga menggambarkan fungsi intermediasi perbankan yang masih baik, dengan kredit

dan DPK yang masih tumbuh meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Rentabilitas perbankan juga masih tercatat cukup terlihat dari rasio ROA sebesar 2,58%, turun 4 bps dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, perlu diperhatikan juga terkait efisiensi perbankan yang juga tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya tecermin dari BOPO yang meningkat menjadi sebesar 85,84%.

Tabel 1 Indikator Umum Bank Umum

Indikator	2024		2025		qtq		yoy	
	Mar	Dec	Mar	Dec'24	Mar'25	Mar '24	Mar'25	
Jumlah Bank	106	105	105	-	-	-	-	
BUK	92	91	91	-	-	(1)	(1)	
BUS	14	14	14	-	-	1	-	
Total Aset (Rp Miliar)	11.875.828	12.460.955	12.726.828	2,58%	2,13%	8,16%	7,17%	
BUK	11.272.046	11.796.344	12.072.331	2,33%	2,34%	7,97%	7,10%	
BUS	603.782	664.611	654.498	7,23%	-1,52%	11,83%	8,40%	
Kredit (Rp Miliar)	7.244.637	7.831.557	7.908.425	3,33%	0,98%	12,40%	9,16%	
BUK	6.866.246	7.418.302	7.486.388	3,34%	0,92%	12,30%	9,03%	
BUS	378.391	413.255	422.037	3,14%	2,13%	14,28%	11,53%	
DPK (Rp Miliar)	8.601.220	8.837.242	9.010.153	1,34%	1,96%	7,44%	4,75%	
BUK	8.123.819	8.325.868	8.512.501	1,07%	2,24%	7,34%	4,78%	
BUS	477.401	511.374	497.652	5,81%	-2,68%	9,14%	4,24%	
- Giro (Rp Miliar)	2.663.816	2.751.373	2.770.539	1,77%	0,70%	9,37%	4,01%	
BUK	2.581.485	2.672.964	2.689.247	2,05%	0,61%	9,26%	4,17%	
BUS	82.331	78.409	81.292	-7,01%	3,68%	12,91%	-1,26%	
- Tabungan (Rp Miliar)	2.693.409	2.850.242	2.901.841	3,09%	1,81%	5,99%	7,74%	
BUK	2.517.540	2.653.336	2.710.216	2,77%	2,14%	5,71%	7,65%	
BUS	175.869	196.906	191.625	7,57%	-2,68%	10,09%	8,96%	
- Deposito (Rp Miliar)	3.243.996	3.235.627	3.337.773	-0,51%	3,16%	7,11%	2,89%	
BUK	3.024.795	2.999.568	3.113.037	-1,21%	3,78%	7,12%	2,92%	
BUS	219.201	236.060	224.736	9,32%	-4,80%	7,05%	2,53%	

Sumber: SPI Maret 2025

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps)

1.1 Aset Bank Umum

Aset Bank Umum tumbuh 7,17% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,16% (yoy). Jika dilihat dari jenis usaha bank, baik BUK maupun BUS sama-sama masih tumbuh meskipun melambat. BUK tercatat tumbuh 7,10% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 7,97% (yoy), sedangkan BUS tercatat tumbuh 8,40% (yoy) setelah tahun sebelumnya mampu tumbuh *double digit* sebesar 11,83% (yoy). Penurunan pertumbuhan aset bank umum secara umum sejalan dengan penurunan pertumbuhan DPK bank umum pada periode laporan.

Sebagian besar aset bank umum merupakan aset BUK dengan porsi 94,86%, sementara itu aset BUS memiliki porsi 5,14%. Meskipun masih cukup kecil, porsi aset BUS tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,08% maupun triwulan sebelumnya 5,10%.

Berdasarkan kelompok bank, penurunan aset terjadi pada seluruh kelompok bank kecuali BUSN. Pada periode laporan, BUSN, yang merupakan kelompok Bank dengan porsi terbesar (44,77%), masih tercatat tumbuh 7,08% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,63% (yoy). Meskipun

merupakan porsi terbesar dan meningkat, kelompok Bank ini belum dapat mendorong ke atas pertumbuhan aset bank umum.

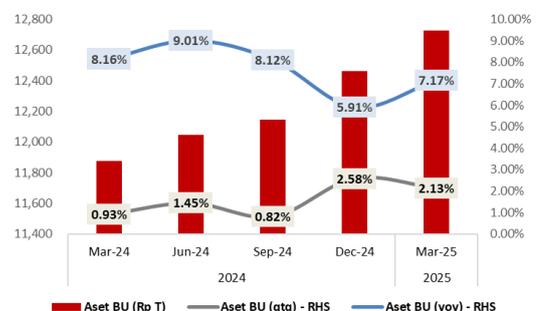
Aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa bank. Total aset empat Bank Umum terbesar mencapai 50,62% atau melebihi setengah dari aset perbankan Indonesia, sedangkan total aset 20 Bank Umum terbesar mencapai 79,85% dari aset perbankan.

Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset Bank Umum

Periode	Aset	
	CR4 %	CR20 %
Mar '24	50.14%	79.54%
Jun '24	49.89%	79.49%
Sep '24	49.73%	79.43%
Dec '24	49.93%	79.67%
Mar '25	50.62%	79.85%

Sumber: OJK

Grafik 10 Perkembangan Aset Bank Umum



Sumber: SPI Maret 2025

Tabel 3 Perkembangan Aset Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Mar '24	Des '24	Mar '25		Des '24	Mar '25	Mar '24	Mar '25
	BUMN	4,997,325	5,276,888		5,419,230	42.58%	3.57%	2.70%
BUSN	5,320,510	5,577,216	5,697,320	44.77%	2.27%	2.15%	6.63%	7.08%
BPD	972,941	1,021,878	1,004,350	7.89%	0.53%	-1.72%	5.92%	3.23%
KCBLN	585,052	584,973	605,920	4.76%	0.46%	3.58%	13.09%	3.57%
Total	11,875,828	12,460,955	12,726,820	100%	2.58%	2.13%	8.16%	7.17%

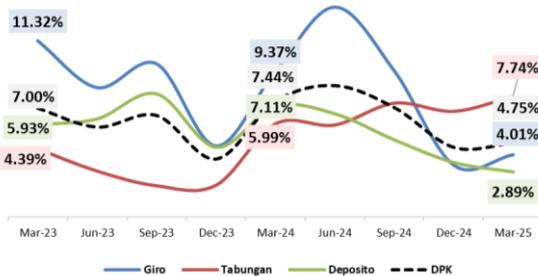
Sumber: SPI Maret 2025

1.2 Sumber Dana Bank Umum

Pada periode laporan, DPK Bank Umum tumbuh 4,75% (yoy), turun dibanding tahun sebelumnya sebesar 7,44% (yoy). Berdasarkan jenis usaha, DPK tercatat turun baik pada BUK maupun BUS. DPK BUK pada bulan laporan tumbuh 4,78% (yoy) dari 7,34% (yoy) pada Mar-24, atau meningkat Rp388,68T.

Perlambatan pertumbuhan DPK disebabkan oleh melambatnya komponen Giro dan Deposito. Giro (porsi 30,75%) tumbuh 4,01% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 9,37% (yoy). Sedangkan, deposito yang merupakan komponen terbesar DPK (porsi 37,04%) hanya tumbuh 2,89% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 7,11% (yoy). Di sisi lain, tabungan (porsi 32,21%) justru tumbuh meningkat 7,74% (yoy) dari tahun sebelumnya 5,99% (yoy). Namun demikian, pertumbuhan tabungan tersebut belum dapat mendorong ke atas pertumbuhan DPK secara umum.

Grafik 11 Tren Pertumbuhan DPK per Komponen

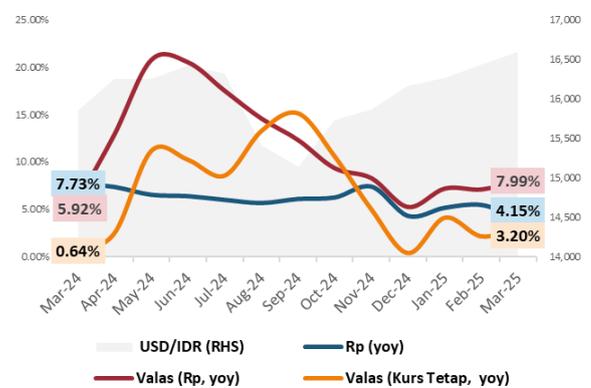


Sumber: SPI Maret 2025

Berdasarkan valuta, DPK Rupiah yang juga merupakan komponen dengan porsi terbesar (83,80%) tercatat tumbuh 4,15% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,73% (yoy). Sementara itu, DPK Valas tercatat tumbuh

7,99% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,92% (yoy). Jika menggunakan kurs tetap, DPK Valas tercatat juga tumbuh sebesar 3,20% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 0,64% (yoy). Hal tersebut menandakan bahwa secara umum pertumbuhan DPK Valas memang meningkat, disertai juga dengan kurs Rupiah yang terdepresiasi pada periode laporan.

Grafik 12 Pergerakan DPK Berdasarkan Valuta



Sumber: SPI Maret 2025

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK terdapat pada kelompok Bank BUSN sebesar 44,61%, diikuti BUMN sebesar 44,30%. DPK BUSN tumbuh menjadi 5,17% (yoy), sedikit melambat setelah tahun sebelumnya tumbuh 5,39% (yoy). Sementara itu, DPK BUMN tercatat tumbuh melambat 5,82% (yoy) dari 11,22% (yoy).

Secara spasial, penghimpunan DPK masih terpusat di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dengan total porsi 77,56%. Porsi terbesar berada di DKI Jakarta (53,16%) diikuti Jawa Timur (8,60%) dan Jawa Barat (7,67%). Besarnya penghimpunan DPK di wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang masih terpusat di Pulau Jawa.

Tabel 4 DPK Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan Bank

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq		yoy	
	Mar '24	Dec '24	Mar '25		Dec '24	Mar '25	Mar '24	Mar '25
BUMN	3,771,957	3,862,797	3,991,328	44.30	1.37%	3.33%	11.22%	5.82%
BUSN	3,822,025	3,973,849	4,019,735	44.61	2.50%	1.15%	5.39%	5.17%
BPD	752,332	752,685	746,676	8.29	-4.75%	-0.80%	3.63%	-0.75%
KCBLN	254,907	247,911	252,413	2.80	2.04%	1.82%	-2.52%	-0.98%
Total	8,601,220	8,837,242	9,010,153	100	1.34%	1.96%	7.44%	4.75%

Sumber: SPI Maret 2025

Tabel 5 Penyebaran DPK Bank Umum berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar

Wilayah	Nominal Rp(M)			% Pangsa terhadap total DPK
	Mar '24	Dec '24	Mar '25	
Daerah Khusus Jakarta	4,576,871	4,639,764	4,789,441	53.16%
Jawa Timur	752,817	771,767	774,432	8.60%
Jawa Barat	669,478	686,309	690,673	7.67%
Jawa Tengah	402,942	425,113	420,786	4.67%
Sumatera Utara	320,702	323,066	329,525	3.66%
Total DPK 5 Provinsi	6,722,810	6,846,020	7,004,857	77.74%
Total DPK	8,601,220	8,837,242	9,010,153	

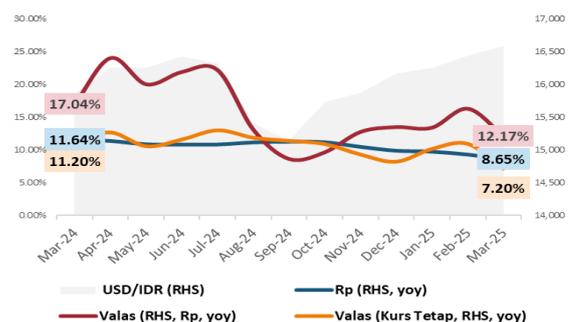
Sumber: SPI Maret 2025, diolah

1.3 Penggunaan Dana Bank Umum

Kredit Bank Umum tumbuh 10,85% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 8,96% (yoy). Jika dilihat per jenis usaha, kredit BUK tumbuh 10,77% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,66% (yoy). Sementara itu, pembiayaan BUS tumbuh 12,32% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 14,81% (yoy), meskipun dengan porsi relatif kecil (5,54%).

Berdasarkan valuta, kredit kepada pihak ketiga bukan bank didominasi dalam bentuk rupiah dengan porsi 86,03%, sedangkan kredit valas sebesar 13,97%. Secara umum, peningkatan pertumbuhan kredit didorong oleh pertumbuhan kredit rupiah yang tumbuh 11,23% (yoy) dari 9,92% (yoy) pada tahun sebelumnya. Selain itu, kredit valas juga tercatat tumbuh meningkat 8,59% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 3,54%

(yoy). Jika menggunakan kurs tetap, kredit valas juga tercatat meningkat tumbuh 11,37% (yoy) dari 1,68% (yoy) pada tahun sebelumnya (Grafik 18).

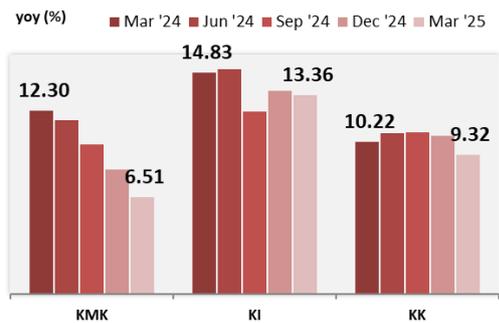
Grafik 13 Kredit per Valuta

Sumber: SPI Maret 2025

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit didominasi kredit produktif (72,53%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) dengan porsi sebesar 45,30% dan kredit investasi (KI) sebesar 27,23%, sedangkan kredit konsumsi (KK) sebesar 27,47%. Secara umum, kredit tumbuh pada seluruh jenis penggunaan.

Pertumbuhan kredit secara umum didorong oleh Kredit Produktif yang tercatat tumbuh 10,84% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 9,11% (yoy). Kredit konsumtif juga tumbuh 10,88% (yoy) dari 8,57% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Grafik 14 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: SPI Maret 2025

1.4 Rentabilitas Bank Umum

Pada Maret 2025, rentabilitas Bank Umum tercatat sedikit menurun ditandai dengan ROA yang turun 4 bps menjadi sebesar 2,58% dari 2,62% pada tahun sebelumnya. Penurunan ROA disebabkan oleh pertumbuhan total aset yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan laba sebelum pajak. Meskipun ROA secara umum mengalami penurunan, namun laba tumbuh 5,19% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 1,51% (yoy).

Dari sisi margin, NIM tercatat turun 8 bps menjadi sebesar 4,51% dari 4,59% pada tahun sebelumnya. Penurunan NIM seiring dengan pertumbuhan bunga bersih sebesar 4,30%, yoy (Mar-24: 3,49%), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan rata-rata *earning asset* sebesar 6,12% (yoy).

Selain itu, efisiensi Bank Umum juga tercatat menurun tecermin dari rasio BOPO perbankan yang meningkat 579 bps dari 80,05% menjadi 85,84%. Peningkatan BOPO

disebabkan oleh pertumbuhan beban operasional yang tumbuh tinggi 58,06% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pendapatan operasional yang sebenarnya juga tumbuh cukup tinggi 47,39% (yoy), sehingga secara umum membuat BOPO meningkat.

Selanjutnya, CIR tercatat 77,84% pada Maret 2025 naik dari 64,55% pada Maret 2024. Peningkatan CIR tersebut disebabkan oleh beban operasional selain beban bunga yang meningkat tinggi 75,96% (yoy) utamanya disebabkan oleh kerugian transaksi spot dan derivatif. Namun demikian, secara umum rasio CIR sebesar 77,84% mencerminkan tingkat efisiensi bank umum yang masih cukup baik.

1.5 Permodalan Bank Umum

Secara umum pada periode Maret 2025, kondisi permodalan perbankan masih cukup solid meskipun sedikit turun, yaitu tecermin dari nilai CAR sebesar 25,43% yang turun 53 bps dari tahun lalu sebesar 25,96%. Penurunan nilai CAR tersebut disebabkan oleh pertumbuhan modal yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ATMR, yang meskipun melambat masih tumbuh 9,11% (yoy).

Pertumbuhan ATMR masih didorong oleh pertumbuhan ATMR kredit yang meskipun melambat secara tahunan, namun masih tumbuh 9,61% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 10,74% (yoy), seiring dengan pertumbuhan kredit. Selain itu, ATMR pasar juga masih tumbuh tinggi 216,68% (yoy) dari 105,29% (yoy) yang dikarenakan pengaruh adanya penyesuaian perhitungan ATMR pada tahun 2024. Sementara itu, modal tumbuh 6,66% (yoy) cenderung melambat dari tahun lalu yang tumbuh 6,85% (yoy).

Tabel 6 Rasio Keuangan Bank Umum

Indikator	2024		2025		qtq		yoy	
	Mar	Dec	Mar	Dec'24	Mar'25	Mar '24	Mar'25	
CAR (%)	25.96	26.69	25.43	(15)	(126)	(113)	(53)	
BUK	25.98	26.76	25.44	(16)	(132)	(116)	(54)	
BUS	25.66	25.30	25.13	(6)	(17)	(35)	(53)	
ROA (%)	2.62	2.69	2.58	(4)	(11)	(15)	(4)	
BUK	2.65	2.72	2.61	(4)	(11)	(15)	(4)	
BUS	2.03	2.07	2.07	5	0	(15)	4	
NIM / NOM (%)	4.59	4.62	4.51	2	(11)	(18)	(8)	
BUK	4.68	4.72	4.60	2	(12)	(18)	(8)	
BUS	2.73	2.69	2.72	4	3	(18)	(1)	
BOPO (%)	80.05	81.30	85.84	259	454	69	579	
BUK	80.16	81.45	86.09	266	464	68	593	
BUS	76.89	76.43	76.36	(25)	(7)	111	(53)	
NPL / NPF Gross (%)	2.25	2.08	2.17	(13)	9	(24)	(8)	
BUK	2.27	2.08	2.17	(13)	9	(23)	(10)	
BUS	2.04	2.08	2.16	(6)	8	(34)	12	
NPL / NPF Net (%)	0.77	0.74	0.80	(4)	6	5	3	
BUK	0.78	0.74	0.80	(4)	6	5	2	
BUS	0.64	0.71	0.79	(6)	8	(1)	15	
LDR / FDR (%)	84.23	88.57	87.77	166	(80)	372	354	
BUK	84.52	89.05	87.95	190	(110)	373	343	
BUS	79.26	80.81	84.81	(209)	400	357	555	
AL/DPK (%)	27.18	25.59	26.22	19	63	(173)	(96)	
BUK	27.03	25.20	26.05	(9)	85	(219)	(98)	
BUS	29.76	32.09	29.05	485	(304)	621	(71)	
AL/NCD (%)	121.05	112.87	116.05	21	318	(782)	(500)	
BUK	119.86	110.53	114.84	(122)	431	(979)	(502)	
BUS	142.96	154.52	138.55	2519	(1597)	2,886	(441)	

Sumber: SPI Maret 2025

Tabel 7 Rasio Keuangan Bank Umum

Rasio	KBMI 1			KBMI 2		
	Mar '23	Dec '24	Mar '25	Mar '23	Dec '24	Mar '25
CAR	30.91%	31.45%	30.14%	36.14%	37.79%	37.03%
ROA	1.36%	0.92%	1.58%	2.20%	1.95%	1.93%
BOPO	89.08%	90.64%	87.78%	91.79%	93.81%	94.09%
NIM	4.69%	4.52%	4.77%	4.33%	4.34%	4.21%
Rasio	KBMI 3			KBMI 4		
	Mar '23	Dec '24	Mar '25	Mar '23	Dec '24	Mar '25
CAR	23.92%	24.97%	24.72%	20.97%	23.65%	21.71%
ROA	1.85%	1.74%	1.74%	3.73%	3.77%	3.39%
BOPO	79.68%	81.05%	82.36%	70.08%	71.48%	82.61%
NIM	3.83%	3.55%	3.53%	5.35%	5.24%	5.01%

Sumber: SPI Maret 2025

Tabel 8 Komponen ATMR Bank Umum

Komponen ATMR (Rp T)	Mar '24	Des '24	Mar '25	yoy	
				Mar '24	Mar '25
ATMR Kredit	6,202	6,639	6,798	10.74%	9.61%
ATMR Operasional	556	187	185	3.49%	-66.69%
ATMR Pasar	188	555	595	105.29%	216.68%
Total ATMR	6,938	7,372	7,570	11.49%	9.11%

Sumber: OJK

Overview Kinerja BPR dan BPRS

Fungsi intermediasi BPR dan BPRS secara umum masih dalam kondisi yang cukup baik tecermin dari kredit/pembiayaan dan DPK yang masih tumbuh meskipun melambat. Aset BPR dan BPRS tumbuh namun melambat sebesar 5,32% (yoy), seiring dengan perlambatan DPK BPR dan BPRS yang juga masih tumbuh 5,00% (yoy). Kredit/pembiayaan BPR dan BPRS juga masih tumbuh 6,29% (yoy), meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 9 Indikator Keuangan BPR dan BPRS

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Mar '24	Des '24	Mar'25	Des '24	Mar-25	Mar '24	Mar'25
Total Aset (Rp Miliar)	216,737	229,665	228,262	2.50%	-0.61%	7.34%	5.32%
BPR	193,992	204,633	203,684	2.23%	-0.46%	6.82%	5.00%
BPRS	22,745	25,032	24,577	4.70%	-1.82%	12.00%	8.06%
Kredit/Pembiayaan (Rp milyar)	161,905	167,881	172,083	1.54%	2.50%	9.42%	6.29%
BPR	144,210	148,895	152,649	1.41%	2.52%	8.73%	5.85%
BPRS	17,696	18,986	19,434	2.51%	2.36%	15.32%	9.82%
DPK (Rp Miliar)	152,781	160,633	160,417	1.56%	-0.13%	8.60%	5.00%
BPR	137,662	143,789	143,785	1.18%	0.00%	8.32%	4.45%
BPRS	15,119	16,844	16,632	4.93%	-1.26%	11.22%	10.01%
Tabungan	45,220	50,342	47,790	4.37%	-5.07%	6.32%	5.68%
BPR	40,690	45,045	42,962	3.82%	-4.62%	5.95%	5.58%
BPRS	4,530	5,297	4,827	9.21%	-8.86%	9.80%	6.57%
Deposito	107,561	110,291	112,628	0.33%	2.12%	9.59%	4.71%
BPR	96,971	98,743	100,823	0.02%	2.11%	9.35%	3.97%
BPRS	10,590	11,548	11,805	3.07%	2.23%	11.84%	11.48%

Sumber: OJK

2. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Pada periode Maret 2025, kinerja BPR masih menunjukkan kondisi yang cukup solid. DPK tetap mampu tumbuh sejalan dengan penyaluran kredit yang mencatatkan pertumbuhan walaupun mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang masih tinggi di atas *threshold* meskipun menurun

dibanding tahun lalu. Selain itu, kinerja BPR yang membaik juga sejalan dengan adanya peningkatan laba dan efisiensi dibandingkan tahun sebelumnya, namun di sisi lain perlu diperhatikan terdapatnya peningkatan risiko kredit pada periode laporan yang ditunjukkan dari NPL gross yang masih cukup tinggi dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 10 Indikator Umum BPR

Indikator	Nominal			qtq		yoy	
	Mar'24	Des'24	Mar'25	Des'24	Mar '25	Des'24	Mar '25
Jumlah BPR	1,392	1,356	1,345	(21)	(11)	(46)	(47)
Total Aset (Rp milyar)	193,992	204,633	203,684	2.23%	-0.46%	4.95%	5.00%
Kredit (Rp milyar)	144,210	148,895	152,649	1.41%	2.52%	5.76%	5.85%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	137,662	143,789	143,785	1.18%	0.00%	4.26%	4.45%
- Tabungan (Rp milyar)	40,690	45,045	42,962	3.82%	-4.62%	5.70%	5.58%
- Deposito (Rp milyar)	96,971	98,743	100,823	0.02%	2.11%	3.62%	3.97%
CAR (%)	32.60	31.20	31.49	15	29	122	(111)
ROA (%)	0.89	1.44	1.40	20	(4)	44	51
BOPO (%)	91.35	86.15	89.16	(197)	301	(322)	(219)
NPL Gross (%)	10.70	10.99	11.90	(73)	91	112	120
NPL Net (%)	7.33	8.01	8.29	(40)	28	150	96
LDR (%)	77.37	77.28	79.29	4	201	72	192
CR (%)	12.45	14.25	12.44	79	(181)	60	(1)

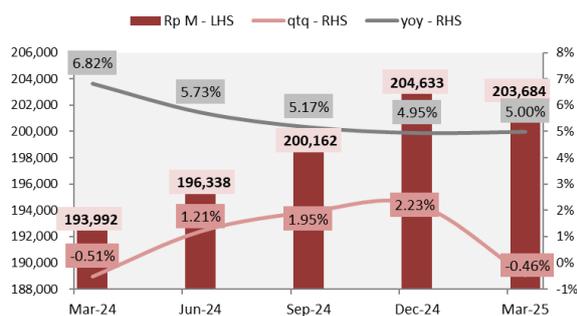
Sumber: SPI, Maret 2025

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

2.1 Aset BPR

Aset BPR pada Maret 2025 tumbuh 5,00% (yoy), cenderung melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,82% (yoy). Perlambatan pertumbuhan aset tersebut sejalan dengan DPK yang juga tumbuh melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 15 Perkembangan Aset BPR



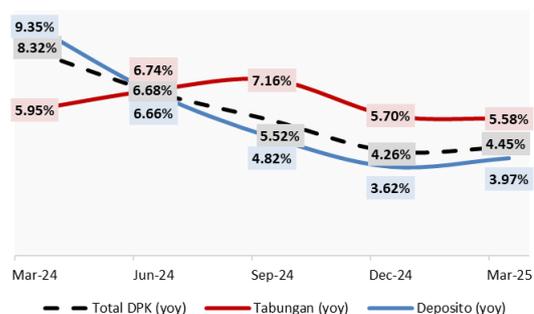
Sumber: SPI, Maret 2025

2.2 Sumber Dana BPR

DPK BPR pada Maret 2025 tumbuh 4,45% (yoy) menjadi Rp143,78 triliun, melambat dibandingkan dengan Maret 2024 yang tercatat tumbuh 8,32% (yoy). Perlambatan DPK tersebut didorong oleh komponen

deposito yang tercatat tumbuh sebesar 3,97% (yoy) turun dari periode tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 9,35% (yoy). Sejalan dengan deposito, komponen tabungan juga menunjukkan perlambatan dengan mencatatkan pertumbuhan 5,58% (yoy) lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,95% (yoy).

Grafik 16 Perkembangan DPK BPR



Sumber: SPI Maret 2025

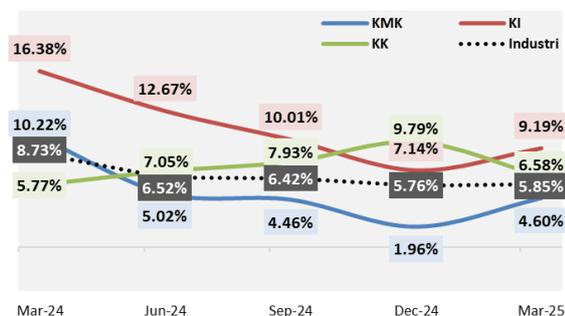
2.3 Penggunaan Dana BPR

Kredit BPR pada Maret 2025 tumbuh 5,85% (yoy), melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,73% (yoy). Ditinjau dari jenis penggunaan, mayoritas kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (56,53%) yang terdiri dari KMK (47,67%) dan

KI (8,85%) sedangkan sisanya untuk KK (43,47%).

Kredit BPR tumbuh berdasarkan semua jenis penggunaan. KI tumbuh 9,19% (yoy), mengalami perlambatan dari 16,38% (yoy), dan untuk KMK tercatat tumbuh 4,60% (yoy), lebih rendah dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 10,22% (yoy). Sementara di sisi lain, kredit konsumtif tumbuh positif sebesar 6,58% (yoy) melampaui pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu 5,77% (yoy).

Grafik 17 Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: SPI, Maret 2025

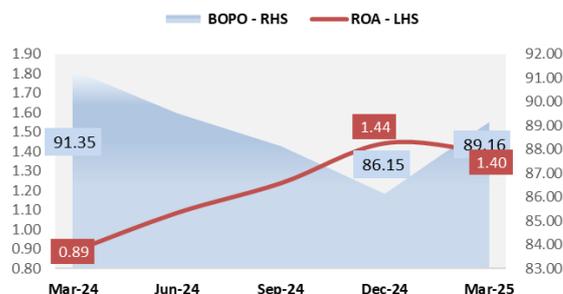
2.4 Rentabilitas BPR

Rentabilitas BPR pada Maret 2025 naik dibandingkan tahun sebelumnya, tecermin dari rasio ROA sebesar 1,40% atau naik 51 bps dibandingkan tahun sebelumnya (0,89%).

Seiring dengan peningkatan rentabilitas, efisiensi BPR juga tercatat meningkat, tecermin dari turunnya rasio BOPO sebesar 219 bps menjadi 89,16% dari 91,35% pada

tahun sebelumnya. Penurunan rasio BOPO disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan operasional sebesar 23,67% (yoy) dan melampaui pertumbuhan beban operasional sebesar 20,71% (yoy).

Grafik 18 Tren ROA dan BOPO BPR



Seiring dengan peningkatan rentabilitas, efisiensi BPR juga tercatat meningkat, tecermin dari turunnya rasio BOPO sebesar 219 bps menjadi 89,16% dari 91,35% pada tahun sebelumnya. Penurunan rasio BOPO disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan operasional sebesar 23,67% (yoy) dan melampaui pertumbuhan beban operasional sebesar 20,71% (yoy).

2.5 Permodalan BPR

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari indikator CAR BPR yang tinggi sebesar 31,49% jauh di atas KPMM, meskipun menurun 111 bps dari tahun sebelumnya yang tercatat 32,60%. Penurunan CAR didorong oleh pertumbuhan ATMR yang melampaui pertumbuhan dari modal.

3. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)

Kinerja BPRS pada Maret 2025 masih tetap terjaga dengan baik tecermin dari aset, DPK, dan pembiayaan BPRS yang tetap tumbuh walaupun melambat dibanding tahun sebelumnya, yaitu masing-masing sebesar 8,06% (yoy), 10,01% (yoy), dan 9,82% (yoy). Selain itu, perlu diperhatikan risiko pembiayaan BPRS tercatat meningkat tecermin dari adanya peningkatan rasio NPF *gross* pada periode laporan. Ketahanan BPRS juga masih terjaga yang tecermin pada

permodalan yang masih cukup baik, di tengah rentabilitas dan efisiensi BPRS juga tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 11 Indikator Umum BPRS

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Mar '24	Des '24	Mar '25	Des '24	Mar '25	Mar '24	Mar '25
Total Aset (Rp Miliar)	22,745	25,032	24,577	4.70%	-1.82%	12.00%	8.06%
Pembiayaan (Rp Miliar)	17,696	18,986	19,434	2.51%	2.36%	15.32%	9.82%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	15,119	16,844	16,632	4.93%	-1.26%	11.22%	10.01%
- Tabungan iB (Rp Miliar)	4,530	5,297	4,827	9.21%	-8.86%	9.80%	6.57%
- Deposito iB (Rp Miliar)	10,590	11,548	11,805	3.07%	2.23%	11.84%	11.48%
CAR (%)	23.57	23.78	24.47	126	69	79	90
ROA (%)	1.63	1.51	1.86	12	35	(7)	23
BOPO (%)	93.82	90.61	93.43	(109)	282	813	(39)
NPF Gross (%)	7.44	7.75	8.83	(128)	108	32	139
FDR (%)	117.04	112.73	116.85	(263)	412	416	(19)

Sumber: SPS Maret 2025

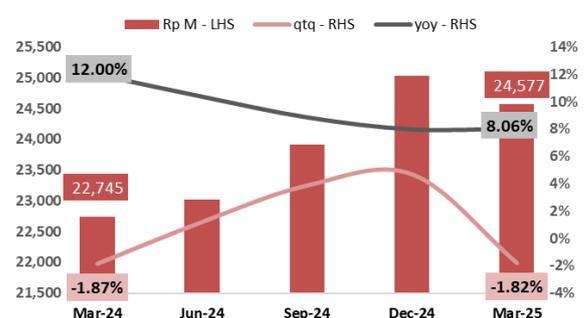
Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

3.1 Aset BPRS

Pada Maret 2025, aset BPRS tercatat sebesar Rp24,58 triliun atau tumbuh 8,06% (yoy), melambat dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,00% (yoy).

Sebagian besar BPRS memiliki total aset >Rp10 Miliar (167 BPRS dari 174 BPRS). Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya di mana jumlah BPRS dengan total aset pada kelompok ini sebanyak 166 BPRS.

Grafik 19 Tren Aset BPRS



Sumber: SPS Maret 2025

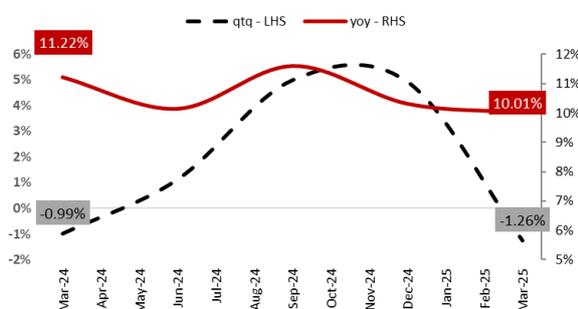
3.2 Sumber Dana BPRS

Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK sebesar Rp16,63 triliun. Pada Maret 2025, DPK BPRS tumbuh 10,01% (yoy), melambat

dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,22% (yoy).

Berdasarkan komposisi, porsi DPK BPRS terbesar berada pada deposito iB dengan porsi 70,98%. Secara keseluruhan deposito iB BPRS masih tercatat tumbuh stabil 11,48% (yoy), hanya sedikit melambat dibandingkan dengan tahun lalu yang tumbuh 11,84% (yoy). Tingkat bagi hasil deposito iB BPRS tercatat memiliki pergerakan yang bervariasi. Namun pergerakan terbesar berada pada bagi hasil untuk tenor >12 bulan yang meningkat menjadi 28,47% dari tahun sebelumnya sebesar 16,84%. Di sisi lain, tabungan iB BPRS justru tumbuh 6,57% (yoy), melambat dari tahun lalu yang tumbuh 9,80% (yoy), seiring dengan tingkat bagi hasil tabungan iB yang juga tercatat turun 16 bps dari tahun lalu menjadi 1,51%.

Grafik 20 Tren Pertumbuhan DPK BPRS



Sumber: SPS Maret 2025

3.3 Penggunaan Dana BPRS

Pada Maret 2025, pembiayaan BPRS mencapai Rp19,43 triliun, tumbuh sebesar 9,82% (yoy) melambat dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tumbuh 15,32% (yoy).

Pembiayaan BPRS utamanya masih disalurkan dalam bentuk piutang murabahah

(54,95%) dan pembiayaan musyarakah (27,26%).

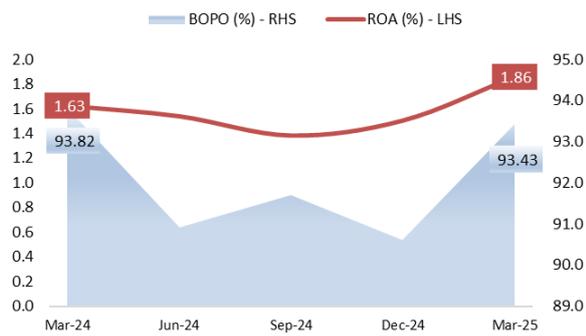
Berdasarkan sektor ekonomi, pembiayaan BPRS mayoritas disalurkan ke sektor konstruksi (18,08%) dan perdagangan (11,90%). Pembiayaan ke sektor konstruksi tercatat tumbuh 24,55% (yoy), meskipun masih tumbuh tinggi namun melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh mencapai 53,12% (yoy). Sementara itu, sektor perdagangan justru berkontraksi -2,65% (yoy), meskipun tahun sebelumnya berkontraksi lebih dalam -7,27% (yoy).

Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan BPRS didominasi pembiayaan produktif sebesar 60,05% di mana pembiayaan modal kerja (porsi 50,13%) masih tumbuh cukup tinggi 15,69% (yoy), meski melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang dapat tumbuh 20,72% (yoy). Di sisi lain, pembiayaan investasi tercatat mengalami kontraksi sebesar -1,98% (yoy) dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 4,46% (yoy). Pembiayaan konsumtif juga tumbuh melambat 6,24% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh *double digit* 12,66% (yoy).

3.4 Rentabilitas BPRS

Pada periode laporan, rentabilitas BPRS mengalami peningkatan yang tecermin dari rasio ROA naik 23 bps menjadi 1,86% dari 1,63% pada tahun sebelumnya yang seiring dengan laba BPRS yang tumbuh 2,31% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi dalam -46,21% (yoy). Peningkatan rentabilitas sejalan dengan perbaikan efisiensi BPRS tecermin dari rasio BOPO yang turun 39 bps menjadi 93,43%, turun dari tahun sebelumnya sebesar 93,82%.

Grafik 21 Tren ROA dan BOPO BPRS



Sumber: SPS Maret 2025

3.5 Permodalan BPRS

Permodalan BPRS masih cukup solid dengan CAR sebesar 24,47%, naik 90 bps dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 23,57%. Peningkatan CAR didorong oleh pertumbuhan modal BPRS yang lebih besar dari pertumbuhan ATMR BPRS. CAR BPRS tersebut masih cukup tinggi untuk dapat menyerap potensi risiko yang dihadapi BPRS, atau masih jauh di atas *threshold*.

3 Penyaluran Kredit/Pembiayaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

3 Kredit/Pembiayaan Perbankan

Pada triwulan I-2025, perkembangan kredit/pembiayaan perbankan (Bank Umum) masih cukup baik didorong oleh aktivitas usaha yang masih berada pada level ekspansif dan konsumsi rumah tangga utamanya golongan menengah atas yang tumbuh solid. Dilihat dari kenaikan nominal kredit secara tahunan, kredit/pembiayaan Bank Umum pada periode ini utamanya didorong oleh sektor industri pengolahan, perantara keuangan, pertambangan, serta rumah tangga – kepemilikan rumah tinggal. Sementara pada BPR dan BPRS kredit/pembiayaan mengalami perlambatan utamanya pada sektor perdagangan, restoran, dan hotel namun sektor *real estate* tumbuh relatif tinggi menahan perlambatan yang semakin dalam.

A. Kredit/Pembiayaan Bank Umum (BUK dan BUS)

1. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi

Penyaluran kredit/pembiayaan Bank Umum (selanjutnya disebut kredit) pada triwulan I-2025 masih tumbuh baik sebesar 9,16% (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 12,40% (yoy). Secara triwulanan, kredit tumbuh 1,04% (qtq), meskipun juga melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,27% (qtq). Pertumbuhan kredit secara tahunan utamanya didorong oleh meningkatnya penyaluran kredit kepada debitur korporasi.

Porsi terbesar penyaluran kredit bank umum masih kepada non-lapangan usaha sektor rumah tangga (porsi: 23,63%). Penyaluran kredit pada sektor ini tumbuh 9,49% (yoy), meskipun melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 10,35% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh sub sektor rumah tangga keperluan rumah tangga lainnya yang tumbuh 9,90% meningkat dari 6,18% (yoy) pada tahun sebelumnya. Selanjutnya sektor rumah

tangga juga didorong oleh sub sektor rumah tangga untuk kepemilikan rumah tinggal tipe 22 s.d. 70 yang tumbuh 16,39% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 3,72% (yoy). Kredit kepemilikan rumah tangga untuk kepemilikan rumah tinggal s.d. tipe 21 tumbuh 82,40% (yoy) setelah sebelumnya berkontraksi sebesar -48,63% (yoy) pada Maret 2024. Sementara itu, kredit rumah tinggal tipe di atas 70 juga tercatat tumbuh 11,77% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 23,18% (yoy). Selain itu, pertumbuhan sektor rumah tangga juga didorong oleh subsektor rumah tangga untuk kepemilikan apartemen yang tumbuh 8,07% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 6,02% (yoy).

Di sisi lain, kredit untuk kepemilikan kendaraan bermotor tumbuh 6,03% (yoy) melambat dari 12,74% (yoy) pada Maret 2024. Selanjutnya, kredit untuk kepemilikan ruko atau rukan berkontraksi cukup dalam sebesar -58,23% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh

tinggi hingga 238,08% pada Maret 2024. Hal ini ikut menarik ke bawah pertumbuhan kredit konsumtif pada Maret 2025.

Sementara itu untuk kredit produktif, sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit terbesar adalah sektor industri pengolahan (porsi 15,52%). Kredit pada sektor ini tumbuh 8,79% (yoy), melambat setelah tahun sebelumnya tumbuh 9,13% (yoy). Melambatnya pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh subsektor industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya yang tercatat tumbuh 18,07% (yoy) melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 21,17% (yoy), didorong oleh subsektor industri bubur kertas (*pulp*), kertas dan karton/*paper board*.

Sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit kedua terbesar adalah sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 15,14%) yang juga tercatat tumbuh melambat dan ikut mendorong ke bawah pertumbuhan kredit produktif. Pertumbuhan penyaluran kredit ke sektor ini tumbuh 2,64% (yoy), menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,88% (yoy). Pertumbuhan sektor ini didorong di antaranya oleh subsektor perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau yang tumbuh 21,15% (yoy) menurun setelah tahun sebelumnya tumbuh hingga 36,58% (yoy), didorong oleh perlambatan perdagangan dalam negeri beras yang tumbuh 22,06% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi 109,21% (yoy). Selain itu, subsektor lainnya yang mendorong perlambatan dari sektor perdagangan besar dan eceran yaitu perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenis yang berkontraksi -10,22% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh mencapai 93,20% (yoy).

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 6,71% dari total penyaluran kredit perbankan. Kredit ke sektor ini tumbuh 5,28% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 9,04% (yoy). Perlambatan kredit pada sektor ini didorong oleh subsektor pertanian dan perburuan, utamanya pada subsektor perkebunan kelapa sawit yang tumbuh 6,74% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 10,07% (yoy) serta subsektor perkebunan tebu dan tanaman pemanis lainnya yang tumbuh 6,78% (yoy) melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 19,65% (yoy).

Penyaluran kredit ke sektor perantara keuangan juga memiliki porsi yang cukup besar (5,68%). Sektor ini juga tercatat tumbuh lebih rendah pada periode laporan, yaitu 9,41% (yoy) menurun dari tahun sebelumnya yang mampu tumbuh hingga 29,01% (yoy). Melambatnya pertumbuhan di sektor ini didorong oleh subsektor perantara keuangan lainnya (nonbank) yang tumbuh 8,92% (yoy) menurun setelah tahun sebelumnya tumbuh sebesar 34,03% (yoy).

Sektor ekonomi transportasi, pergudangan dan komunikasi (porsi 5,59%) juga tercatat tumbuh melambat yaitu sebesar 14,20% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya 27,76% (yoy). Melambatnya pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh subsektor pos dan telekomunikasi yang tumbuh 8,85% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 18,55% (yoy).

Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian dengan porsi 4,88% juga tumbuh melambat sehingga turut mendorong ke bawah pertumbuhan kredit secara keseluruhan. Sektor ini tumbuh 25,47% (yoy),

lebih rendah dari pertumbuhan pada tahun lalu yang tumbuh 29,77% (yoy). Adapun subsektor yang mendorong perlambatan pertumbuhan kredit pada sektor pertambangan dan penggalian antara lain subsektor pertambangan batubara,

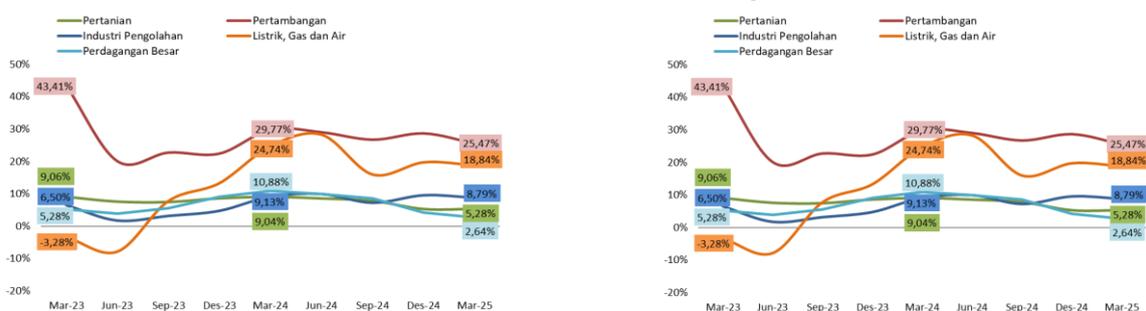
penggalian gambut, gasifikasi batubara, dan pembuatan briket batubara yang meskipun tumbuh tinggi sebesar 37,15% (yoy) namun masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh mencapai 53,52% (yoy).

Tabel 12 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi

No.	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)			yoy		Porsi		
		Mar '24	Des '24	Mar'25	Des '24	Mar '25			
Lapangan Usaha/Sektor Produktif		5.263,79	5.692,83	5.742,88	3,55%	0,88%	13,24%	9,10%	72,62%
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	504,08	523,78	530,68	1,13%	1,32%	9,04%	5,28%	6,71%
2	Perikanan	20,73	19,78	19,47	-3,01%	-1,57%	5,88%	-6,07%	0,25%
3	Pertambangan dan Penggalian	307,84	373,51	386,25	9,22%	3,41%	29,77%	25,47%	4,88%
4	Industri Pengolahan	1.128,54	1.224,14	1.227,75	5,67%	0,30%	9,13%	8,79%	15,52%
5	Listrik, Gas, dan Air	188,93	220,29	224,52	9,73%	1,92%	24,74%	18,84%	2,84%
6	Konstruksi	390,06	395,18	389,94	-1,88%	-1,33%	-3,33%	-0,03%	4,93%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	1.166,72	1.186,85	1.197,55	-1,20%	0,90%	10,88%	2,64%	15,14%
8	Penyediaan Akomodasi dan PMM	129,88	137,35	137,55	0,84%	0,14%	5,86%	5,90%	1,74%
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	387,44	444,98	442,43	6,85%	-0,57%	27,76%	14,20%	5,59%
10	Perantara Keuangan	410,52	448,98	449,14	4,69%	0,04%	29,01%	9,41%	5,68%
11	Real Estate	354,26	376,16	380,51	2,18%	1,16%	11,10%	7,41%	4,81%
12	Administrasi Pemerintahan	66,28	96,69	98,32	23,55%	1,68%	54,87%	48,33%	1,24%
13	Jasa Pendidikan	17,12	17,91	18,28	2,65%	2,03%	14,99%	6,77%	0,23%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	37,98	46,67	47,27	14,37%	1,28%	17,56%	24,46%	0,60%
15	Jasa Kemasyarakatan	149,49	176,91	189,62	7,95%	7,19%	14,16%	26,85%	2,40%
16	Jasa Perorangan	3,89	3,63	3,58	-3,52%	-1,40%	-1,95%	-7,96%	0,05%
17	Badan Internasional	0,02	0,01	0,01	-95,79%	-4,60%	-31,77%	-37,95%	0,00%
Bukan Lapangan Usaha/Sektor Konsumtif		1.980,84	2.138,73	2.165,54	2,74%	1,25%	10,22%	9,32%	27,38%
18	Rumah Tangga	1.706,56	1.836,89	1.868,54	2,63%	1,72%	10,35%	9,49%	23,63%
	- Pemilikan Rumah Tinggal	637,90	723,58	741,95	2,04%	2,54%	6,87%	16,31%	9,38%
	- Pemilikan Flat atau Apartemen	29,63	31,47	32,02	2,10%	1,76%	6,02%	8,07%	0,40%
	- Pemilikan Ruko atau Rukan	70,11	28,90	29,29	1,28%	1,34%	238,08%	-58,23%	0,37%
	- Pemilikan Kendaraan Bermotor	134,79	142,09	142,92	3,11%	0,58%	12,74%	6,03%	1,81%
	- Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya	16,35	22,20	23,63	11,56%	6,43%	46,01%	44,54%	0,30%
	- Keperluan Rumah Tangga Lainnya	817,77	888,65	898,72	2,90%	1,13%	6,18%	9,90%	11,36%
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	274,28	301,83	297,01	3,40%	-1,60%	9,45%	8,29%	3,76%
Total		7.244,64	7.831,56	7.908,42	3,33%	0,98%	12,40%	9,16%	100,00%

Sumber: SPI Maret 2025

Grafik 22 Tren Pertumbuhan Kredit Produktif per Sektor Ekonomi



Sumber: SPI Maret 2025, diolah

2. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Lokasi Proyek (Spasial)

Pada Maret 2025, distribusi penyaluran kredit/pembiayaan (selanjutnya disebut kredit) Bank Umum berdasarkan wilayah penyebaran (spasial) masih didominasi oleh Jawa dan Sumatera dengan porsi masing-masing sebesar 68,41% dan 13,63%. Penyaluran kredit di wilayah Jawa masih tumbuh positif sebesar 8,95% (yoy) meskipun lebih rendah dari 13,56% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, penyaluran kredit di wilayah Sumatera tumbuh meningkat dari 7,38% (yoy) menjadi 9,68% (yoy) pada Maret 2025.

Pada wilayah Jawa, pertumbuhan kredit yang melambat utamanya dikontribusikan oleh Provinsi Daerah Khusus Jakarta (porsi: 48,77% terhadap total kredit yang disalurkan di wilayah Jawa). Penyaluran kredit di Provinsi DKI Jakarta tumbuh 12,66% (yoy) pada Maret 2025 atau lebih rendah dibandingkan bulan yang sama tahun lalu sebesar 18,96% (yoy). Kredit yang tumbuh melambat pada provinsi tersebut utamanya dipengaruhi oleh sektor konstruksi. Nominal kredit yang disalurkan pada sektor konstruksi turun sebesar Rp15,94 triliun dari Rp172,57 triliun pada Maret 2024 menjadi Rp156,63 triliun pada Maret 2025. Hal ini menyebabkan pertumbuhan kredit sektor konstruksi yang sebelumnya tercatat -6,13% (yoy) pada Maret 2024 menjadi terkontraksi lebih dalam hingga -9,24% (yoy) pada Maret 2025. Tidak hanya itu, kredit pada sektor perikanan juga turun sebesar Rp375,6 miliar atau terkontraksi -20,85% (yoy) dari Rp1,80 triliun pada Maret 2024 menjadi Rp1,43 triliun pada Maret 2025. Provinsi selanjutnya yang mencatatkan penurunan kredit terbesar yaitu Jawa Barat (porsi: 18,65% terhadap total kredit yang disalurkan di wilayah Jawa).

Penyaluran kredit di Provinsi Jawa Barat tumbuh melambat dari 11,61% (yoy) pada Maret 2024 menjadi 7,26% (yoy) pada Maret 2025. Penurunan nominal kredit terbesar utamanya pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp3,31 triliun atau terkontraksi -14,34% (yoy) pada Maret 2025 dari yang sebelumnya tumbuh tinggi sebesar 196,22% (yoy) pada Maret 2024. Serupa dengan hal tersebut, sektor pertanian juga terkontraksi cukup dalam dari 88,09% (yoy) pada Maret 2024 menjadi -5,15% (yoy) pada Maret 2025 atau secara nominal turun sebesar Rp1,53 triliun.

Pada wilayah Sumatera, pertumbuhan kredit yang meningkat utamanya dikontribusikan oleh Provinsi Sumatera Utara yang mendominasi porsi kredit di Sumatera dengan porsi sebesar 27,72%. Pada Maret 2025, nominal kredit yang disalurkan di Provinsi Sumatera Utara meningkat sebesar Rp36,19 triliun atau tumbuh cukup signifikan dari 5,06% (yoy) menjadi 13,79% (yoy). Kenaikan nominal penyaluran kredit terbesar utamanya terdapat pada sektor industri pengolahan sebesar Rp13,18 triliun atau tumbuh tinggi hingga 22,60% (yoy) pada Maret 2025 dari 2,41% (yoy) pada periode yang sama tahun lalu. Selain itu, sektor pertanian juga mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi dari yang sebelumnya terkontraksi -4,62% (yoy) menjadi 18,58% (yoy) karena didorong kenaikan nominal kredit sebesar Rp8,16 triliun. Provinsi selanjutnya yang mencatatkan kenaikan kredit terbesar yaitu Kepulauan Riau (porsi: 7,83% terhadap total kredit yang disalurkan di wilayah Sumatera). Pertumbuhan kredit di Provinsi Kepulauan Riau tumbuh tinggi dari 8,91% (yoy) pada Maret 2024 menjadi

17,81% (yoy) pada Maret 2025 karena didorong oleh kenaikan nominal kredit sebesar Rp12,75 triliun. Sektor dengan peningkatan kredit terbesar adalah listrik, gas, dan air mencapai Rp3,74 triliun sehingga tumbuh tinggi hingga 73,45% (yoy) pada Maret 2025 dari 4,07% (yoy) pada Maret 2024. Di samping itu, sektor industri pengolahan juga mencatatkan kenaikan nominal kredit sebesar Rp2,47 triliun sehingga tumbuh lebih tinggi dari 21,34% (yoy) menjadi 23,05% (yoy).

Selain Sumatera, penyaluran kredit di wilayah Papua dan Maluku (porsi: 1,25% terhadap total kredit yang disalurkan secara nasional) juga tercatat tumbuh meningkat dari 7,38% (yoy) pada Maret 2024 menjadi 14,68% (yoy) pada Maret 2025. Pada wilayah ini, pertumbuhan kredit yang meningkat utamanya dikontribusikan oleh Provinsi Maluku Utara (porsi: 34,25% terhadap total kredit yang disalurkan di wilayah Papua dan Maluku). Provinsi Maluku Utara mencatatkan kenaikan nominal kredit sebesar Rp8,84 triliun atau tumbuh meningkat dari 7,79% (yoy) pada Maret 2024 menjadi 35,24% (yoy) pada Maret 2025. Sektor pertambangan dan penggalan mencatatkan kenaikan nominal kredit terbesar hingga Rp3,33 triliun sehingga semakin tumbuh tinggi dari 41,34% (yoy) pada Maret 2024 menjadi 99,82% (yoy) pada Maret 2025. Kenaikan nominal kredit terbesar berikutnya diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar Rp1,76 triliun yang tumbuh meningkat dari 7,98% (yoy) menjadi 27,55% (yoy). Kenaikan pertumbuhan kredit juga terjadi pada Provinsi Papua yang mendominasi penyaluran kredit di wilayah ini dengan porsi 47,04%. Pertumbuhan kredit di Provinsi Papua meningkat dari 8,78% (yoy) pada

Maret 2024 menjadi 11,45% (yoy) pada Maret 2025 seiring dengan kenaikan nominal kredit sebesar Rp4,79 triliun. Sektor yang mencatatkan pertumbuhan kredit tertinggi pada periode laporan adalah pertambangan dan penggalan yaitu dari yang sebelumnya terkontraksi -67,20% (yoy) menjadi tumbuh sangat signifikan hingga 17.998,12% (yoy). Hal tersebut terjadi karena nominal kredit sektor pertambangan dan penggalan meningkat drastis dari Rp15,73 miliar pada Maret 2024 menjadi Rp2,85 triliun pada Maret 2025. Perkembangan tersebut didorong oleh pertambangan bijih tembaga. Ekspansi kredit perbankan untuk jenis usaha tersebut ditengarai sebagai bentuk dukungan dalam penyelesaian pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk menggenjot ekspor konsentrat tembaga yang sedang digencarkan hingga September 2025.

Di sisi lain, terdapat tiga wilayah selain Pulau Jawa yang mencatatkan pertumbuhan kredit melambat pada Maret 2025 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertama, wilayah Kalimantan (porsi: 6,22% terhadap total kredit yang disalurkan secara nasional). Di wilayah Kalimantan kredit tumbuh melambat dari 8,77% (yoy) pada Maret 2024 menjadi 5,74% (yoy) pada Maret 2025. Penyaluran kredit di wilayah ini sebagian besar disalurkan di Provinsi Kalimantan Timur (porsi: 42,82% terhadap total kredit yang disalurkan di wilayah Kalimantan) yang tumbuh 5,19% (yoy) lebih rendah dari Maret 2024 yaitu 10,58% (yoy). Perlambatan kredit di Kalimantan Timur utamanya pada sektor pertambangan dan penggalan yang turun Rp3 triliun, sehingga terkontraksi -7,43% (yoy) pada Maret 2025 dari 23,59% (yoy) pada Maret 2024. Penurunan tersebut

utamanya dipengaruhi oleh pertambangan batubara, penggalan gambut, dan gasifikasi batubara. Di samping itu, sektor konstruksi juga mencatatkan pertumbuhan yang berkontraksi -7,99% (yoy) pada Maret 2025 dari 4,39% (yoy) pada Maret tahun lalu seiring dengan penurunan nominal kredit yang disalurkan sebesar Rp1,04 triliun. Penurunan kredit terbesar utamanya dipengaruhi oleh konstruksi gedung lainnya seiring dengan progress pembangunan berbagai proyek infrastruktur di Penajam Paser Utara yang sudah berada pada tahap akhir menuju penyelesaian. Provinsi lainnya yang berkontribusi pada penurunan kredit di wilayah Kalimantan adalah Kalimantan Tengah (porsi: 16,40% terhadap total kredit yang disalurkan di wilayah Kalimantan). Sektor utama yang mencatatkan penurunan kredit terbesar yaitu pertanian dari 13,86% (yoy) pada Maret 2024 menjadi berkontraksi -4,72% (yoy) pada Maret 2025 seiring nominal kredit yang turun Rp1,53 triliun.

Kedua, wilayah Sulawesi (porsi: 5,31% terhadap total kredit yang disalurkan secara nasional) juga tercatat tumbuh melambat dari 9,99% (yoy) pada Maret 2024 menjadi 8,91% (yoy) pada Maret 2025. Pertumbuhan kredit yang melambat utamanya dikontribusikan oleh Provinsi Sulawesi Selatan yang mendominasi penyaluran kredit di wilayah Sulawesi dengan porsi sebesar 42,25%. Penyaluran kredit di Provinsi Sulawesi Selatan tumbuh melambat dari 9,85% (yoy) pada Maret 2024 menjadi 3,61% (yoy) pada Maret 2025. Secara nominal penyaluran kredit, penurunan terbesar terdapat pada sektor industri pengolahan sebesar Rp1,38 triliun atau turun signifikan dari 11,91% (yoy) pada Maret 2024 menjadi -15,36% (yoy) pada Maret 2025.

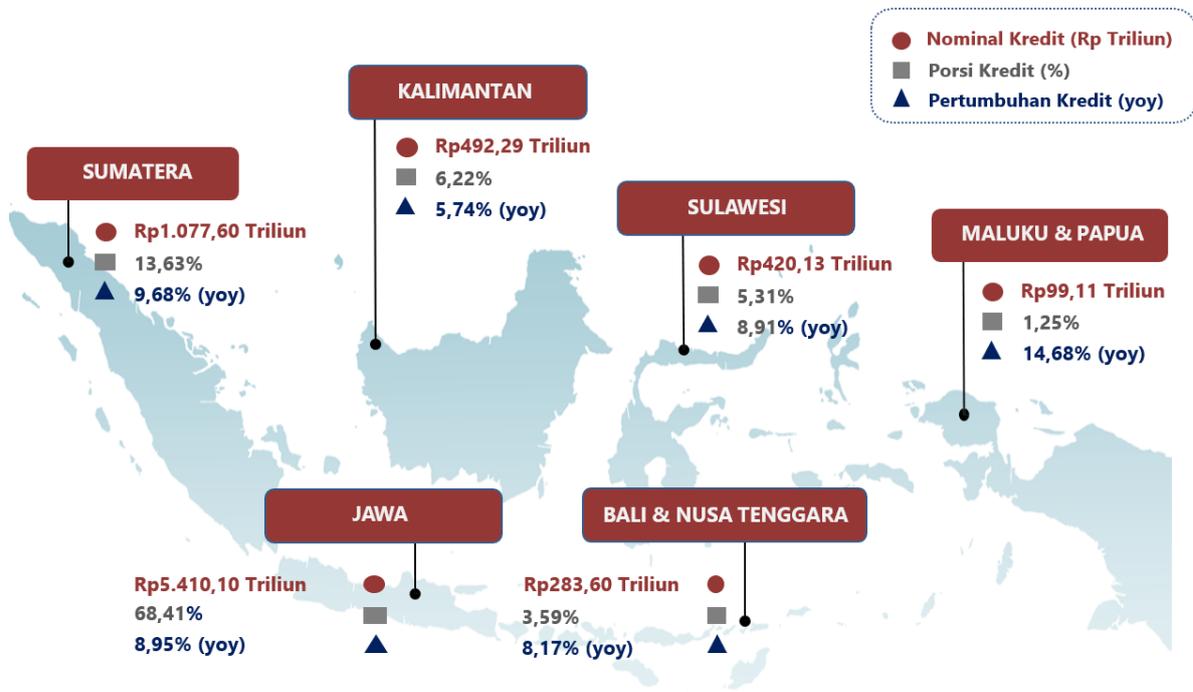
Selain itu, penurunan nominal kredit terbesar diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp951,01 miliar atau menjadi berkontraksi -2,35% (yoy) pada Maret 2025 dari periode yang sama tahun sebelumnya tumbuh positif sebesar 5,05% (yoy). Provinsi Sulawesi Barat juga diketahui mengalami perlambatan kredit dari 9,64% (yoy) pada Maret 2024 menjadi 5,29% (yoy) pada Maret 2025. Seperti halnya yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, penurunan nominal kredit terbesar terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp117,21 miliar atau berkontraksi -3,87% (yoy) pada Maret 2025 dari yang sebelumnya tumbuh 4,30% (yoy) pada Maret 2024. Kredit pada sektor konstruksi juga terbilang turun cukup signifikan dari 190,77% (yoy) pada Maret 2024 menjadi -10,62% (yoy) atau secara nominal terdapat selisih lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar Rp46,43 miliar.

Ketiga, wilayah Bali dan Nusa Tenggara (porsi penyaluran kredit 3,59% terhadap total kredit yang disalurkan secara nasional) mengalami pertumbuhan kredit yang melambat dari 18,78% (yoy) pada Maret 2024 menjadi 8,17% (yoy) pada Maret 2025. Perlambatan kredit yang terjadi pada wilayah tersebut utamanya dikontribusikan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (porsi: 37,07% terhadap total kredit yang disalurkan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara) yang turun cukup signifikan dari 35,89% (yoy) pada Maret 2024 menjadi 12,35% (yoy) pada Maret 2025. Penurunan kredit di provinsi tersebut utamanya dipengaruhi oleh sektor pertanian yang berkontraksi -12,24% (yoy) pada Maret 2025 dari 20,08% (yoy) seiring nominal kredit yang turun Rp809,89 miliar. Selain itu, kredit yang disalurkan kepada sektor industri pengolahan juga tercatat tumbuh 44,38%

(yoy) pada Maret 2025 lebih rendah dari 138,20% (yoy) pada Maret 2024 meskipun secara nominal meningkat Rp1,8 triliun. Pertumbuhan kredit yang melambat berikutnya dialami oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur (porsi: 19,139% terhadap total kredit yang disalurkan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara). Pertumbuhan kredit di Provinsi tersebut turun cukup signifikan dari *double digit* sebesar 15,18% (yoy) pada Maret 2024 menjadi *single digit* yaitu 3,88% (yoy) pada Maret 2025. Sektor dengan penurunan

nominal kredit terbesar adalah perdagangan besar dan eceran sebesar Rp457,13 miliar sehingga berkontraksi -3,89% (yoy) pada Maret 2024 dari yang sebelumnya tumbuh 9,38% (yoy). Berikutnya adalah sektor *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan dengan penurunan nominal kredit sebesar Rp330,65 miliar sehingga berkontraksi -50,20% (yoy) pada Maret 2025 dari 94,78% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 23 Persebaran Kredit/Pembiayaan Bank Umum menurut Lokasi Proyek (Spasial)



Sumber: LBUT, diolah

Tabel 13 Porsi Kredit/Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi menurut Lokasi Proyek (Spasial)

No.	Sektor Ekonomi	Porsi					
		Pulau Jawa	Pulau Sumatera	Pulau Kalimantan	Pulau Sulawesi	Bali dan Nusa Tenggara	Papua dan Maluku
Lapangan Usaha							
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	3,49%	16,40%	22,58%	7,05%	4,90%	6,15%
2	Perikanan	0,16%	0,32%	0,31%	0,93%	0,41%	0,49%
3	Pertambangan dan Penggalian	3,35%	3,46%	15,29%	5,41%	15,70%	9,75%
4	Industri Pengolahan	16,92%	17,62%	6,29%	10,35%	4,24%	10,18%
5	Listrik, Gas, dan Air	2,79%	2,92%	2,34%	4,28%	1,70%	1,75%
6	Konstruksi	6,08%	2,30%	3,13%	2,68%	1,83%	1,92%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	15,02%	14,59%	12,34%	17,16%	19,36%	15,92%
8	Penyediaan Akomodasi dan PMM	1,53%	1,31%	1,20%	1,46%	9,16%	1,95%
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	7,04%	2,39%	4,39%	1,18%	1,02%	2,45%
10	Perantara Keuangan	8,10%	0,25%	0,24%	0,37%	0,29%	0,28%
11	Real Estate	6,07%	2,03%	1,92%	2,55%	1,70%	1,33%
12	Administrasi Pemerintahan	1,43%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,36%
13	Jasa Pendidikan	0,26%	0,22%	0,11%	0,16%	0,24%	0,01%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,65%	0,65%	0,14%	0,32%	0,92%	0,15%
15	Jasa Kemasyarakatan	2,70%	1,50%	1,63%	2,43%	2,38%	1,61%
16	Jasa Perorangan	0,03%	0,06%	0,02%	0,08%	0,09%	0,53%
17	Badan Internasional	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya							
19	Rumah Tangga	21,03%	29,82%	26,98%	35,47%	27,38%	38,17%
	nilikan Rumah Tinggal	9,92%	8,77%	7,77%	10,77%	7,30%	4,72%
	nilikan Flat atau Apartemen	0,54%	0,14%	0,10%	0,17%	0,05%	0,05%
	nilikan Ruko atau Rukan	0,38%	0,33%	0,38%	0,50%	0,23%	0,30%
	nilikan Kendaraan Bermotor	1,66%	2,36%	2,48%	2,30%	1,71%	0,92%
	-Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk pinjaman multiguna)				21,73%	18,10%	32,18%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	3,34%	4,15%	1,09%	8,11%	8,66%	7,01%
	Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Ket: *Shading* hijau menunjukkan lima sektor dengan porsi terbesar di wilayah tersebut

Sumber: LBUT, diolah

3. Perkembangan Kredit/Pembiayaan UMKM

Pada triwulan I-2025, kredit UMKM masih tumbuh 1,95% (yoy), meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,12% (yoy). Porsi penyaluran kredit UMKM per Maret 2025 tercatat sebesar 18,93% terhadap total kredit bank umum.

Penyaluran kredit UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 45,77%) yang berkontraksi -0,56% (yoy), dari tahun sebelumnya yang tumbuh 4,32% (yoy) dan mendorong perlambatan pertumbuhan kredit UMKM. Selain itu, sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit UMKM terbesar kedua yakni pertanian, perburuan dan kehutanan (17,82%) tercatat tumbuh sebesar 6,52% (yoy), yang juga

melambat dari 14,57% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Di tengah perlambatan kredit UMKM, kualitas kredit UMKM masih terjaga dengan rasio NPL di bawah *threshold* 5% yaitu sebesar 4,14%, meskipun sedikit naik dari tahun sebelumnya sebesar 3,98%. Adapun kenaikan rasio NPL utamanya terjadi pada sektor pertanian, perburuan dan kehutanan yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,33% menjadi 2,68% serta sektor perdagangan besar dan eceran yang naik dari 4,28% menjadi 4,48%, dengan porsi NPL masing-masing sebesar 11,55% dan 49,48% dari total NPL UMKM. Sementara itu, terdapat perbaikan NPL kredit UMKM antara lain pada sektor konstruksi, penyediaan

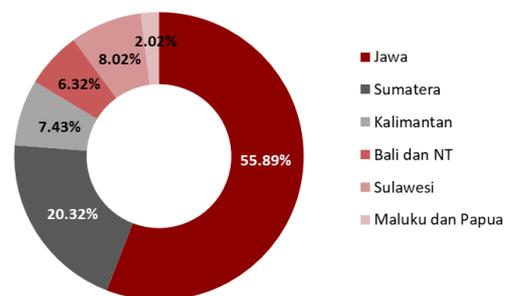
akomodasi dan penyediaan makan minum, real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan, serta jasa perorangan yang melayani rumah tangga.

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 55,89%, terutama di provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara itu, porsi kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) sebesar 23,79%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di provinsi Aceh sebesar 10,70% (yoy), meskipun melambat dari tahun lalu sebesar 11,14% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM di Jawa Timur sebagai wilayah dengan porsi penyaluran kredit UMKM terbesar (15,07%), tumbuh 3,64% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya sebesar 7,41% (yoy).

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN

(62,05%) yang tumbuh 0,54% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya sebesar 7,45% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM kelompok bank BUSN dan BPD tumbuh masing-masing 3,41% (yoy) dan 8,01% (yoy), juga melambat dari tahun sebelumnya masing-masing 7,22% (yoy) dan 18,35% (yoy). Di sisi lain, kredit UMKM kelompok Bank Asing masih melanjutkan tren kontraksi -36,82% (yoy), lebih dalam dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi sebesar -17,85% (yoy).

Grafik 24 Penyebaran Kredit/Pembiayaan UMKM



Sumber: SPI Maret 2025

Tabel 14 Kredit/Pembiayaan UMKM berdasarkan Kelompok Bank

Kelompok Bank	Baki Debet (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Mar '24	Des'24	Mar'25		Des'24	Mar'25	Mar'24	Mar'25
BUMN	923,789	932,511	928,821	62.05%	-0.37%	-0.40%	7.45%	0.54%
BUSN	435,577	454,780	450,432	30.09%	2.96%	-0.96%	7.22%	3.41%
BPD	108,786	118,963	117,500	7.85%	0.63%	-1.23%	18.35%	8.01%
KCBLN	64	38	41	0.00%	5.92%	6.71%	-17.85%	-36.38%
Total UMKM	1,468,216	1,506,293	1,496,794	100%	0.69%	-0.63%	8.12%	1.95%

Sumber: SPI Maret 2025

B. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS

1. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi

Kredit/pembiayaan BPR dan BPRS (selanjutnya disebut kredit) pada triwulan I-2025 tumbuh 6,29% (yoy), melambat

dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 9,42% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, salah satu kredit terbesar antara lain disalurkan ke

sektor Perdagangan, Restoran, dan Hotel dengan porsi 20,83%. Kredit pada sektor ini tumbuh sebesar 1,45% (yoy), turun dari 6,47% (yoy) pada tahun sebelumnya, sehingga menyebabkan perlambatan kredit BPR dan BPRS. Penyaluran pembiayaan terbesar kedua disalurkan ke sektor bukan lapangan usaha - rumah tangga (porsi 12,25%) tumbuh sebesar 10,03% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 4,32% (yoy). Meskipun tumbuh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan tersebut belum dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit BPR dan BPRS secara umum.

Sektor konstruksi (porsi 7,18%) meskipun tumbuh melambat namun masih mencatatkan pertumbuhan yang tinggi

sebesar 13,21% (yoy) dari tahun lalu yang mampu tumbuh 28,91% (yoy). Sektor pertanian, perburuhan dan kehutanan (porsi 6,21%) juga tercatat masih tumbuh 3,99% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,31% (yoy). Penyaluran kredit pada sektor *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan (porsi: 5,39%) juga masih tumbuh 18,47% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 18,44% (yoy).

Transportasi, pergudangan dan komunikasi (porsi: 3,88%) dan industri pengolahan (porsi: 3,50%) juga masih mampu tumbuh meskipun melambat masing-masing sebesar 18,25% (yoy) dan 9,60% (yoy), dari tahun sebelumnya yang tumbuh 31,61% (yoy) dan 21,06% (yoy).

Tabel 15 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan BPR/BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp M)		qtq		yoy		Porsi	
		Mar'24	Dec-24	Mar-25	Dec-24	Mar-25	Mar'24		Mar-25
1	Pertanian, Perburuhan, dan Kehutanan	10,275	10,089	10,684	0.03%	5.90%	7.31%	3.99%	6.21%
2	Perikanan	630	592	587	-3.50%	-0.73%	2.46%	-6.70%	0.34%
3	Pertambangan dan Penggalian	1,350	1,126	1,229	-8.08%	9.14%	21.11%	-8.96%	0.71%
4	Industri Pengolahan	5,499	5,539	6,027	-0.24%	8.82%	21.06%	9.60%	3.50%
5	Listrik, Gas dan Air	216	226	289	-6.64%	27.81%	-1.60%	33.66%	0.17%
6	Konstruksi	10,915	11,934	12,357	-0.20%	3.54%	28.91%	13.21%	7.18%
7	Perdagangan, Restoran dan Hotel	35,334	34,191	35,846	-1.84%	4.84%	6.47%	1.45%	20.83%
8	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	5,646	6,035	6,677	2.01%	10.63%	31.61%	18.25%	3.88%
9	Perantara Keuangan	2,273	2,359	2,293	5.02%	-2.80%	23.94%	0.88%	1.33%
10	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	7,827	8,973	9,273	3.97%	3.34%	18.44%	18.47%	5.39%
11	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan Sosial Wajib	242	202	267	-13.87%	31.73%	7.28%	10.40%	0.15%
12	Jasa Pendidikan	515	543	572	4.86%	5.45%	20.04%	11.15%	0.33%
13	Jasa Sosial/Masyarakat	11,406	12,006	11,675	6.69%	-2.76%	1.31%	2.36%	6.78%
14	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	190	164	168	-6.68%	2.54%	-21.10%	-11.83%	0.10%
15	Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya	15	8	12	-33.48%	59.75%	104.45%	-21.84%	0.01%
16	Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga	19,155	20,929	21,077	4.65%	0.71%	4.32%	10.03%	12.25%
17	Bukan Lapangan Usaha - Lainnya	50,417	52,965	53,050	2.16%	0.16%	7.28%	5.22%	30.83%
Total		161,905	167,881	172,083	1.54%	2.50%	9.42%	6.29%	100%

Sumber: SPI dan SPS Maret 2025

2. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Lokasi (Spasial)

Berdasarkan lokasi, sebagian besar kredit BPR dan BPRS disalurkan ke wilayah Jawa dengan porsi sebesar 59,36%. Besarnya kredit di wilayah Jawa sejalan dengan mayoritas BPR dan BPRS di Indonesia

beroperasi di wilayah tersebut. Kredit di wilayah ini tumbuh 4,75% (yoy), melambat dari tahun lalu yang tumbuh 9,15% (yoy). Jawa Tengah yang merupakan Provinsi dengan penyaluran kredit BPR dan BPRS

terbesar (porsi 22,49%) tumbuh 1,40% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,04% (yoy). Selain itu, Jawa Barat (porsi 14,08%) dan Jawa Timur (porsi 11,23%) juga tumbuh melambat sebesar 4,62% (yoy) dan 8,41% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh masing-masing 8,78% (yoy) dan 16,96% (yoy), sehingga menarik ke bawah pertumbuhan penyaluran kredit BPR dan BPRS secara umum.

Selain itu, kredit kedua terbesar terdapat di wilayah Sumatera dengan porsi 20,13%. Kredit di wilayah ini tumbuh 11,95% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 13,02% (yoy). Penurunan utamanya

didorong oleh Sumatera Utara dan Sumatera Selatan yang tumbuh masing-masing 9,33% (yoy) dan 6,56% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya.

Dilihat dari pertumbuhannya, kredit di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) tumbuh meningkat diantara wilayah lainnya, tercatat tumbuh sebesar 6,36% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,73% (yoy), namun dengan porsi sebesar 7,50% dari total kredit BPR dan BPRS. Pertumbuhan di wilayah ini terutama didorong oleh Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara yang masing-masing tumbuh 3,85% (yoy) dan 11,94% (yoy).

Tabel 16 Persebaran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS menurut Lokasi (Spasial)

	Kredit (RP M)			qtq		yoy		Porsi
	Mar-24	Dec-24	Mar-25	Dec-24	Mar-25	Mar-24	Mar-25	
Jawa	97,523	99,758	102,154	1.11%	2.40%	9.15%	4.75%	59.36%
Sumatera	30,939	33,539	34,636	2.98%	3.27%	13.02%	11.95%	20.13%
Kalimantan	4,858	5,018	5,146	3.29%	2.55%	16.90%	5.94%	2.99%
Bali - Nusra	16,458	16,904	17,248	2.40%	2.04%	6.11%	4.80%	10.02%
Sulampua	12,128	12,661	12,899	-0.68%	1.88%	4.73%	6.36%	7.50%
Total	161,905	167,881	172,083	1.54%	2.50%	9.42%	6.29%	100%

Sumber: SPI dan SPI Maret 2025

Halaman ini sengaja dikosongkan

4 Profil Risiko Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

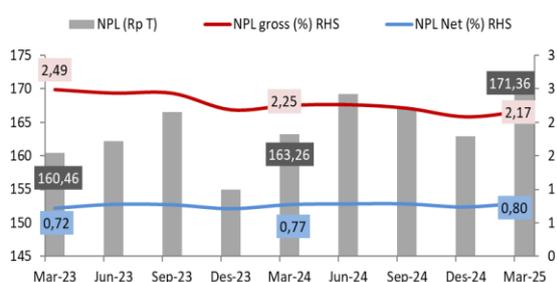
4 Profil Risiko Perbankan

Pada periode laporan, profil risiko bank umum cukup terkelola dengan baik, tecermin dari risiko kredit yang menurun serta kondisi likuiditas yang cukup memadai. Selain itu, risiko pasar juga cukup terjaga seiring upaya bank menyeimbangkan portofolio SSB (*bonds' portfolio rebalancing*) yang dimiliki. Namun demikian ke depannya, risiko likuiditas perlu tetap diwaspadai seiring dengan sentimen ketidakpastian kebijakan moneter dan perdagangan global.

1. Risiko Kredit

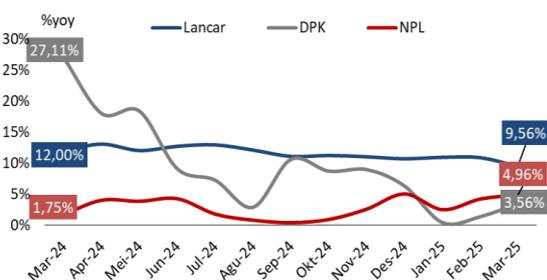
Pada akhir triwulan I 2025, risiko kredit membaik tecermin dari rasio NPL *gross* tercatat sebesar 2,17%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,25% serta diikuti NPL net yang masih cukup stabil sebesar 0,80%. Namun demikian, penurunan rasio NPL bukan disebabkan oleh penurunan nominal NPL secara umum. Pada periode laporan, nominal NPL naik 4,96% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 1,75% (yoy).

Grafik 25 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net



Sumber: SPI Maret 2025

Grafik 26 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit

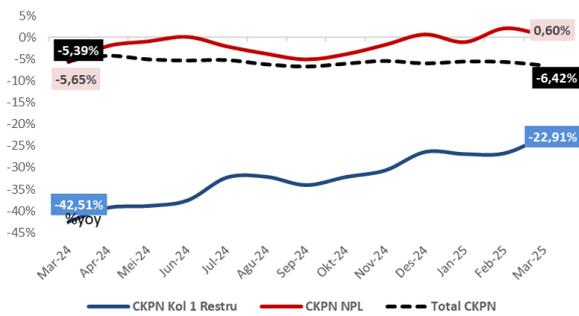


Sumber: SPI Maret 2025

Penurunan rasio NPL *gross* lebih disebabkan oleh kredit yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan nominal NPL. Sementara itu CKPN NPL tumbuh 0,60% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi -5,65% (yoy).

Secara total, CKPN berkontraksi -6,42% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang berkontraksi -5,39% (yoy), utamanya dipengaruhi oleh berkontraksinya CKPN kredit restrukturisasi kualitas lancar sebesar -22,91% (yoy). Sementara itu, CKPN kredit non restrukturisasi kualitas lancar berkontraksi sebesar -8,50% (yoy). Adapun besarnya penurunan CKPN kredit restrukturisasi kualitas lancar sejalan dengan berakhirnya stimulus kredit restrukturisasi yang telah dihentikan sepenuhnya pada 31 Maret 2024 dan normalisasi kegiatan bisnis perbankan. Meskipun CKPN menurun, *coverage* CKPN terhadap kredit restrukturisasi kualitas Lancar dan *coverage* CKPN terhadap kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) masih memadai masing-masing sebesar 15,05% dan 42,57%. Selain itu, *coverage* total CKPN terhadap NPL juga masih cukup baik sebesar 192,04%. Hal ini mengindikasikan bahwa antisipasi bank terhadap risiko kredit masih memadai.

Grafik 27 Pertumbuhan CKPN

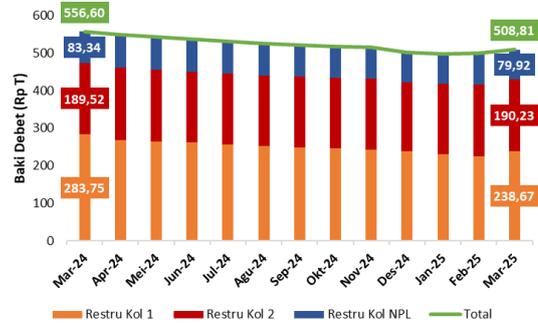


Sumber: LBUT

Di sisi lain, kredit restrukturisasi perbankan sudah turun sebesar -8,59% (yoy) menjadi sebesar Rp508,81 Triliun. Hal ini sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19 dan berakhirnya kebijakan stimulus restrukturisasi. Adapun kredit restrukturisasi masih didominasi oleh kredit restrukturisasi kualitas Lancar sebesar Rp238,67 Triliun atau 46,91% terhadap total kredit restrukturisasi. Kredit restrukturisasi kualitas Lancar tersebut turun -15,89% (yoy), namun membaik dari tahun sebelumnya yang berkontraksi -37,92% (yoy). Porsi kredit restrukturisasi kualitas Lancar terhadap total kredit juga mulai menunjukkan tren penurunan menjadi 3,02% dari 3,92% pada Maret 2024. Penurunan kredit restrukturisasi

kualitas Lancar tersebut menyebabkan rasio *Loan at Risk* (LaR) menurun menjadi sebesar 9,86%, dari tahun sebelumnya 11,10%, dan lebih rendah dibandingkan rasio LaR sebelum pandemi (Des'19 = 9,93%).

Grafik 28 Tren Kredit Restrukturisasi



Sumber: LBUT

Meskipun kondisi risiko kredit mulai membaik, namun perbankan harus tetap mengedepankan aspek prudensial dan mengantisipasi terjadinya pemburukan kualitas kredit ke depan di tengah masih tingginya ketidakpastian global seperti risiko akibat eskalasi perang dagang, ketidakpastian kebijakan moneter global, perkembangan ekonomi negara-negara utama, serta kenaikan tensi geopolitik yang dapat berpotensi meningkatkan tekanan ekonomi domestik.

Tabel 17 Perkembangan Kualitas Kredit

Kualitas Kredit (Rp T)	Mar'24	Des-24	Mar-25	Porsi	qtq		yoy	
					Des'24	Mar-25	Mar'24	Mar-25
1. Lancar	6.724	7.343	7.367	93,16%	4,00%	0,33%	12,00%	9,56%
- Non Restru	6.440	7.105	7.129	90,14%	4,29%	0,33%	16,11%	10,68%
- Restru	284	238	239	3,02%	-3,99%	0,37%	-37,92%	-15,89%
2. DPK	357	326	370	4,68%	-7,39%	13,59%	27,11%	3,56%
3. Kurang Lancar	22	21	20	0,26%	-7,43%	-1,50%	17,04%	-8,25%
4. Diragukan	30	23	29	0,37%	-14,06%	26,01%	-3,00%	-1,62%
5. Macet	111	119	122	1,54%	0,98%	2,29%	0,45%	9,34%
Nominal NPL	163	163	171	-2,56%	5,19%	1,75%	4,96%	
Rasio NPL Gross %	2,25%	2,08%	2,17%	-13	9	-24	-9	
Rasio NPL Net %	0,77%	0,74%	0,80%	-4	6	5	3	
Kredit DPK + Restru Kredit Lancar	641	563	609	-5,98%	8,01%	-13,16%	-5,05%	
Rasio Kredit DPK + Restru Kredit Lancar %	8,85%	7,19%	7,70%	-71	50	-260	-115	
Loan at Risk (LaR)	804	726	780	-5,24%	7,38%	-10,50%	-3,02%	
Rasio Loan at Risk (LaR) %	11,10%	9,27%	9,86%	-84	59	-284	-124	
Total Kredit	7.245	7.832	7.908	3,33%	0,98%	12,40%	9,16%	

Sumber: SPI Maret 2025

Keterangan: Perubahan (qtq dan yoy) untuk data rasio dalam *basis point* (bps)

1.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Pada periode laporan, terjadi penurunan risiko kredit produktif, baik pada jenis penggunaan modal kerja dan investasi secara yoy. Rasio NPL Kredit Modal Kerja

Tabel 18 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Kredit (Rp T)	Mar'24	Des'24	Mar'25	yoy	
				Mar'24	Mar'25
KMK	3.273	3.506	3.486	12,30%	6,51%
KI	1.991	2.187	2.256	14,83%	13,36%
KK	1.981	2.139	2.166	10,22%	9,32%
Total Kredit	7.245	7.832	7.908	12,40%	9,16%

Sumber: SPI Maret 2025

Pada periode laporan, penurunan rasio NPL KMK terjadi di Bank Persero, Bank Swasta, dan Bank KCBLN. Rasio NPL KMK di Bank Persero dan Bank Swasta turun dari 2,69% dan 2,78% pada Maret 2024 menjadi 2,54% dan 2,53% pada Maret 2025. Sejalan dengan itu, rasio NPL KMK di Bank KCBLN turun dari 1,40% menjadi 0,94%.

Sama halnya dengan KMK, perbaikan rasio NPL KI juga terjadi pada Bank Persero, Bank Swasta, dan Bank KCBLN. Rasio NPL KI di Bank Persero dan Bank Swasta turun dari 1,93% dan 1,52% pada Maret 2024 menjadi 1,45% dan 1,36% pada Maret 2025. Sementara itu, rasio NPL KI di Bank KCBLN yang sebelumnya tercatat 1,39% pada Maret 2024 menjadi berkualitas lancar (tidak terdapat kredit bermasalah) pada Maret 2025. Adapun rasio NPL KMK dan KI pada BPD masih tercatat sebagai yang tertinggi

(KMK) dan Kredit Investasi (KI) masing-masing turun menjadi 2,69% dan 1,44% dari 2,83% dan 1,76% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, rasio NPL Kredit Konsumsi (KK) meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,80% menjadi 2,08%.

Tabel 19 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan

NPL Gross %	Mar'24	Des'24	Mar'25	yoy	
				Mar'24	Mar'25
NPL KMK	2,83	2,57	2,69	-47	-22
NPL KI	1,76	1,48	1,44	-29	-20
NPL KK	1,80	1,90	2,08	15	20
Total NPL	2,25	2,08	2,17	-25	-11

dibandingkan kelompok bank lainnya bahkan meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Untuk informasi, rasio NPL KMK dan KI BPD tercatat meningkat dari 7,01% dan 2,36% pada Maret 2024 menjadi 9,17% dan 2,64% pada Maret 2025. Meskipun demikian, rasio NPL KK BPD tercatat yang terendah sebesar 1,14% walau sedikit naik dari periode yang sama tahun lalu yaitu 1,08%. Tingginya NPL KMK pada BPD antara lain karena keterbatasan sarana dan prasarana BPD dalam penyaluran kredit produktif seperti infrastruktur dalam melakukan monitoring, serta kompetensi dan *knowledge* SDM BPD yang lebih difokuskan pada KK utamanya kredit bagi pegawai Pemerintah Daerah. Secara keseluruhan, NPL BPD masih terjaga pada level 2,82%, namun meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,43%.

Tabel 20 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank

Kelompok Kepemilikan Bank	KMK			KI			KK			NPL (%)
	Kredit (Rp M)	Porsi KMK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KI Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	
Bank Persero	1.559.095	42,95	2,54	1.133.773	31,23	1,45	937.415	25,82	2,36	2,16
Bank Swasta	1.650.596	47,97	2,53	999.667	29,05	1,36	790.825	22,98	2,27	2,13
BPD	117.647	18,20	9,17	95.902	14,83	2,64	433.009	66,97	1,14	2,82
KCBLN	159.148	83,54	0,94	27.052	14,20	0,00	4.295	2,25	1,45	0,82
TOTAL	3.486.485	44,09	2,69	2.256.395	28,53	1,44	2.165.545	27,38	2,08	2,17

Sumber: SPI Maret 2025

1.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

Beberapa sektor ekonomi menunjukkan perbaikan risiko kredit yang tecermin dari penurunan nominal NPL.

Penurunan nominal NPL terbesar terjadi pada sektor konstruksi. Risiko kredit pada sektor ini tercatat membaik dari 3,76% pada Maret 2024 menjadi 2,61% pada Maret 2025 dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp1,65 triliun (yoy). Perbaikan rasio NPL tersebut utamanya didorong oleh sub sektor konstruksi gedung dan bangunan sipil. Perbaikan risiko kredit pada sektor ini salah satunya didukung oleh realisasi investasi nasional pada subsektor konstruksi yang mencapai Rp10,06 triliun dengan jumlah proyek hingga 357.563 unit (data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal). Berdasarkan peringkat kontribusi dari 23 subsektor yang tercatat, konstruksi berada di posisi ke-15 secara keseluruhan. Sebagaimana diketahui, sektor konstruksi berperan sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional terutama melalui pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan kawasan industri. Sektor ini juga memberikan *multiplier effect* terhadap sektor-sektor lain seperti manufaktur, logistik, dan properti, sehingga tingginya realisasi investasi di sektor konstruksi diharapkan dapat mendorong akselerasi

pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Untuk informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan kontribusi sektor konstruksi dalam perekonomian Indonesia berada di urutan keempat, dilihat dari persentasenya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 9,61% pada triwulan I-2025. Meskipun demikian, sektor konstruksi tumbuh terbatas 2,18% (yoy) dipengaruhi oleh sentimen *wait and see* investor di tengah perlambatan ekonomi dan tingginya ketidakpastian global.

Penurunan nominal NPL terbesar kedua terjadi pada sektor industri pengolahan. Nominal NPL pada sektor ini tercatat turun Rp1,65 triliun atau secara rasio turun dari 3,22% pada Maret 2024 menjadi 2,82% pada Maret 2025. Perbaikan rasio NPL tersebut utamanya didorong oleh sub sektor industri barang galian bukan logam yang mencatatkan penurunan nominal NPL terbesar meskipun porsi penyaluran kredit pada sub sektor tersebut relatif kecil. Selain itu, perbaikan risiko kredit pada sektor industri pengolahan juga didorong oleh subsektor industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia. Adapun perbaikan rasio NPL sektor industri pengolahan secara umum ditopang oleh pertumbuhan sektor tersebut yang meningkat dari 4,13% (yoy) pada triwulan I-2024 menjadi 4,55% (yoy) pada triwulan I-2025. Terjaganya kinerja sektor industri pengolahan antara lain

didukung oleh aktivitas hilirisasi serta kebijakan pemerintah yang akomodatif dalam mendorong kepercayaan industri untuk meningkatkan produksi dan investasi, sehingga memberikan optimisme bagi para pelaku industri terhadap prospek bisnis di tengah berbagai isu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dua indikator yang merefleksikan kinerja sektor industri manufaktur yaitu *Purchasing Manager Index* (PMI) dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) masing-masing tercatat berada di zona ekspansi sebesar 52,4 dan 52,98 pada Maret 2025. Namun demikian, perlu juga diperhatikan NPL beberapa subsektor pada sektor ini yang meningkat antara lain: industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya; industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki; industri karet, barang dari karet, dan barang dari plastik; serta industri tekstil.

Penurunan nominal NPL terbesar ketiga terlihat pada sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum. Nominal NPL pada sektor ini turun sebesar Rp866,17 miliar sehingga mendorong penurunan rasio NPL dari 3,30% pada Maret 2024 menjadi 2,49% pada Maret 2025. Perbaikan rasio NPL ini utamanya didorong oleh subsektor penyediaan akomodasi hotel bintang seiring meningkatnya pertumbuhan kredit pada subsektor tersebut dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun demikian, BPS mencatat bahwa Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang di Indonesia adalah sebesar 33,56% pada Maret 2025 berkontraksi -9,85% (yoy) dari 43,41% pada Maret 2024 sekaligus menjadi rekor terendah dalam setahun terakhir. Padahal, biasanya pada saat momentum Ramadhan dan menjelang Hari Besar Keagamaan

Nasional (HBKN) Idul Fitri biasanya TPK hotel di wilayah tujuan liburan cenderung meningkat. Namun demikian, kondisi sebaliknya justru terjadi ketika momentum Ramadhan hingga menjelang HBKN Idul Fitri tahun ini yang jatuh pada tanggal 31 Maret 2025. Rendahnya TPK hotel sejak awal tahun 2025 dipicu oleh sejumlah faktor utama. Pertama, menurunnya jumlah pemudik tahun ini sekitar -24% (yoy) dibanding tahun lalu. Selain itu, penurunan TPK hotel juga terjadi lantaran masih berlanjutnya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat, untuk menahan pengeluarannya yang bersifat tersier. Hal tersebut berdampak pada turunnya minat masyarakat untuk menginap di hotel berbintang. Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran Kementerian dan Lembaga sesuai himbauan Pemerintah juga diduga menjadi salah satu penyebab tingkat hunian hotel di Indonesia turun sejak awal tahun 2025.

Penurunan nominal NPL terbesar berikutnya terjadi pada sektor *real estate* sebesar Rp830,84 miliar. Penurunan nominal NPL ini mendorong perbaikan risiko kredit pada sektor *real estate* dari 2,14% pada Maret 2024 menjadi 1,78% pada Maret 2025. Subsektor *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan asrama menjadi pendorong utama penurunan nominal NPL pada sektor *real estate*. Penurunan NPL sektor *real estate* juga didorong oleh jasa persewaan alat transportasi air. Perkembangan tersebut sejalan dengan data BPS yang mencatat jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri sebanyak 2,46 juta orang pada Maret 2025 atau naik 23,90% (mtm) dan 61,4% (yoy). Secara kumulatif, jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri mencapai 7 juta

orang selama Januari-Maret 2025 atau naik 25,91% (ctc) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 5,55 juta orang. Kenaikan jumlah penumpang ini salah satunya dipicu oleh program mudik gratis kapal laut 2025 yang digagas Kementerian Perhubungan, bertepatan dengan masa *peak season* mudik Lebaran. Tidak hanya itu, pertumbuhan sektor *real estate* yang meningkat dari 2,54% pada triwulan I-2024 menjadi 2,94% (yoy) pada triwulan I-2025 turut mendorong perbaikan risiko kredit di sektor ini.

Penurunan nominal NPL terbesar berikutnya terjadi pada sektor perantara keuangan. Nominal NPL pada sektor ini tercatat turun Rp628,95 miliar atau secara rasio turun dari 0,48% pada Maret 2024 menjadi 0,29% pada Maret 2025. Perbaikan rasio NPL tersebut utamanya didorong oleh subsektor perantara keuangan kecuali asuransi dan dana pensiun. Bersamaan dengan perbaikan rasio NPL sektor perantara keuangan, pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi juga tercatat meningkat dari 3,91% (yoy) pada triwulan I-2024 menjadi 3,98% (yoy) pada triwulan I-2025 dengan kontribusi sebesar 4,12% terhadap nilai PDB. Sektor berikutnya dengan penurunan nominal NPL cukup besar yaitu perikanan. Nominal NPL sektor perikanan tercatat turun Rp153,81 miliar sehingga mendorong perbaikan rasio NPL dari 5,56% pada Maret 2024 menjadi 5,13% pada Maret 2025. Perbaikan rasio NPL tersebut utamanya didorong oleh sub sektor penangkapan biota di perairan umum dan budidaya biota di laut. Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya mendorong pemanfaatan sumber daya laut melalui lima strategi ekonomi biru dalam menciptakan keberlanjutan ekologi

dan ekonomi, merevitalisasi kesehatan laut, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi laut yang berkelanjutan. Kelima strategi ekonomi biru tersebut mencakup perluasan kawasan konservasi laut, Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota, pengembangan budidaya perikanan di pesisir darat dan laut, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pengentasan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. Meskipun mulai menunjukkan perbaikan, namun rasio NPL sektor perikanan yang masih tinggi (>5%) tetap perlu diwaspadai. Hal ini mengingat sektor perikanan merupakan industri yang sangat rentan terhadap berbagai jenis risiko, baik yang bersifat alami, teknis, operasional, maupun eksternal.

Di sisi lain, rasio NPL pada sektor rumah tangga, yang merupakan sektor ekonomi terbesar, justru meningkat dari 1,91% pada Maret 2024 menjadi 2,23%, pada Maret 2025 atau secara nominal terdapat kenaikan sebesar Rp9,1 triliun. Peningkatan NPL pada sektor ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya nominal NPL pada Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal dan Rumah Tangga untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor. Jika dilihat dari PDB Indonesia berdasarkan pengeluaran, pengeluaran konsumsi rumah tangga memang tumbuh melambat, seiring dengan adanya penurunan jumlah kelas menengah yang diikuti dengan pelemahan daya beli masyarakat akibat berlanjutnya gelombang PHK di berbagai sektor industri.

Peningkatan rasio NPL juga terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran dari 3,39% pada Maret 2024 menjadi 3,62% pada Maret 2025. Peningkatan rasio NPL ini didorong oleh kenaikan nominal NPL

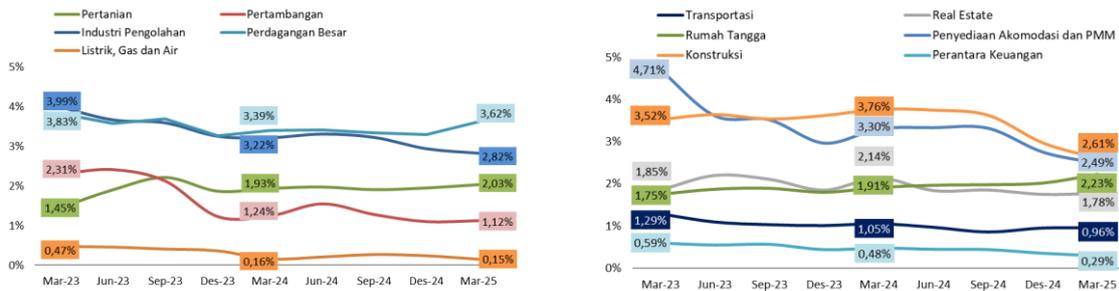
sebesar Rp3,76 triliun. Adapun peningkatan NPL pada sektor ini utamanya disebabkan oleh subsektor perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan impor (kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor). Sementara itu subsektor penjualan mobil, sepeda motor, dan penjualan eceran bahan bakar kendaraan masih melanjutkan perbaikan risiko kredit dari triwulan sebelumnya. Meskipun demikian, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), penjualan mobil pada Maret 2025 tercatat sebanyak 70.895 unit atau masih berkontraksi -5,12% (yoy) namun sedikit membaik dari pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu sebesar -26,22% (yoy). Bahkan, pasar perdagangan mobil di Indonesia terutama untuk mobil baru masih lesu atau berkontraksi -4,69% (ctc) selama periode Januari-Maret 2025. Beberapa faktor yang diperkirakan menjadi penyebab turunnya penjualan mobil domestik sejak tahun lalu karena masih cukup tingginya suku bunga global, nilai tukar Rupiah/USD yang fluktuatif, dan kenaikan upah pekerja yang tidak sepadan dengan peningkatan harga kendaraan.

Kenaikan nominal NPL terbesar berikutnya terjadi pada sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp1,02 triliun. Hal ini mendorong perburuan risiko kredit dari 1,93% pada Maret 2024 menjadi 2,03% pada Maret 2025. Padahal sektor pertanian mencatatkan pertumbuhan tertinggi mencapai 10,52% (yoy) pada triwulan I-2025, naik signifikan dari yang sebelumnya berkontraksi -3,54% (yoy) pada triwulan I-2024 dengan kontribusi 11,07% terhadap PDB. Hal ini antara lain didukung oleh reformasi regulasi yang dilakukan Presiden

Prabowo Subianto yang memangkas 145 peraturan di sektor pertanian menjadi hanya satu Peraturan Presiden (Perpres) serta momentum panen raya yang mendorong lompatan besar di sektor pangan. Adapun subsektor utama yang mengalami perburuan risiko kredit adalah pembibitan dan budaya ternak. Sebagaimana diketahui, subsektor peternakan di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural karena didominasi oleh peternak skala kecil. Kondisi ini menyebabkan produktivitas dan efisiensi usaha peternakan di Indonesia relatif tertinggal dibandingkan negara lain yang memiliki sistem peternakan lebih maju dalam hal teknologi dan skala produksi. Hal tersebut kemudian memengaruhi tingkat pendapatan peternak dan keberlanjutan usaha peternakan hingga kemampuannya dalam memenuhi kewajiban sebagai debitur.

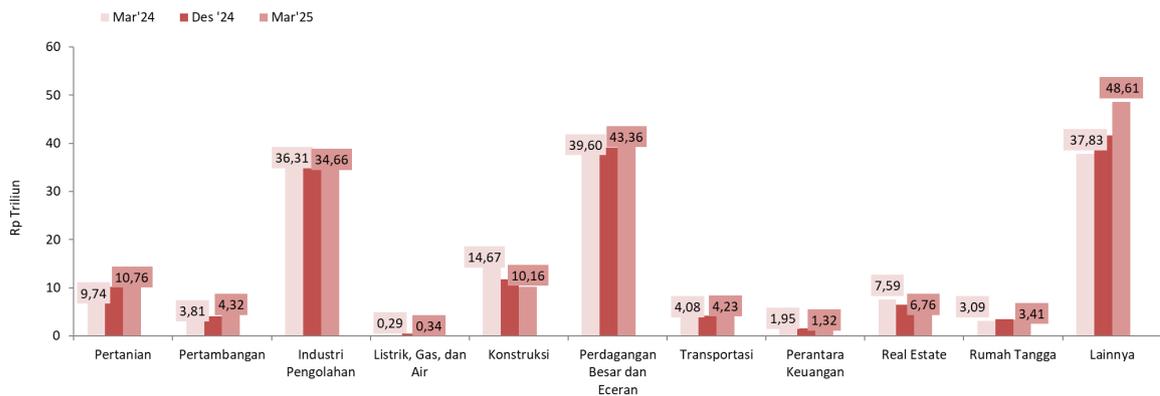
Di sisi lain, terdapat sektor yang masih perlu menjadi perhatian karena mencatatkan rasio NPL tinggi (>5%) meskipun mulai menunjukkan adanya perbaikan yaitu pertambangan dan penggalian. Rasio NPL ini sedikit membaik dari 5,56% pada Maret 2024 menjadi 5,13% pada Maret 2025 walaupun nominal NPLnya meningkat sebesar Rp510,63 miliar. Perbaikan rasio NPL pada sektor pertambangan utamanya didorong oleh subsektor pertambangan dan jasa pertambangan minyak dan gas bumi. Di sisi lain, terdapat satu subsektor yang memiliki rasio NPL sangat tinggi bahkan mencapai dua digit dan memburuk dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu penggalian batu-batuan, tanah liat dan pasir, serta pertambangan mineral. Rasio NPL subsektor ini meningkat dari 9,79% pada Maret 2024 menjadi 13,71% pada Maret 2025.

Grifik 29 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi



Sumber: SPI Maret 2025, diolah

Grifik 30 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi



Sumber: SPI Maret 2025, diolah

1.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial)

Secara umum, perbaikan risiko kredit yang terjadi saat ini, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan pinjaman, terutama di tengah rambatan risiko global dan ketegangan geopolitik yang belum mereda. Namun demikian, perbaikan kualitas kredit tidak terjadi secara merata di semua wilayah dikarenakan adanya sejumlah faktor spesifik yang memengaruhi kondisi ekonomi dan risiko kredit di wilayah tertentu. Berdasarkan lokasi proyek, perbaikan risiko kredit hampir terjadi di semua wilayah kecuali Bali dan Nusa Tenggara serta Kalimantan. Disparitas perbaikan risiko kredit antar wilayah ini menjadi sinyal bahwa diperlukan strategi penyaluran kredit yang lebih terfokus dan disesuaikan dengan kondisi serta potensi

masing-masing daerah, guna mendukung stabilitas sektor perbankan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi secara menyeluruh.

Pada Maret 2025, rasio NPL di Wilayah Jawa tercatat membaik meskipun kredit tumbuh 8,95% (yoy), lebih rendah dari 13,56% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Rasio NPL di Wilayah Jawa turun dari 2,33% pada Maret 2024 menjadi 2,23% pada Maret 2025 meskipun secara nominal NPL naik sebesar Rp5,09 triliun. Perbaikan rasio NPL di Wilayah Jawa utamanya didorong oleh turunnya nominal NPL di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1,25 triliun (porsi kredit 48,77% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Jawa) dengan perbaikan rasio NPL dari 1,37% menjadi 1,17%. Adapun penurunan nominal NPL Provinsi DKI Jakarta utamanya didorong oleh sektor konstruksi sebesar Rp1,37 triliun

atau secara rasio membaik dari 2,27% pada Maret 2024 menjadi 1,63% pada Maret 2025. Perbaikan rasio NPL di Provinsi DKI Jakarta sejalan dengan realisasi investasi di provinsi tersebut yang mencapai Rp69,8 triliun atau merupakan yang tertinggi se-Indonesia pada triwulan I-2025. Realisasi investasi di Provinsi DKI Jakarta tersebar di 114.451 proyek atau berkontribusi sebesar 15% dari total realisasi investasi secara nasional sepanjang Januari-Maret 2025. Capaian tersebut meningkat dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp58,4 triliun.

Selanjutnya, wilayah Sumatera juga mencatatkan perbaikan rasio NPL dari 2,18% pada Maret 2024 menjadi 1,97% pada Maret 2025 dengan nominal NPL yang turun sebesar Rp220,04 miliar. Perbaikan rasio NPL di wilayah tersebut utamanya didorong oleh turunnya nominal NPL di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp987,41 miliar (porsi kredit 16,53% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Sumatera) atau secara rasio turun dari 2,66% pada Maret 2024 menjadi 1,89% pada Maret 2025. Adapun penurunan nominal NPL Provinsi Sumatera Selatan utamanya didorong oleh sektor pertanian sebesar Rp947,03 miliar atau secara rasio membaik dari 5,44% pada Maret 2024 menjadi 2,03% pada Maret 2025. Perbaikan rasio NPL tersebut sejalan dengan kinerja sektor pertanian yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Sumatera Selatan pada triwulan I-2025 mencapai 14,24%. Sektor ini tumbuh tinggi hingga 11,95% (yoy) pada triwulan I-2025 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,34% (yoy).

Perbaikan risiko kredit juga terlihat di wilayah Sulawesi dengan penurunan rasio NPL dari 2,97% pada Maret 2024 menjadi 2,75% pada

Maret 2025 meskipun secara nominal naik Rp106,91 miliar (yoy). Penurunan tersebut didorong oleh perbaikan risiko kredit pada Provinsi Gorontalo (porsi kredit 5,22% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Sulawesi) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (porsi kredit 12,23% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Sulawesi). Rasio NPL Provinsi Gorontalo tercatat turun dari 5,42% pada Maret 2024 menjadi 4,49% pada Maret 2025. Perbaikan risiko kredit pada provinsi tersebut utamanya didorong oleh sektor perikanan yang ditandai dengan turunnya rasio NPL dari 12,18% pada Maret 2024 menjadi 7,34% pada Maret 2025 meskipun masih tergolong tinggi dan perlu menjadi perhatian utama. Selain itu, rasio NPL sektor industri pengolahan di Provinsi Gorontalo juga tercatat turun dari 5,36% pada Maret 2024 menjadi 1,03% pada Maret 2025. Selanjutnya pada Provinsi Sulawesi Tenggara rasio NPL tercatat menurun dari 1,88% pada Maret 2024 menjadi 1,43% pada Maret 2025. Perbaikan risiko kredit di provinsi tersebut ditandai oleh penurunan rasio NPL pada sektor pertambangan dan penggalian dari 9,47% pada Maret 2024 menjadi 0,58% pada Maret 2025.

Wilayah Maluku dan Papua juga mencatatkan penurunan rasio NPL dari 2,13% pada Maret 2024 menjadi 1,88% pada Maret 2025. Penurunan rasio NPL ini dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit sebesar 14,68% (yoy) yang lebih tinggi pada Maret 2025 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,38% (yoy), sementara nominal NPL justru meningkat sebesar Rp20,18 miliar. Penurunan rasio NPL didorong oleh Provinsi Papua (porsi kredit 47,05% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Maluku dan Papua) dengan NPL sebesar 2,00% pada

Maret 2025, turun dari 2,68% pada Maret 2024. Perbaikan rasio NPL pada Provinsi Papua utamanya pada sektor pertambangan sejalan dengan kredit yang tumbuh signifikan pada Maret 2025 untuk mendukung ekspansi bisnis pertambangan bijih tembaga. Di sisi lain, tiga provinsi lain di wilayah Maluku dan Papua mengalami peningkatan rasio NPL dengan kenaikan rasio NPL terbesar pada Provinsi Maluku sebesar 50 bps (yoy) menjadi 2,66% pada Maret 2025. Peningkatan rasio NPL di Provinsi Maluku utamanya disebabkan kenaikan risiko kredit pada sektor konstruksi yang meningkat signifikan dari 19,85% pada Maret 2024 menjadi 28,07% pada Maret 2025. Rasio NPL sektor perikanan dan industri pengolahan juga meningkat dari 3,49% dan 2,83% pada Maret 2024 menjadi 6,36% dan 7,86% pada Maret 2025. Kenaikan rasio NPL hingga melampaui batas 5% pada beberapa sektor di Provinsi Maluku ini seyogyanya patut diwaspadai karena dapat mengindikasikan adanya tekanan terhadap kapasitas debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit, yang bisa dipicu oleh berbagai faktor seperti keterlambatan proyek infrastruktur, penurunan produktivitas sektor perikanan akibat cuaca ekstrem atau gangguan distribusi, serta lemahnya permintaan pasar terhadap produk industri pengolahan lokal. Jika tidak segera direspons dengan langkah mitigasi yang tepat, kondisi ini berpotensi memberikan dampak pada melemahnya kinerja intermediasi perbankan di wilayah tersebut serta menghambat pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Di sisi lain, wilayah Kalimantan serta Bali dan Nusa Tenggara tercatat mengalami kenaikan

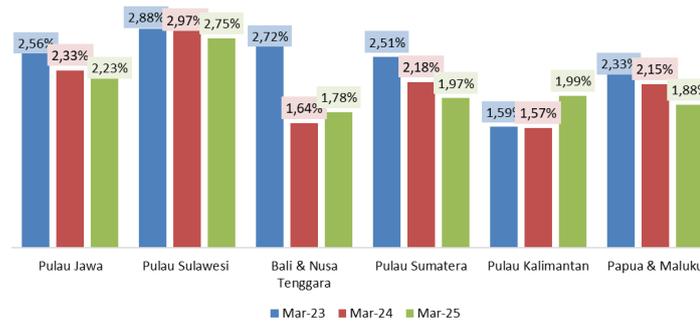
rasio NPL dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada wilayah Kalimantan, rasio NPL mengalami kenaikan dari 1,57% pada Maret 2024 menjadi 1,99% pada Maret 2025. Kenaikan rasio NPL terjadi pada hampir semua provinsi pada wilayah Kalimantan seiring dengan melambatnya pertumbuhan kredit dalam periode yang sama. Adapun kenaikan rasio NPL terbesar terjadi pada Provinsi Kalimantan Tengah (porsi kredit 16,40% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Kalimantan). Rasio NPL di provinsi tersebut meningkat dari 1,67% pada Maret 2024 menjadi 3,70% pada Maret 2025 atau secara nominal sebesar Rp1,68 triliun (yoy). Peningkatan risiko kredit tersebut utamanya pada sektor pertambangan dengan kenaikan nominal NPL mencapai Rp1,51 triliun (yoy) akibat penurunan kinerja penjualan salah satu debitur besar di sektor tersebut.

Sementara pada wilayah Bali dan Nusa Tenggara, peningkatan rasio NPL tercatat sebesar 14 bps (yoy) menjadi 1,78% dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp759,35 miliar (yoy). Provinsi Nusa Tenggara Timur (porsi kredit 19,39% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara) mencatatkan rasio NPL tertinggi sebesar 2,96% pada Maret 2025, meningkat dari 1,74% pada Maret 2024. Hal ini didorong oleh sektor perdagangan dengan porsi kredit mencapai 20,53% yang mencatatkan kenaikan NPL cukup signifikan dari 3,50% pada Maret 2024 menjadi 6,73% pada Maret 2025. Padahal, sektor tersebut merupakan salah satu penggerak utama PDRB Nusa Tenggara Timur dan tumbuh signifikan mencapai 11,91% (yoy) pada triwulan I-2025 naik dari 5,56% (yoy) pada periode yang sama tahun lalu.

Tabel 21 NPL Gross Lokasi Berdasarkan Sektor Ekonomi Periode Desember 2024

		Pertanian	Pertambangan	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air	Konstruksi	Perdagangan Besar	Transportasi	Rumah Tangga	Perantara Keuangan	Total
Jawa	NPL %	2,60%	0,88%	3,46%	0,18%	1,92%	3,65%	0,91%	2,52%	0,26%	2,23%
Sumatera	NPL %	1,51%	1,54%	1,00%	0,04%	6,07%	3,72%	1,28%	1,84%	4,62%	1,97%
Kalimantan	NPL %	0,62%	2,64%	0,75%	0,04%	5,91%	3,68%	0,79%	2,02%	1,95%	1,99%
Sulawesi	NPL %	5,24%	0,62%	1,41%	0,19%	6,87%	4,06%	2,62%	1,68%	1,98%	2,75%
Bali & Nusa Tenggara	NPL %	5,63%	0,02%	1,18%	0,26%	7,90%	3,11%	1,94%	1,35%	1,07%	1,78%
Papua & Maluku	NPL %	0,83%	0,21%	0,37%	0,08%	11,54%	3,59%	2,79%	1,54%	0,11%	1,88%
Total		2,03%	1,12%	2,82%	0,15%	2,61%	3,62%	0,96%	2,23%	0,29%	2,17%

Sumber: LBUT, diolah

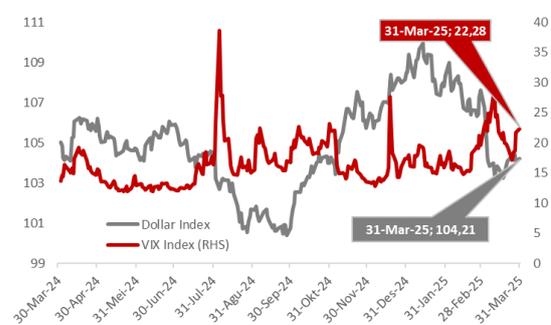
Grafik 31 Tren Rasio NPL Gross berdasarkan Lokasi Proyek (Spasial)

Sumber: LBUT, diolah

2. Risiko Pasar

Pada triwulan I 2025, seiring dengan bauran kebijakan perdagangan serta tarif dari pemerintahan AS dan kondisi geopolitik di wilayah Eropa dan Timur Tengah, volatilitas pasar global cenderung bergerak naik namun tetap terkendali. Hal tersebut juga tecermin dari *Volatility Index* (VIX) yang cenderung meningkat pada Maret 2025 setelah beberapa waktu sebelumnya sempat melandai. Sementara itu, The Fed pada *Federal Open Market Committee* (FOMC) bulan Maret 2025 kembali menahan suku bunga acuan di level 4,25% - 4,50%, masih belum mengalami perubahan sejak akhir tahun 2024 dan diproyeksikan akan bertahan hingga setidaknya pada pertengahan tahun 2025. Di sisi lain, mata uang dollar AS cenderung mengalami pelemahan terhadap mata uang utama dan EM sepanjang triwulan I 2025, dipicu antara lain oleh meningkatnya kekhawatiran serta ketidakpastian atas implementasi tarif

impor AS. Sementara itu, Kebijakan suku bunga yang cenderung tidak akan turun dalam waktu dekat turut membuat imbal hasil obligasi di pasar AS lebih menarik sehingga mendorong *capital outflow* dari EM ke AS. Nilai obligasi pada EM yang turun dapat memicu kerugian pada portfolio investasi bank. Selain itu, bank yang memiliki eksposur dalam USD (pembiayaan, investasi, *trading*) berpotensi mengalami kerugian nilai tukar dan *market losses*.

Grafik 32 Dolar Index dan VIX Index

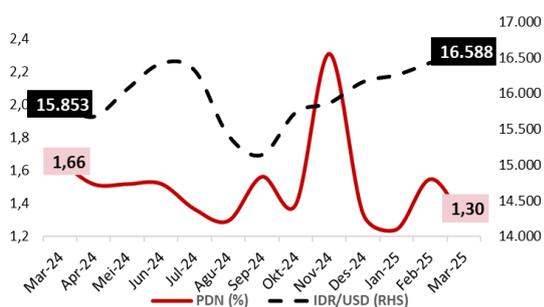
Sumber: Reuters

2.1 Risiko Nilai Tukar

Pada akhir Maret 2025, nilai tukar Rupiah terhadap USD tercatat sebesar Rp16.588/USD, melemah 4,43% dari posisi akhir Maret 2024 sebesar Rp15.853/USD. Namun demikian, pelemahan rupiah tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan mata uang negara lainnya seperti Brazil dan Korea Selatan masing-masing melemah sebesar 12,08% dan 8,02% *point-to-point* posisi akhir Maret 2025 terhadap akhir Maret 2024.

Seiring pelemahan nilai tukar tersebut, Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan pada Maret 2025 masih terjaga rendah sebesar 1,30%, serta turun dari tahun lalu sebesar 1,66%. PDN masih berada pada posisi *Long* sehingga dampaknya terhadap pendapatan perbankan masih positif. Rasio PDN tersebut menunjukkan eksposur risiko nilai tukar terhadap portofolio valuta asing bank yang terjaga dan masih berada pada level rendah jauh di bawah *threshold* 20%. Berdasarkan individu bank, sebagian besar bank devisa (54 bank) memiliki rasio PDN yang rendah (<2%).

Grafik 33 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar

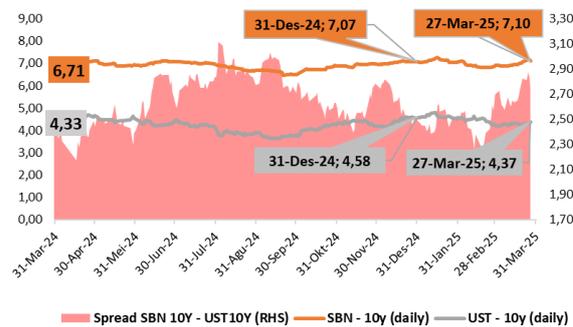


Sumber: Bank Indonesia

2.2 Risiko Suku Bunga

Perkembangan pasar tenaga kerja AS yang moderat diiringi dengan inflasi yang melandai di tengah agresivitas tarif Trump yang berdampak pada perang dagang serta berpotensi terjadinya peningkatan resesi AS, membuka kembali peluang pemotongan suku bunga FFR secara terbatas yang diproyeksikan pada paruh kedua tahun 2025. Seiring dengan masih tertahannya FFR selama triwulan I-2025, *Yield US Treasury* (UST) cenderung menurun, mencerminkan ekspektasi pasar terhadap kondisi fiskal AS dan risiko global, meskipun The Fed diperkirakan akan bersikap lebih hati-hati dalam menyesuaikan suku bunga. Di dalam negeri, *yield* Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun mengalami kenaikan, sehingga *spread* antara *yield* UST dan SBN cenderung melebar. Melebarnya *spread* tersebut dapat mencerminkan meningkatnya *sovereign risk* Indonesia, namun tetap membuka peluang bagi arus masuk modal asing yang tercatat masih memasuki pasar dalam negeri.

Grafik 34 Spread Yield UST dan SBN

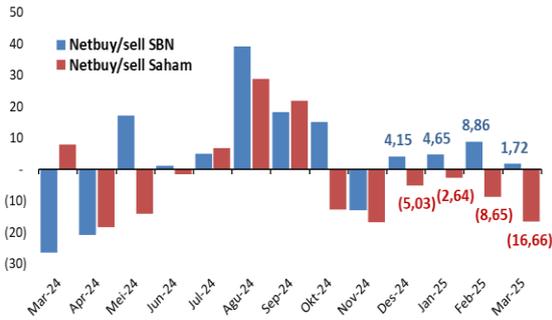


Sumber: PHEI dan Reuters

Pada pasar keuangan, kepercayaan dari investor masih cukup baik di pasar SBN yang selama setahun terakhir mencatatkan *capital inflow* atau *net buy* transaksi non-

residen sebesar Rp81,17 Triliun. Di sisi lain, transaksi investor asing atau non-residen di pasar saham mencatatkan *net sell* atau *capital outflow* sebesar Rp39,25 Triliun dari Maret 2024 hingga Maret 2025.

Grafik 35 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia

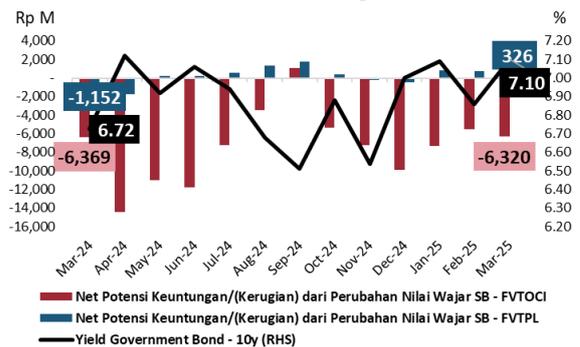


Sumber: DJPPR dan BEI

Di perbankan, risiko suku bunga yang dilihat dari nilai wajar berdasarkan *mark-to-market* masih terjaga. Pada Maret 2025, *yield* SBN 10 tahun naik menjadi 7,10% dibandingkan dengan posisi tahun lalu (Maret 2024) sebesar 6,72%. Namun demikian, perbankan dapat memitigasi risiko perubahan suku bunga sehingga nilai wajar portofolio obligasi kategori *Fair Value Through Profit or Loss* (FVTPL) mulai menunjukkan potensi keuntungan, sedangkan potensi kerugian dari obligasi kategori *Fair Value Through Other Comprehensive Income* (FVTOCI) juga

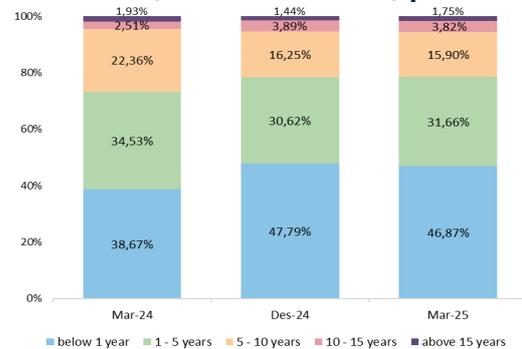
mencatatkan penurunan *loss*. Selain itu, terdapat penurunan rata-rata sisa jatuh tempo SSB pada Maret 2025 dibandingkan Maret 2024, di mana terjadi *shifting* dari tenor jangka panjang menjadi menengah dan pendek, sehingga mengurangi fluktuasi nilai wajar SSB bank jika terjadi pergerakan suku bunga.

Grafik 36 Potensi Keuntungan/Kerugian Kepemilikan Surat Berharga Perbankan



Sumber: Reuters dan LBUT

Grafik 37 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan (FVTPL dan FVTOCI) per Tenor



Sumber: LBUT

Tabel 22 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan berdasarkan Kategori

Kategori SSB	Nominal SSB (Rp T)		Porsi SSB (%)			
	Mar-24	Des-24	Mar-25	Mar-24	Des-24	Mar-25
FVTOCI	1.028,26	1.055,26	1.013,25	47,50%	47,48%	44,90%
FVTPL	199,62	226,19	263,54	9,22%	10,18%	11,68%
AC	936,83	941,17	979,83	43,28%	42,35%	43,42%
Total Industri	2.164,72	2.222,62	2.256,62	100%	100%	100%

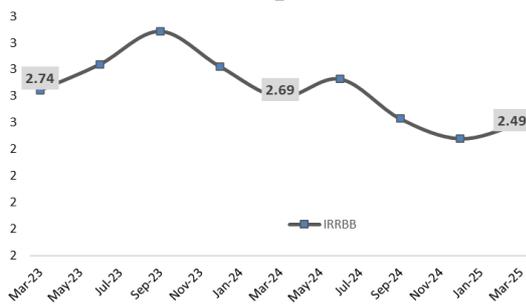
Sumber: LBUT

Risiko suku bunga yang berasal dari portofolio *banking book* juga masih terjaga

tecermin dari *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB) yang berada pada level rendah yaitu sebesar 2,49%, menurun

dari tahun sebelumnya sebesar 2,69%. Penurunan IRRBB didorong oleh kewajiban dengan suku bunga tetap jangka panjang yang melambat sebesar 4,22% (yoy) (tahun lalu tumbuh 5,02%, yoy) utamanya karena turunnya pinjaman yang diterima dan simpanan berjangka. Di sisi lain, aset dengan suku bunga tetap jangka panjang tumbuh tinggi 12,64% (yoy), melampaui pertumbuhan tahun lalu yang tumbuh 6,99% (yoy), utamanya didorong oleh pertumbuhan kredit. Sementara itu, aset jangka panjang dalam bentuk surat berharga yang dimiliki oleh perbankan turun sebesar -11,96% (yoy) lebih rendah dari tahun sebelumnya yang berkontraksi -5,55% (yoy).

Grafik 38 Perkembangan Parameter IRRBB



Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK

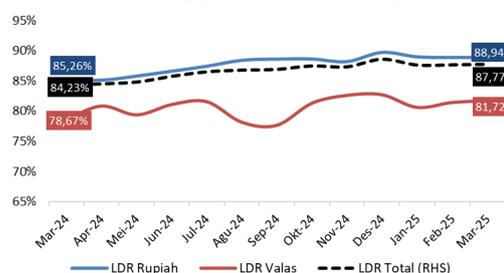
3. Risiko Likuiditas

Pada periode laporan, kondisi likuiditas perbankan masih relatif memadai di tengah tumbuhnya penyaluran kredit. Hal ini tercermin dari rasio LDR yang masih terjaga berada dalam *range* (78%-92%). Kemampuan likuiditas bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek juga tetap terjaga, tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masih berada jauh di atas *threshold*, rasio *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) di atas 100%, serta kemampuan bank dalam mengelola dana stabil atau *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang masih

berada di atas *threshold* (100%). Selain itu, dalam hal pemenuhan kondisi likuiditas untuk jangka pendek, perlu diperhatikan adanya kenaikan volume transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) yang juga diiringi dengan kenaikan suku bunga yang dapat mengindikasikan adanya kebutuhan dana yang bersifat *short-term* oleh bank.

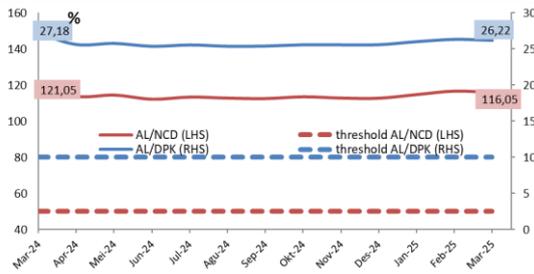
LDR perbankan tercatat sebesar 87,77%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 84,23%. Peningkatan LDR didorong oleh naiknya LDR rupiah menjadi 88,94% dari tahun sebelumnya sebesar 85,26%. Selain itu, rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing masih terjaga sebesar 116,05% dan 26,22%, jauh di atas *threshold* (masing-masing sebesar 50% dan 10%), walaupun menurun dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 121,05% dan 27,18%. Penurunan antara lain dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK dan *Non Core Deposit* (NCD) yang melampaui pertumbuhan alat likuid, tercatat pada Maret 2025 masing-masing tumbuh sebesar 4,75% (yoy) dan 5,38% (yoy). Alat likuid per Maret 2025 hanya tumbuh sebesar 1,03% (yoy), sedikit lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,02% (yoy).

Grafik 39 LDR berdasarkan Valuta



Sumber: LBUT

Grafik 40 AL/NCD dan AL/DPK



Sumber: Bank Indonesia

Selanjutnya, untuk mengantisipasi penarikan dana dalam jangka pendek (30 hari ke depan), likuiditas perbankan masih terpantau memadai. Hal tersebut tecermin dari LCR perbankan yang berada jauh di atas 100% yaitu sebesar 204,77% meskipun menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 218,63%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh *Net Cash Outflow* (NCO) yang tumbuh sebesar 8,96% (yoy) melampaui *High Quality Liquid Asset* (HQLA) yang tumbuh sebesar 2,06% (yoy).

Tabel 23 Perkembangan LCR Perbankan

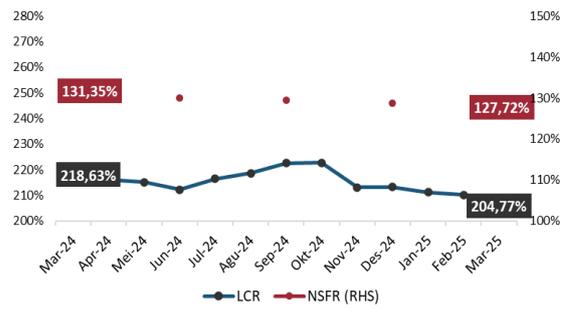
Kelompok	HQLA (Rp T)		
	Mar-24	Des-24	Mar-25
KBMI 1	272	331	322
KBMI 2	499	510	610
KBMI 3	678	659	645
KBMI 4	1.396	1.243	1.327
TOTAL HQLA	2.846	2.743	2.905

Kelompok	NCO (Rp T)		
	Mar-24	Des-24	Mar-25
KBMI 1	118	141	150
KBMI 2	191	193	250
KBMI 3	282	272	276
KBMI 4	710	680	743
TOTAL NCO	1.302	1.286	1.418

Kelompok	LCR (%)		
	Mar-24	Des-24	Mar-25
KBMI 1	229,95	235,18	214,05
KBMI 2	261,91	264,71	244,60
KBMI 3	240,23	241,76	233,87
KBMI 4	196,56	182,67	178,70
LCR Industri	218,63	213,23	204,77

Sumber: OJK

Grafik 41 Perkembangan LCR dan NSFR

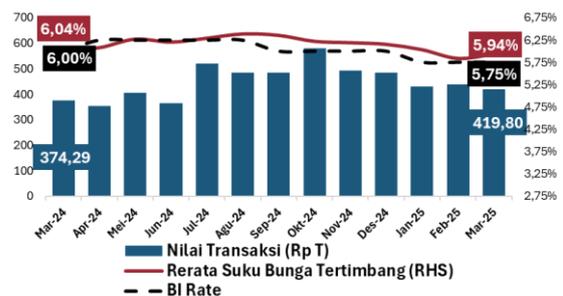


Sumber: APOLO

Lebih lanjut, kemampuan bank dalam memelihara pendanaan yang stabil juga masih memadai, tecermin dari rasio pendanaan stabil bersih atau NSFR yang terjaga pada level 127,72%, meski menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 131,35%.

Untuk memenuhi kondisi likuiditas jangka pendek, bank juga dapat meminjam dan/atau menyalurkan dana melalui PUAB. Akses bank terhadap sumber likuiditas di PUAB masih cukup terjaga, dengan volume transaksi yang meningkat diiringi suku bunga rata-rata tertimbang yang menurun. Penurunan suku bunga PUAB terjadi seiring dengan suku bunga acuan *BI Rate* yang turun sebesar 25 bps dari tahun sebelumnya yaitu berada di level 5,75%. Selain itu, meningkatnya volume transaksi PUAB juga antara lain dapat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk pemenuhan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) BI.

Grafik 42 Perkembangan Suku Bunga PUAB



Sumber: LBUT Harian

4. Risiko Hukum

4.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Selama triwulan I-2025, terdapat tujuh Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang terjadi di empat Kantor Bank (KB) yang diterima dari satuan kerja pengawasan Bank. Selanjutnya terhadap PKP yang telah diterima pada Triwulan I maupun pada periode sebelumnya, sebanyak tiga KB dengan tujuh PKP masih diproses dan dua PKP pada dua KB telah dilimpahkan untuk penanganan lebih lanjut kepada Satuan Kerja Penyidikan.

Selain itu, dalam rangka melakukan pendalaman terhadap indikasi penyimpangan ketentuan perbankan yang ditemukan oleh Satuan Kerja Pengawasan Bank, selama Triwulan I-2025 telah dilaksanakan Pemeriksaan Khusus Indikasi Penyimpangan Ketentuan Perbankan (Riksus IPKP) bersama Pengawas terhadap tiga KB.

Tabel 24 Statistik Penanganan Penyimpangan Ketentuan Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan I-2025	
	Total	
	KB	PKP
1. PKP yang diterima	4	7
2. PKP dalam proses *)	3	7
3. PKP yang dikembalikan *)	-	-
4. PKP yang dilimpahkan kepada Penyidik OJK *)	2	2

*) Termasuk *carryover* PKP yang diterima dari periode sebelumnya

Sumber: OJK

4.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), selama triwulan I-2025 telah memberikan keterangan Ahli dan/atau Saksi sebanyak satu kali dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait tindak pidana perbankan. Pemberian keterangan tersebut terdiri dari satu permintaan dari Polri.

Tabel 25 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

No.	APH	Permintaan		
		Ahli	Saksi	Total
1	Polri	1	0	1
2	Kejaksaan RI	0	0	0
3	Penyidik OJK	0	0	0
Total		1	0	1

Sumber: OJK

Keterangan Ahli yang diberikan mencakup kasus-kasus yang ditangani oleh OJK maupun kasus yang dilaporkan oleh bank atau pihak lainnya kepada Polri dan Kejaksaan. Pemberian keterangan ini dilakukan berdasarkan kompetensi dalam bidang perbankan dan pengawasan bank, serta pengalaman pegawai dalam menangani dugaan tipibank. Adapun keterangan Saksi diberikan atas permintaan Kejaksaan terkait kasus yang tengah dalam proses persidangan, yang sebelumnya telah ditangani oleh OJK.

5 Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

5 Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Pada periode laporan, OJK menerbitkan dua ketentuan terkait perbankan yaitu dalam bentuk satu POJK dan satu SEOJK. Secara umum, ketentuan-ketentuan tersebut mengatur tentang Laporan Bank Umum sebagai Kustodian serta Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat. OJK juga menyampaikan kepada bank terkait dana DHE SDA dapat dijadikan agunan tunai sesuai ketentuan OJK, dengan kredit atau pembiayaan yang dijamin dana tersebut dikategorikan sebagai berkualitas lancar. Selain itu, Penempatan DHE SDA pada instrumen perbankan tidak dianggap sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK) dan tidak mempengaruhi likuiditas perbankan.

1. Pengaturan Perbankan

Pada triwulan I-2025, OJK menerbitkan dua ketentuan terkait perbankan, yaitu dalam bentuk satu Peraturan OJK dan satu Surat Edaran OJK (SEOJK), serta satu Surat KEPP sebagai berikut:

1.1 POJK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian

Seiring dengan perkembangan dan kompleksitas bisnis di industri jasa keuangan, terdapat irisan kelembagaan maupun proses bisnis lintas sektor, seperti bidang sektor pengawasan perbankan beririsan dengan sektor pengawasan pasar modal maupun dengan sektor pengawasan perasuransian. Hal tersebut berpotensi menimbulkan adanya ketentuan pengaturan yang juga beririsan di antara bidang sektor pengawasan, salah satunya pengaturan terkait pelaporan Bank Kustodian.

Berkaitan dengan hal tersebut, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian yang merupakan salah satu

bentuk integrasi pelaporan Bank Umum sebagai Kustodian (Bank Kustodian) pada 27 Maret 2025.

Dalam POJK ini diatur tentang mekanisme penyampaian laporan (berkala dan/atau insidental) bagi Bank Kustodian di bawah pengawasan bidang perbankan antara lain:

- 1) Kewajiban Bank Kustodian dalam menyampaikan laporan berkala dan/atau laporan insidental, serta jenis laporan berkala dan/atau laporan insidental Bank Kustodian;
- 2) Tata cara penyampaian laporan berkala dan/atau laporan insidental Bank Kustodian, termasuk koreksi atas laporan berkala dan/atau laporan insidental Bank Kustodian;
- 3) Pengawasan atas laporan berkala dan/atau laporan insidental Bank Kustodian.

1.2 SEOJK Nomor 2/SEOJK.03/2025 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat

OJK menerbitkan penyempurnaan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat dalam rangka penyesuaian dengan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu, POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat, dan SEOJK Nomor 21 Tahun 2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Penyempurnaan ketentuan pelaksanaan tersebut antara lain terkait dengan diperkenalkannya BPR memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah serta penyertaan modal, konsekuensi atas agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai, pemberlakuan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perubahan mekanisme setoran modal. SEOJK ini memberikan penjelasan lebih lanjut antara lain mengenai komponen permodalan, perhitungan aset tertimbang menurut risiko, tata cara perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) dan rasio modal inti minimum, serta tata cara permohonan persetujuan dan penyampaian laporan terkait permodalan. Perhitungan rasio KPM dan rasio modal inti minimum sesuai dengan ketentuan dalam SEOJK pertama kali berlaku untuk posisi bulan Maret 2025.

1.3 Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP)

Pada triwulan I-2025, OJK juga menerbitkan satu Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK, yaitu:

Surat KEPP Nomor S-4/D.03/2025 tentang Dukungan Perbankan dalam rangka Implementasi PP Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Surat KEPP ini merupakan salah satu bentuk dukungan OJK terhadap kebijakan yang diatur dalam PP DHE SDA dan mendorong perbankan untuk melaksanakan perannya dalam implementasi PP dimaksud secara optimal.

PP ini mewajibkan eksportir dengan nilai ekspor minimal USD250.000 untuk menempatkan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) ke dalam sistem keuangan Indonesia. Besaran dan jangka waktu penempatan bervariasi, yakni minimal 30% selama 3 bulan untuk sektor pertambangan migas dan 100% selama 12 bulan untuk sektor pertambangan non-migas, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Penempatan ini dapat dilakukan melalui rekening khusus di LPEI atau bank devisa, serta instrumen keuangan yang diterbitkan perbankan, LPEI, atau Bank Indonesia.

Bagi perbankan, dana DHE SDA dapat dijadikan agunan tunai sesuai ketentuan OJK, dengan kredit atau pembiayaan yang dijamin dana tersebut dikategorikan sebagai berkualitas lancar. Selain itu, penyediaan dana yang dijamin DHE SDA dapat

dikecualikan dari perhitungan BMPK/BMPD. Penempatan DHE SDA pada instrumen perbankan tidak dianggap sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK) dan tidak mempengaruhi likuiditas perbankan. Jika ditempatkan pada instrumen Bank Indonesia, statusnya hanya sebagai titipan dan tidak berdampak pada rasio prudensial seperti LCR, NSFR, KPMM, CEMA, BMPK/BMPD, serta kualitas aset, selama tidak ada eksposur risiko.

2. Kelembagaan Perbankan

2.1 Bank Umum Konvensional (BUK)

2.1.1 Perizinan

Pada triwulan I-2025, telah diselesaikan 9 (sembilan) Perizinan Kelembagaan BUK, terdiri dari 3 (tiga) perizinan pembukaan Kantor Cabang, 2 (dua) perizinan penutupan Kantor Cabang, 3 (tiga) perizinan penutupan Kantor Wilayah dan 1 (satu) perizinan Perubahan Status Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang.

2.1.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan I-2025, terdapat 113.788 jaringan kantor BUK, terdiri dari 113.722 jaringan kantor di dalam negeri dan 66 jaringan kantor di luar negeri. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM) sebanyak 89.941 unit.

Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat pengurangan sebanyak 205 jaringan kantor, terutama pada Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) dan terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM) yang masing-masing turun sebesar 171 unit dan 81 unit menjadi 18.599 unit Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) dan 89.941 unit terminal perbankan elektronik pada triwulan – I 2025. Penurunan tersebut merupakan bagian dari strategi bisnis masing-masing bank dalam merespons perubahan perilaku dan ekspektasi nasabah yang kini lebih memilih layanan perbankan digital.

Tabel 26 Jaringan Kantor BUK

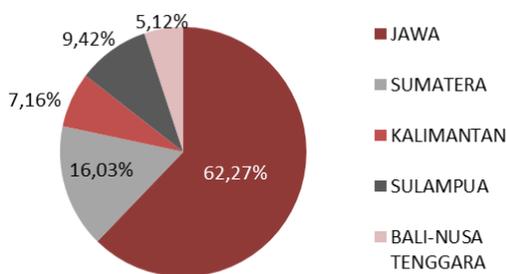
JARINGAN KANTOR		2024 TW IV	2025 TW I	Δ
1	Kantor Pusat Operasional	37	37	-
2	Kantor Pusat Non Operasional	53	53	-
3	Kantor Cabang dari bank yang berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN)	7	7	-
4	Unit Usaha Syariah	19	19	-
5	Kantor Wilayah	152	149	(3)
6	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.697	2.699	2
7	Kantor Cabang (Luar Negeri)	17	17	-
8	Kantor Cabang Pembantu dari bank yang berkedudukan di Luar Negeri	19	19	-
9	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	18.770	18.599	(171)
10	Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	6	6	-
11	Kantor Fungsional (KF)	1.217	1.221	4
12	Kantor dibawah KCP KCBLN yg tidak termasuk KF	9	9	-
13	Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	6	6	-
14	Terminal Perbankan Elektronik (ATM/CDM/CRM)	90.022	89.941	(81)
JARINGAN KANTOR UUS				
15	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	155	156	1
16	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	229	235	6
17	Kantor Kas	-	-	-
18	Kantor Fungsional	187	194	7
19	Payment Point	-	-	-
20	Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	-	-	-
21	Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM)	169	197	28
22	Layanan Syariah Bank Umum	222	222	-
TOTAL		113.993	113.788	(205)

Sumber: APOLO OJK

Ket: merupakan jaringan kantor BUK di seluruh Indonesia

Berdasarkan pembagian wilayah untuk jaringan kantor BUK di dalam negeri, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa sejumlah 70.815 jaringan kantor (62,27%), diikuti pulau Sumatera 18.233 (16,03%), Sulampua 10.717 (9,42%), Kalimantan 8.138 (7,16%), dan Bali-Nusa Tenggara 5.819 (5,12%). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penurunan jaringan kantor pada seluruh wilayah dengan penurunan terbanyak di wilayah Jawa dan Sumatera.

Grafik 43 Penyebaran Jaringan Kantor BUK



Sumber: APOLO OJK

2.2 Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

2.2.1 Perizinan

Pada triwulan I-2025, terdapat empat permohonan penggabungan yang telah diselesaikan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Persetujuan penggabungan BPR, yaitu pada:
 - a. PT BPR Karunia Dewata ke dalam PT BPR Saudaraku
 - b. PT BPR Ukabima Mitra Dana, PT BPR Ukabima Permata, PT BPR Ukabima Grazia, PT BPR Ukabima BMMS, PT BPR Ukabima Nindya Raharja, PT BPR Ukabima Khatulistiwa dan PT BPR Ukabima Prima ke dalam PT BPR Ukabima Lestari.

- c. PT BPR Celebes Mitra Perdana dan PT BPR Sulawesi Karya Sentosa ke dalam PT BPR Sulawesi Mandiri.
- d. PT BPR Kabalong Abdi Swadaya ke dalam PT BPR Wiranadi.

2.2.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan I-2025, terdapat 1.345 BPR dengan 8.313 jaringan kantor. Dari jaringan kantor tersebut, 5.928 di antaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Terdapat perbedaan data perubahan jumlah BPR dengan data perizinan disebabkan antara lain terdapat perbedaan antara periode perizinan dengan periode efektif berlakunya perizinan karena adanya masa proses transisi, termasuk *carry over* hasil perizinan periode sebelumnya.

Tabel 27 Jaringan Kantor BPR

JARINGAN KANTOR	2024 TW IV	2025 TW I	Δ
- Kantor Pusat (KP)	1.356	1.345	(11)
- Kantor Cabang (KC)	1.947	1.955	8
- Kantor Kas (KK)	2.579	2.628	49
- ATM	542	499	(43)
- EDC	1.920	1.886	(34)
TOTAL	8.344	8.313	(31)

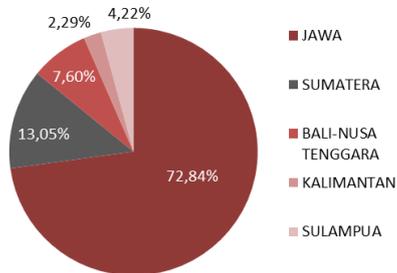
Sumber: OJK

Selain itu, terdapat perubahan mengenai jaringan kantor sehubungan dengan ketentuan pelaporan terbaru bagi BPR dan BPRS yang mengatur di dalamnya terkait informasi jenis jaringan kantor, termasuk ATM dan EDC.

Berdasarkan lokasi, penyebaran jaringan kantor BPR (termasuk ATM dan EDC) masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 72,84% (6.055 jaringan kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 13,05% (1.085 jaringan kantor). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penurunan jaringan kantor hampir di seluruh

wilayah Indonesia dengan terbanyak di wilayah Sumatera dan diikuti oleh wilayah Kalimantan.

Grafik 44 Penyebaran Jaringan Kantor BPR



Sumber: OJK

2.2.3 Tata Kelola

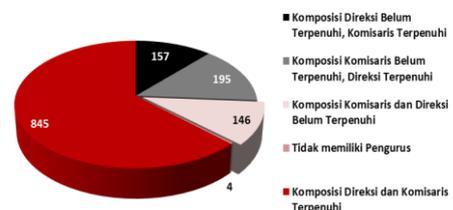
Penerapan tata kelola BPR dan BPRS diatur dalam masing-masing POJK Nomor 4/POJK.03/2015 (BPR) dan POJK Nomor 24/POJK.03/2018 (BPRS) dan dibedakan sesuai besaran modal inti. Besaran modal inti BPR dan BPRS akan menentukan antara lain syarat pemenuhan minimal jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan jumlah DPS.

Selain itu, OJK juga telah menerbitkan POJK Nomor 9 Tahun 2024 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS guna menyempurnakan dua POJK sebelumnya serta mulai efektif digunakan per tanggal 1 Juli 2024.

Sampai dengan Maret 2025, terdapat 845 BPR yang sudah memenuhi masing-masing jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sementara itu, masih terdapat 150 BPR yang belum memenuhi komposisi anggota Direksi ataupun Komisaris dengan rincian 146 BPR yang belum memenuhi jumlah anggota keduanya untuk Direksi dan Dewan Komisaris sesuai persyaratan serta 4 BPR yang belum memiliki susunan kepengurusan. Tantangan dalam

pemenuhan Direksi dan Dewan Komisaris BPR umumnya dipengaruhi oleh faktor lokasi BPR yang berada di *remote area*, persaingan remunerasi dengan LJK lain, serta keterbatasan SDM yang memiliki persyaratan minimal pengalaman dan sertifikasi profesi sebagaimana dipersyaratkan ketentuan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola BPR, OJK juga secara aktif melakukan sosialisasi kepada BPR.

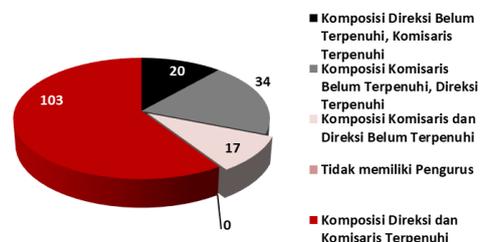
Grafik 45 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Sumber: OJK

Untuk BPRS, sampai dengan Maret 2025, terdapat 103 BPRS yang sudah memenuhi masing-masing jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sementara itu, masih terdapat 17 BPRS yang belum memenuhi jumlah anggota keduanya untuk Direksi dan Dewan Komisaris sesuai persyaratan.

Grafik 46 Jumlah BPRS berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Sumber: OJK

2.3 Perbankan Syariah

2.3.1 Perizinan

Pada triwulan I-2025, tidak terdapat proses perizinan kelembagaan untuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)

2.3.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan I-2025, terdapat 11.381 jaringan kantor BUS, dengan tiga di antaranya merupakan jaringan kantor luar negeri (dua KC dan satu terminal elektronik). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, secara total terdapat peningkatan sebanyak 68 jaringan kantor BUS, dengan peningkatan terbesar yaitu pada terminal elektronik dan Kantor Fungsional Bank Umum Syariah.

Tabel 28 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah

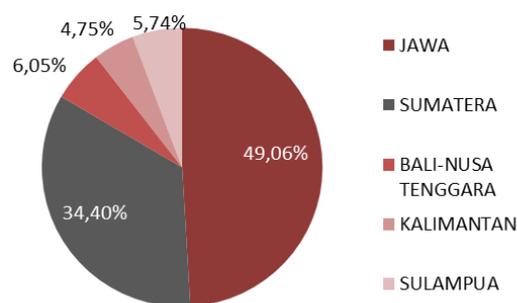
JARINGAN KANTOR	2024	2025	Δ
	TW IV	TW I	
1 Kantor Pusat Operasional Bank Umum Syariah	7	7	-
2 Kantor Pusat Non Operasional Bank Umum Syariah	8	8	-
3 Kantor Wilayah Bank Umum Syariah	21	21	-
4 Kantor Cabang (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	411	411	-
5 Kantor Cabang (Luar Negeri) Bank Umum Syariah	2	2	-
6 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	1.574	1.571	(3)
7 Kantor Fungsional Bank Umum Syariah	1.891	1.894	3
8 Kantor Perwakilan Bank Umum Syariah di Luar Negeri	-	-	-
9 Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM) Bank Umum Syariah	7.399	7.467	68
Layanan Syariah Bank Umum	11.313	11.381	68

Sumber: APOLO OJK

Sebaran jaringan kantor BUS dalam negeri sebagian besar berada di wilayah Jawa dan Sumatera masing-masing memiliki porsi 49,06% (5.582 kantor) dan 34,40% (3.914 kantor). Selanjutnya diikuti Bali-Nusa Tenggara (6,05%, 688 kantor), Sulampua (5,74%, 653 kantor), dan Kalimantan (4,75%, 541 kantor).

Terdapat peningkatan jaringan kantor di seluruh wilayah, dengan peningkatan terbanyak pada wilayah Jawa dan Sulampua.

Grafik 47 Penyebaran Jaringan Kantor BUS



Sumber: APOLO OJK

Untuk BPRS, pada periode laporan terdapat 1.255 jaringan kantor, menurun 104 jaringan kantor dari triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, sebaran jaringan kantor BPRS umumnya terkonsentrasi di wilayah Jawa (67,73%, 850 kantor), diikuti Sumatera

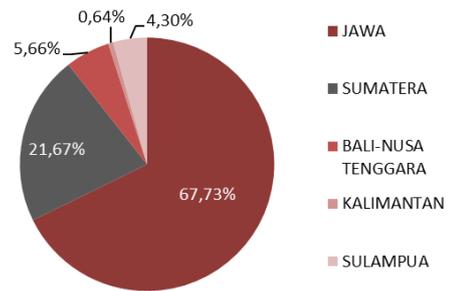
(21,67%, 272 kantor), Bali-Nusa Tenggara (5,66%, 71 kantor), Sulampua (4,30%, 54 kantor), dan Kalimantan (0,64%, 8 kantor).

Tabel 29 Jaringan Kantor BPRS

JARINGAN KANTOR	2024 TW IV	2025 TW I	Δ
- Kantor Pusat (KP)	174	174	-
- Kantor Cabang (KC)	223	224	1
- Kantor Kas (KK)	308	298	(10)
- ATM	118	84	(34)
- EDC	536	475	(61)
TOTAL	1.359	1.255	(104)

Sumber: Laporan Bulanan BPRS, diolah

Grafik 48 Penyebaran Jaringan Kantor BPRS



Sumber: OJK

Halaman ini sengaja dikosongkan

6 Koordinasi Antar Lembaga terkait Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

6 Koordinasi Antar Lembaga Terkait Perbankan

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK terus melakukan koordinasi dengan lembaga/otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pada triwulan I-2025, Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Indonesia tetap terjaga di tengah divergensi pertumbuhan ekonomi dunia serta fluktuasi pasar keuangan global yang meningkat. Selain itu, OJK juga turut aktif dalam fora internasional, antara lain *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)*, *Working Committee-ASEAN Banking Integration Framework (WC-ABIF)*, dan *Executives' Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP) Working Group on Banking Supervision (WGBS)*.

1. Koordinasi Multi-Lembaga dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), maka Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melakukan koordinasi secara berkala dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK).

Pada Kamis, 17 April 2025, Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner LPS melaksanakan Rapat Berkala KSSK II tahun 2025. Dalam siaran Pers KSSK tersebut dapat disimpulkan bahwa, **Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada triwulan I-2025 tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian**

perekonomian dan pasar keuangan global. OJK bersama dengan KSSK menyepakati untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi dan kebijakan lembaga-lembaga anggota KSSK, dalam upaya memitigasi potensi dampak rambatan faktor-faktor risiko global sekaligus memperkuat perekonomian dan sektor keuangan dalam negeri.

Sebagai respons terhadap meningkatnya volatilitas di pasar keuangan global yang berdampak terhadap dinamika pasar domestik, OJK terus mencermati perkembangan pasar saham domestik serta mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan guna menjaga stabilitas pasar. Adapun beberapa langkah kebijakan yang telah ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) menerbitkan kebijakan pelaksanaan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan atau *buyback* saham tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), melakukan penundaan implementasi pembiayaan transaksi *short selling* oleh Perusahaan Efek yang

- berlaku sampai dengan 6 bulan (September 2025), penyesuaian batasan *trading halt* pada saat penurunan IHSG yang signifikan, pemberlakuan *asymmetric auto rejection* saham, serta koordinasi erat dengan para *stakeholders*;
- 2) mendukung langkah strategis Pemerintah untuk melakukan negosiasi serta berkoordinasi dengan K/L terkait dalam mengambil kebijakan guna memitigasi dampak tarif resiprokal AS pada industri tertentu, terutama dampak terhadap perusahaan padat karya;
 - 3) mendukung implementasi kebijakan Pemerintah yaitu PP No. 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP No. 36 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA), dalam rangka meningkatkan cadangan devisa negara, terutama terkait aspek *compliance*;
 - 4) sebagaimana amanat UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK menerbitkan ketentuan terkait derivatif keuangan, tata pelaksanaan pungutan, dan lembaga sertifikasi profesi. Selain itu, OJK menerbitkan ketentuan terkait penyelenggaraan agregasi SJK di bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD), dan pengaturan terkait profesi penunjang di SJK, serta SEOJK mengenai kewajiban penyediaan modal inti minimum (KPMM) bagi BPR;
 - 5) memberikan persetujuan kegiatan usaha *bullion* bagi PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
 - 6) meluncurkan aplikasi Portal Data dan Metadata SJK Terintegrasi sebagai akses dan pusat informasi bagi masyarakat dan *stakeholders* terkait data di SJK; dan
 - 7) Sementara dari sisi perlindungan konsumen, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah melakukan langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat, di antaranya menerima 1.236 pengaduan terkait entitas ilegal, menghentikan 1.123 entitas pinjaman online ilegal dan 209 penawaran investasi ilegal, mengajukan pemblokiran terhadap 1.643 nomor kontak pihak penagih (*debt collector*) pinjaman *online* ilegal, serta menerima 79.969 laporan dengan jumlah rekening yang telah diblokir sebanyak 35.394 rekening, dengan total dana yang dilaporkan sebesar Rp1,7 triliun, dan total dana korban yang sudah diblokir sebanyak Rp134,7 miliar.

KSSK berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dan memperkuat *coordinated policy response* serta kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko yang dapat berdampak terhadap perekonomian dan SSK nasional. KSSK juga terlibat aktif di dalam penyusunan kebijakan dan langkah-langkah antisipasi dengan melibatkan berbagai *stakeholders* termasuk berkoordinasi dengan negara lain untuk mengatasi volatilitas pasar keuangan domestik sebagai dampak dari tereskalasinya

perang dagang. KSSK juga telah dan terus berkomitmen untuk mendukung sektor riil dan program Asta Cita Pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan Juli 2025.

2. Koordinasi Bilateral

2.1. OJK dan BI

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengamanatkan OJK dan BI untuk berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Lembaga. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UUP2SK) mengamanatkan bahwa OJK agar berkoordinasi dengan BI dan LPS, salah satunya dalam penetapan Bank Sistemik, yang bertujuan untuk mencegah krisis sistem keuangan di bidang perbankan. Amanat UU dimaksud ditindaklanjuti dengan Nota Kesepahaman (NK) antara Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisiner OJK.

Pada triwulan I-2025, OJK dan BI telah melakukan beberapa koordinasi antara lain terkait:

- 1) Keikutsertaan BI dalam *prudential meeting* rencana bisnis bank tahun 2025-2027;
- 2) Evaluasi pemeriksaan bank tahun 2024 dan rencana pemeriksaan bank pada tahun 2025;
- 3) Pengembangan skenario *joint stress test* dan pelaksanaan *workshop*;
- 4) Pemutakhiran daftar bank sistemik yang juga melibatkan LPS, serta pengkinian Petunjuk Pelaksanaan mengenai tata

cara kerja sama dan koordinasi dalam rangka penetapan dan pemutakhiran daftar bank sistemik;

- 5) Pembahasan isu-isu terkait pertukaran data terintegrasi yang juga melibatkan LPS;
- 6) Dukungan sektor perbankan terhadap implementasi ketentuan mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) yang juga melibatkan LPS;
- 7) Pembahasan terkait perizinan dan/atau persetujuan SJK terintegrasi dalam *Task Force* BI dan OJK;
- 8) Koordinasi dalam rangka penanganan insiden siber;
- 9) Pengembangan inovasi digital pada sistem pembayaran dan diskusi terkait aset kripto;
- 10) Kerja sama dalam penguatan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen; dan
- 11) Pembahasan dan penyampaian tanggapan tertulis dalam rangka penerbitan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh kedua lembaga.

2.2. OJK dan LPS

Sesuai dengan amanat UU PPKSK serta bentuk respons atas diterbitkannya UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), terdapat beberapa aspek kerjasama dan koordinasi antara OJK dan LPS yang memerlukan koordinasi yang lebih intensif sesuai dengan Nota Kesepahaman (NK) antara OJK dan LPS.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada triwulan I-2025 telah dilaksanakan beberapa koordinasi antara OJK dan LPS yaitu:

- 1) Integrasi laporan keuangan tahunan ke Apolo dan aplikasi e-Laporan LPS ke Portal Bersama (pelaporan.id);
- 2) Dukungan sektor perbankan terhadap implementasi ketentuan mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) yang juga melibatkan LPS;
- 3) Penyusunan rencana resolusi oleh bank umum;
- 4) Pertukaran data dan perkembangan kondisi bank umum maupun BPR/BPRS;
- 5) Persiapan dan pelaksanaan resolusi BPR/BPRS;
- 6) Pembahasan lanjutan rencana pengembangan sistem TI BPR/S oleh LPS; dan
- 7) Penyampaian tanggapan tertulis dalam rangka penerbitan rancangan peraturan perundang-undangan

OJK, BI, dan LPS juga melakukan koordinasi dalam hal pemutakhiran Bank Sistemik periode April 2025 s.d. September 2025. Selain itu OJK, BI, dan LPS telah menandatangani pengisian petunjuk pelaksanaan bersama BI, OJK, dan LPS mengenai forum integrasi pelaporan.

3. Partisipasi OJK dalam Fora Internasional

3.1. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)

OJK merupakan anggota BCBS dan terlibat aktif dalam berbagai pembahasan baik di BCBS Level 1 maupun Groups BCBS di Level 2 dan Level 3 yaitu *Supervisory Cooperation Group (SCG)*, *Policy and Standard Group (PSG)*, *Risk and Vulnerability Assessment Group (RVG)*, *Task Force on Climate-related Financial Risk (TCFR)*, *Accounting and Audit Expert Group (AAEG)*, dan *Financial and Technology Group (FTG)*. Pada Triwulan I-

2025, OJK aktif berpartisipasi dalam menghadiri berbagai pertemuan dan menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- 1) *BCBS Committee*
 Pertemuan *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)* pada bulan Maret 2025 secara virtual. Pada pertemuan ini dilakukan beberapa agenda pembahasan, sebagai berikut:
 - a) Program kerja *BCBS Committee 2025-2026* yang disusun berdasarkan 4 (empat) besaran tema, yaitu: *Basel III Implementation*, *Risk assessment and safeguarding resilience*, *Digitalisation of finance*, dan *Liquidity* terkait pembelajaran dari *2023 banking turmoil*. BCBS juga akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan isu *climate-related financial risks* dan bekerjasama dengan pihak eksternal, termasuk *standard-setting bodies* lainnya;
 - b) Implementasi Basel III: Sebagai bagian dari Program Penilaian Konsistensi Regulasi (*Regulatory Consistency Assessment Programme*), Komite telah meninjau dan menyetujui laporan penilaian atas implementasi Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) dan kerangka eksposur besar (*large exposures framework*) oleh Türkiye;
 - c) Intermediasi Keuangan Non-Bank: Sebagai bagian dari pekerjaan berkelanjutan untuk menilai keterkaitan bank dengan intermediasi keuangan non-bank (NBFI), Komite menyepakati untuk melakukan investigasi mendalam

mengenai transfer risiko sintetis (*Synthetic Risk Transfers/SRTs*) selama tahun mendatang. SRTs digunakan untuk mentransfer risiko kredit bank kepada entitas NBFIs, membantu bank dalam mengelola risiko dan/atau mengurangi persyaratan regulasi. Walaupun SRTs bukanlah produk keuangan yang baru, penggunaannya telah meningkat dan struktur transaksinya telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Investigasi ini bertujuan untuk menilai secara lebih baik manfaat dan risiko yang ditimbulkan oleh SRTs;

- d) *Global Banking Turmoil 2023*: BCBS membahas upayanya dalam mengembangkan pedoman untuk mendukung otoritas pengawas dalam pekerjaan sehari-hari, sebagai bagian dari upaya memperkuat efektivitas pengawasan berdasarkan pelajaran dari gejolak perbankan tahun 2023. Upaya ini mencakup pengawasan risiko likuiditas dan risiko suku bunga dalam pembukuan perbankan, penilaian keberlanjutan model bisnis bank, serta pentingnya penerapan penilaian pengawasan yang efektif. BCBS akan mempublikasikan pembaruan terkait hasil pekerjaan ini pada pertengahan tahun 2025;
- e) *Teknologi Informasi dan Komunikasi*: Sebagai bagian dari pekerjaan yang lebih luas terkait pengawasan ketahanan operasional, dan mengingat perkembangan lanskap teknologi serta meningkatnya insiden teknologi

informasi secara global, Komite menyepakati untuk menganalisis perkembangan terkini dan praktik global terkait manajemen risiko teknologi informasi dan komunikasi pada bank. Komite berencana untuk menerbitkan laporan praktik global yang merangkum temuan-temuannya pada tahun 2026;

- 2) OJK berpartisipasi aktif dalam pertemuan pada level 2 dan level 3 BCBS yaitu *Policy and Standard Group (PSG)*, *Supervisory Cooperation Group (SCG)*, *Risk and Vulnerabilities Group (RVG)*, dan *Financial and Technology Group (FTG)*, Partisipasi OJK di forum level 2 dan level 3 dilakukan dengan memberikan masukan dan tanggapan di level teknis atas *on going works* yang dilakukan oleh BCBS.

3.2. Executives' Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP) Working Group on Banking Supervision (WGBS)

OJK menghadiri pertemuan 19th Asia-Pacific High-level Meeting on Banking Supervision yang diselenggarakan oleh BCBS, the Financial Stability Institute (FSI) - the Bank for International Settlements (BIS), dan EMEAP WGBS. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan menjadi salah satu panelis pada topik terkait pengembangan pengawasan perbankan.

3.3. Working Committee - ASEAN Banking Integration Framework (WC-ABIF)

OJK telah menghadiri pertemuan WC-ABIF ke-17 pada 20 Februari 2025 di Penang, Malaysia. Pada pertemuan yang dipimpin oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dan

National Bank of Cambodia (NBC) selaku co-chair WC-ABIF 2024-2026, ASEAN Member States (AMS) membahas beberapa topik, yaitu antara lain:

- 1) Usulan *Annual Priorities* dan *Key Performance Indicator* WC-ABIF pada ASEAN Economic Community (AEC) 2026-2030, serta aktivitas yang akan berada di bawah tanggung jawab WC-ABIF;
- 2) Melanjutkan pembahasan terkait review ABIF *guidelines* agar sejalan dengan perkembangan saat ini, terutama pada aspek digitalisasi perbankan; dan
- 3) Penyusunan WC-ABIF *Learning Roadmap* 2026-2030, untuk mengembangkan kapasitas otoritas perbankan AMS terkait *emerging risks* di sektor perbankan.

4. Pengembangan Industri Perbankan

4.1 Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, kecerdasan artifisial (AI) telah menjadi teknologi yang semakin relevan dan umum digunakan, serta memiliki potensi besar untuk merevolusi berbagai industri. Salah satu sektor di mana AI dapat memberikan dampak signifikan adalah industri perbankan. Beberapa use case penggunaan AI di sektor ini antara lain untuk mendeteksi penipuan (*fraud detection*) dan menyediakan layanan yang dipersonalisasi bagi nasabah. Meskipun demikian, pemanfaatan kecerdasan artifisial juga diiringi dengan tantangan yang tidak ringan, seperti penyalahgunaan *deepfakes*, kurangnya transparansi algoritma (*black box*), bias dalam pengambilan keputusan,

kerentanan terhadap serangan siber, hingga persoalan etika dan kesiapan sumber daya manusia.

Dalam rangka menghadapi berbagai tantangan tersebut, OJK telah menyusun buku Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia sebagai wujud dukungan terhadap akselerasi transformasi digital sektor perbankan. Buku ini disusun berdasarkan berbagai referensi internasional maupun nasional, dengan menyesuaikan konteks kebutuhan dan pendekatan sektor perbankan Indonesia yang senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Tata kelola ini mengusung prinsip dasar kecerdasan artifisial yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nilai-nilai ini bersifat universal, namun diselaraskan dengan nilai dan norma yang berlaku di Indonesia, serta prinsip internasional, sehingga dapat menjadi acuan implementasi bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor perbankan

4.2 Pelaksanaan *Capacity Development* Bagi Industri Perbankan

Dalam rangka meningkatkan pemahaman industri perbankan dan pegawai internal OJK terkait perubahan iklim, risiko, dampak, upaya adaptasi dan mitigasi secara komprehensif, serta implementasi kerangka *climate risk stress testing* secara khusus, OJK kembali melaksanakan *capacity building* pada triwulan I tahun 2025 yang berjudul "Workshop Penerapan *Climate Risk Management and Scenario Analysis* (CRMS) bagi Bank KBMI 1 dan 2".

Capacity building ini dilaksanakan dalam 2 (dua) hari pada tanggal 12–13 Februari 2025, dalam rangka mendukung pelaksanaan *piloting* CRMS yang merupakan fase kedua bagi KBMI 3 dan 4 dan fase pertama bagi KBMI 1 dan 2. Dengan demikian, *capacity building* tersebut diharapkan dapat

mendukung peningkatan kapasitas bank KBMI 1 dan 2 yang pada tahun ini akan melakukan *piloting* CRMS dengan batas waktu pelaporan 31 Juli 2025.

Halaman ini sengaja dikosongkan

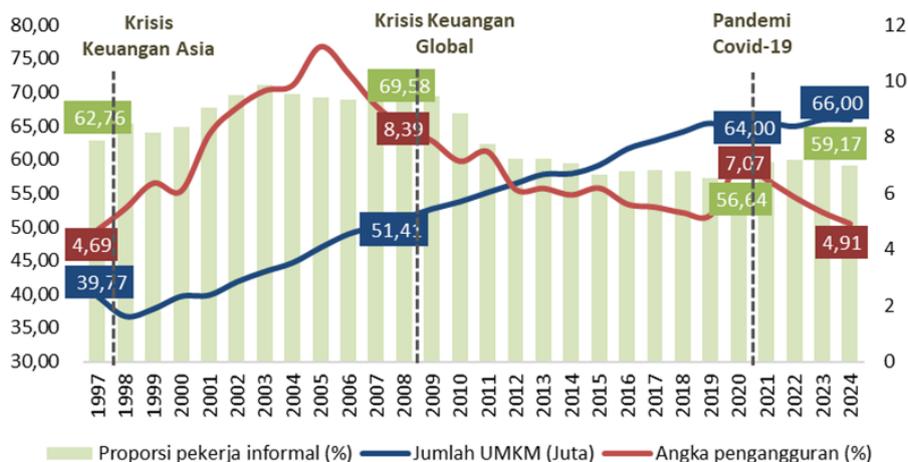
Kontribusi, Tantangan, dan Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia di Tengah Dinamika Ekonomi dan Geopolitik

Sektor UMKM telah lama dikenal sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di banyak negara, termasuk Indonesia. Keberadaan UMKM sangat vital bagi perekonomian karena kemampuannya menciptakan lapangan kerja yang luas. Hal ini secara langsung berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran dan peningkatan distribusi pendapatan masyarakat. Menurut data Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 117 juta pekerja atau hampir 97% dari total tenaga kerja pada tahun 2023. Bersamaan dengan itu, jumlah UMKM di Indonesia juga menunjukkan tren meningkat dari 64,2 juta unit usaha pada akhir 2024 menjadi 66 juta unit usaha per Mei 2025 berdasarkan data Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM).

UMKM pilar ketahanan ekonomi yang terbukti tangguh menghadapi berbagai tekanan serta menjadi penyangga utama lapangan kerja nasional di masa krisis....

Kemampuan UMKM untuk bertahan dan bahkan berkembang di tengah berbagai kondisi krisis dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional sudah tidak perlu diragukan lagi. Sejak krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an, krisis keuangan global 2008, hingga pandemi COVID-19 yang mengguncang dunia, UMKM terus menunjukkan ketangguhan dengan peningkatan jumlah unit usaha yang signifikan. Keunggulan UMKM terletak pada fleksibilitas model bisnis yang relatif sederhana dan mudah beradaptasi, sehingga lebih cepat melakukan penyesuaian operasional dengan dinamika pasar. Selain itu, kedekatan UMKM dengan pasar lokal dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan masyarakat membuatnya lebih tangguh dibandingkan perusahaan besar yang lebih rentan terpengaruh perubahan global. Kombinasi faktor-faktor ini menjadikan UMKM sebagai pilar penting dalam menjaga stabilitas dan ketahanan perekonomian nasional ketika menghadapi masa sulit, yang terbukti dari kemampuannya untuk terus beroperasi dan bahkan tumbuh ketika sektor lain mengalami kelesuan.

Grafik 1 – Perkembangan Jumlah UMKM, Proporsi Pekerja Informal, dan Angka Pengangguran Sejak Periode Krisis Keuangan Asia



Sumber: BPS dan Kementerian UMKM, diolah

Tren data menunjukkan bahwa meskipun angka pengangguran berfluktuasi dan cenderung meningkat saat terjadi tekanan ekonomi/krisis, namun demikian jumlah UMKM tetap meningkat secara konsisten, yaitu dari sekitar 39,77 juta unit usaha pada 1997 menjadi lebih dari 66 juta unit usaha pada 2024. Di sisi lain, proporsi pekerja informal relatif stabil di kisaran 60%, yang mengindikasikan bahwa UMKM berperan

sebagai penyerap tenaga kerja yang fleksibel dan mampu menampung angkatan kerja yang terdampak pengangguran. Stabilitas proporsi pekerja informal ini menunjukkan kemampuan UMKM untuk menyerap tenaga kerja secara signifikan meskipun tekanan ekonomi meningkat. Hal ini menegaskan peran UMKM tidak hanya sebagai sumber penghasilan alternatif, tetapi juga penyangga sosial-ekonomi yang membantu mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian ekonomi.

Scarring Effect Pandemi Covid-19 serta tekanan dinamika global memperberat permasalahan struktural sekaligus menghambat pemulihan UMKM Indonesia....

Meskipun UMKM menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dalam menghadapi tekanan ekonomi, sektor ini tetap mengalami dampak jangka panjang (*scarring effect*) dari Pandemi COVID-19, dan memperberat berbagai permasalahan struktural yang sebenarnya sudah muncul selama pandemi berlangsung. Banyak pelaku UMKM terdampak serius dan harus menutup usahanya sementara atau bahkan secara permanen. Hal ini tidak hanya menggerus modal usaha yang mereka miliki, tetapi juga menurunkan kepercayaan diri untuk bangkit kembali secara optimal. Di samping itu, gangguan pada rantai pasok membuat UMKM menghadapi kesulitan dalam pengadaan bahan baku serta pendistribusian produk ke pasar. Kesulitan ini kemudian diperparah oleh penurunan daya beli konsumen selama pandemi, yang secara langsung mengurangi permintaan produk dan jasa yang ditawarkan UMKM.

Tantangan lain yang cukup krusial bagi UMKM saat ini adalah kesulitan beradaptasi dengan percepatan transformasi digital, sebuah kebutuhan mendasar yang muncul sebagai respons terhadap perubahan lanskap bisnis global dan domestik. Tidak hanya itu, dinamika global turut memberikan tekanan signifikan bagi keberlangsungan UMKM. Ketegangan geopolitik yang masih berlanjut di berbagai wilayah dunia ditambah dengan kenaikan suku bunga untuk mengendalikan inflasi berkontribusi pada volatilitas harga bahan baku dan kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut secara langsung menekan margin keuntungan UMKM, yang pada akhirnya memengaruhi kelangsungan usaha serta kemampuannya dalam melakukan investasi untuk pengembangan bisnis. Sementara itu, UMKM juga masih harus menghadapi masalah struktural yang membatasi kemampuannya di tengah persaingan global yang semakin ketat.

1. **Ketergantungan tinggi pada pasar lokal dan rantai pasok kurang terdiversifikasi**, sehingga lebih rentan terhadap fluktuasi permintaan. UMKM rentan merasakan dampak signifikan ketika terjadi perubahan atau gangguan di pasar domestik seperti penurunan daya beli konsumen, perubahan tren konsumsi, atau gangguan distribusi. Selain itu, rantai pasok yang terbatas membuat UMKM kesulitan mencari alternatif sumber bahan baku atau produk pengganti saat terjadi gangguan, sehingga operasional usaha dapat terganggu.
2. **Keterbatasan berinovasi**, menjadi hambatan utama bagi UMKM untuk bersaing secara efektif karena tanpa pengembangan produk dan proses yang berkelanjutan, sehingga UMKM sulit untuk bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki skala produksi dan jaringan distribusi yang lebih luas.
 - a. Indonesia menempati posisi ke-54 dari 133 negara dari hasil survei Global Innovation Index (GII) 2024, The World Intellectual Property Organization (WIPO). Sebagai informasi, GII dibuat oleh Badan Dunia di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yaitu WIPO untuk mengukur capaian inovasi dan ekonomi suatu wilayah.
 - b. Pelaku usaha Indonesia dinilai masih minim inovasi dalam berbisnis sehingga perkembangan usahanya cenderung lambat dan kurang bisa bersaing. Hal ini terlihat dari peringkat Indonesia dalam aspek inovasi input pada posisi ke-54 dan inovasi output pada posisi ke-67 dari 133 negara.
3. **Kemampuan beradaptasi dengan teknologi dan digitalisasi rendah**, membatasi kemampuan UMKM dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pangsa pasar melalui platform digital, dan mengakses informasi penting untuk pengambilan keputusan bisnis.
 - a. Hingga akhir tahun 2024, jumlah UMKM yang masuk ke ekosistem digital di Indonesia dan terdaftar di Sistem Informasi Data Tunggal untuk UMKM (SIDT-UMKM) hanya berkisar 30,18 juta per 31 Desember 2024.

- b. Berdasarkan lapangan usaha, jumlah UMKM yang paling banyak terdaftar dalam SIDT-UMKM terkonsentrasi pada sektor:
 - 1) perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebanyak 14,43 juta unit usaha (47,81%).
 - 2) penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebanyak 6,40 juta unit usaha (21,20%).
 - 3) industri pengolahan sebanyak 4,16 juta unit usaha (13,78%).
- 4. **Ketimpangan pengembangan antar wilayah**, menjadi masalah multidimensi yang dapat menghambat pemerataan pertumbuhan UMKM secara nasional.
 - a. Pembangunan di Indonesia masih menghadapi kesenjangan yang signifikan. Ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik demografi, geografi, dan sosial ekonomi antar pulau dan provinsi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi di wilayah industri seperti Pulau Jawa turut memperlebar kesenjangan dengan daerah-daerah lain yang masih tertinggal.
 - b. UMKM lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan dengan mayoritas terkonsentrasi di Pulau Jawa (>60%). Urutan sebaran UMKM terbesar di Pulau Jawa adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (data BPS, diolah).
 - c. Adapun UMKM di daerah-daerah tertinggal seringkali menghadapi akses yang lebih terbatas terhadap fasilitas pendukung seperti pelatihan, infrastruktur, dan layanan keuangan.
- 5. **Kesulitan mengakses pembiayaan formal**, terutama dari lembaga keuangan resmi karena kurangnya agunan, riwayat kredit yang tidak tercatat, serta proses administrasi yang rumit. Keterbatasan modal ini membatasi kapasitas UMKM dalam mengembangkan usaha, melakukan investasi teknologi, dan memperbesar kapasitas produksi.
 - a. Terdapat tren peningkatan kesenjangan yang lebar antara permintaan dan suplai pembiayaan UMKM. Kajian Ernst and Young (EY) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memperkirakan proyeksi kebutuhan pembiayaan akan mencapai Rp4.300 triliun pada tahun 2026, sedangkan prediksi suplai yang tersedia hanya Rp1.900 triliun.
 - b. Kajian OJK dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro 2024-2028 menunjukkan bahwa sekitar 47% kebutuhan pembiayaan UMKM belum dapat terlayani oleh sektor lembaga jasa keuangan. Adapun perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) hanya dapat memenuhi 53% dari kebutuhan pembiayaan.
- 6. **Tekanan persaingan global**, menjadi realitas yang tak terhindarkan bagi UMKM. Pangsa pasar UMKM terhadap ekspor nasional relatif terbatas yaitu hanya sekitar 15,7% atau 10,3 juta UMKM yang telah berhasil melakukan ekspor. Angka ini masih tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand (29,5%) dan Filipina (20%). Hal ini dikarenakan mayoritas pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam menembus pasar global, antara lain:
 - a. Produk-produk dari negara lain seperti Tiongkok dan Vietnam seringkali lebih murah karena memiliki kapasitas produk yang lebih besar.
 - b. Banyak pelaku UMKM terhambat oleh persyaratan dokumen penting untuk mengekspor produknya, seperti: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), serta izin ekspor-impor yang diwajibkan oleh negara tujuan ekspor.
 - c. Minimnya kesadaran akan pentingnya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk melindungi produk UMKM agar tidak mudah ditiru atau diklaim oleh pihak lain di pasar global.
 - d. Standarisasi mutu dan sertifikasi produk belum dapat memenuhi persyaratan teknis di negara tujuan ekspor. Beberapa negara tujuan ekspor memiliki regulasi ketat mengenai kualitas produk, keamanan pangan, dan sertifikasi tertentu.
 - e. Masalah logistik terutama bagi pelaku UMKM yang belum cukup berpengalaman dalam pengiriman produk ke pasar global. Proses pengiriman yang memakan waktu lama atau biaya tinggi berpotensi menurunkan daya saing produk UMKM di Tingkat global.

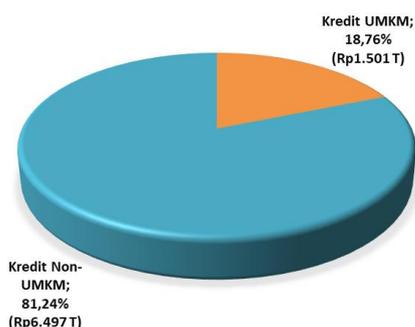
- f. Perbedaan mata uang, fluktuasi nilai tukar, serta risiko keterlambatan pembayaran dari pembeli luar negeri menjadi kendala bagi UMKM yang belum familiar dengan mekanisme pembayaran lintas negara. Banyak UMKM masih kurang memahami metode pembayaran ekspor impor yang lebih aman, seperti *Letter of Credit (L/C)* atau *escrow services*.

Akibat akumulasi berbagai tekanan ini, proses pemulihan UMKM menjadi berjalan lambat dan tidak merata di berbagai daerah, sehingga menjadi beban tersendiri yang dapat menghambat pertumbuhan sektor UMKM dalam jangka panjang.

Resiliensi UMKM berkaitan erat dengan peran strategis perbankan dalam menyediakan akses pembiayaan sekaligus menjaga risiko kredit tetap terkendali di tengah berbagai tantangan ekonomi....

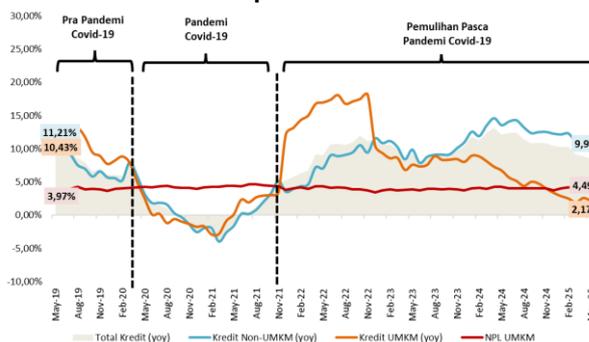
Sebagai lembaga intermediasi keuangan, perbankan memegang peran strategis dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Dukungan perbankan untuk UMKM diwujudkan melalui berbagai produk pembiayaan, termasuk KUR, yang merupakan program Pemerintah untuk meningkatkan akses modal kerja dan investasi bagi pelaku UMKM. Penyaluran KUR dilakukan melalui perbankan dengan pola penjaminan yang bertujuan untuk memberikan jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur, sehingga memudahkan pelaku UMKM dalam memperoleh pembiayaan. Selain produk pembiayaan konvensional, perbankan juga menyediakan layanan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM, termasuk melalui metode non-konvensional seperti skema *digital lending*, dengan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dan memperluas akses pembiayaan.

Diagram 1 – Porsi Penyaluran Kredit Perbankan kepada UMKM per Mei 2025



Sumber: LBUT, Mei 2025, diolah

Grafik 2 – Tren Pertumbuhan Kredit Perbankan kepada UMKM



Sumber: LBUT, Mei 2025, diolah

Pada akhir Mei 2025, porsi penyaluran kredit perbankan kepada sektor UMKM mencapai 18,76% atau senilai Rp1.501 triliun dari total kredit yang disalurkan. Tren pertumbuhan kredit UMKM terbilang relatif tinggi dan bahkan sempat melampaui pertumbuhan kredit Non-UMKM pada periode Pra Pandemi Covid-19. Namun, selama Pandemi Covid-19, kredit UMKM mengalami kontraksi akibat ketidakpastian ekonomi yang membuat Bank lebih selektif dalam menyalurkan kredit, terutama kepada UMKM yang dianggap memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi. Setelah masa kontraksi tersebut, pertumbuhan kredit UMKM mengalami *rebound* tajam dan sempat mencapai puncak di atas 15-18% pada pertengahan 2022. Meski demikian, setelah itu pertumbuhan kredit UMKM kembali menurun secara bertahap walaupun tidak sampai berkontraksi kembali mengindikasikan Bank masih harus fokus pada pemulihan kualitas kredit dibandingkan ekspansi.

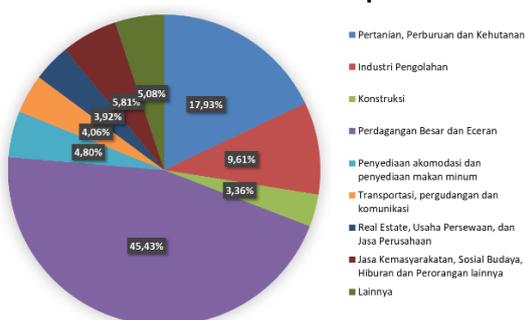
Sementara itu, dari sisi risiko kredit, terlihat bahwa tingkat NPL UMKM relatif terjaga dan stabil di bawah 5% sepanjang periode pengamatan. Pada awal periode (Mei 2019), NPL UMKM tercatat sebesar 3,97% dan mengalami sedikit kenaikan, namun hingga Mei 2025 masih berada di kisaran 4,49%. Kenaikan ini tergolong moderat dan tidak mengindikasikan lonjakan risiko yang mengkhawatirkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun UMKM rentan terhadap guncangan ekonomi selama periode Pandemi Covid-19 hingga masa pemulihan, akan tetapi perbankan mampu menjaga kualitas kredit dengan menerapkan manajemen risiko

yang berlandaskan prinsip kehati-hatian. Lebih lanjut, kondisi ini juga mencerminkan keberhasilan dari upaya sinergis antara Pemerintah, Lembaga Otoritas, dan perbankan dalam menjaga stabilitas sektor UMKM melalui berbagai instrumen, seperti program restrukturisasi, subsidi bunga, penjaminan melalui KUR, serta stimulus fiskal lainnya.

Kredit UMKM berkembang di berbagai sektor utamanya perdagangan besar dan eceran namun menghadapi tantangan risiko kredit terbesar di konstruksi....

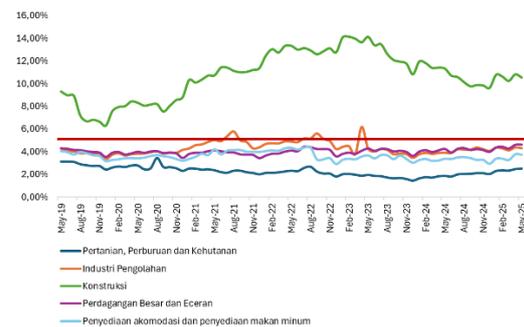
Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit UMKM paling besar disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran yaitu mencapai 45,43% dari total kredit UMKM. Capaian ini mencerminkan dominasi sektor perdagangan dalam struktur UMKM di Indonesia, yang umumnya bergerak di bidang produk konsumsi harian. Sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan berada di posisi kedua dengan porsi 17,93% mencerminkan peran pentingnya dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi pedesaan sekaligus sejalan dengan agenda Pemerintah dalam memperkuat sektor produktif. Sektor lainnya dengan porsi penyaluran kredit UMKM yang cukup signifikan meliputi industri pengolahan (9,61%), konstruksi (5,81%), serta penyediaan akomodasi dan makan minum (4,80%). Komposisi ini menunjukkan adanya upaya diversifikasi penyaluran kredit UMKM ke berbagai sektor usaha, baik produktif maupun berbasis jasa. Ke depan, perlu didorong ekspansi pembiayaan ke sektor-sektor bernilai tambah tinggi agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Diagram 2 – Porsi Penyaluran Kredit UMKM berdasarkan Sektor Ekonomi per Mei 2025



Sumber: LBUT Mei 2025, diolah

Grafik 3 – NPL Kredit UMKM berdasarkan Sektor Ekonomi



Sumber: LBUT Mei 2025, diolah

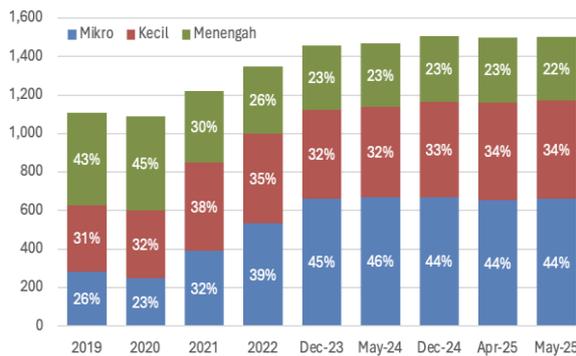
Sektor konstruksi memiliki rasio NPL tertinggi dibandingkan sektor lain dan mencapai puncaknya di kisaran 14-15% pada akhir 2022 hingga awal 2023 meskipun kemudian turun secara bertahap menjadi 10,52% pada Mei 2025. Perkembangan ini menunjukkan risiko gagal bayar yang lebih tinggi dan perlunya pengelolaan risiko yang lebih ketat untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas terhadap portofolio kredit UMKM. Sektor perdagangan besar dan eceran menunjukkan rasio NPL yang relatif lebih stabil dan terkendali di kisaran 4-5% dengan posisi terakhir sebesar 4,62% pada Mei 2025. Demikian pula, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mempertahankan rasio NPL yang stabil di bawah 5% meskipun mengalami beberapa fluktuasi selama periode tersebut. Sektor industri pengolahan mengalami fluktuasi dengan kenaikan singkat mencapai 6,17% pada April 2023, namun secara umum tetap berada di bawah 5% dan menunjukkan risiko kredit yang membaik sebesar 3,73% pada Mei 2025. Sementara itu sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan memiliki rasio NPL terendah yaitu sebesar 2,51% pada Mei 2025.

Dalam beberapa waktu terakhir, porsi penyaluran kredit UMKM lebih difokuskan kepada segmen mikro dan kecil sedangkan dukungan kepada usaha menengah menurun....

Tren porsi kredit UMKM menurut segmen usaha dari tahun 2019 hingga Mei 2025, terlihat cukup menarik dalam distribusi kredit antar segmen mikro, kecil, dan menengah. Pada tahun 2019, kredit UMKM didominasi oleh segmen menengah dengan porsi 43%, diikuti oleh usaha kecil 31%, dan mikro 26%. Namun,

sejak 2020 hingga 2022, terjadi pergeseran signifikan di mana porsi kredit untuk segmen mikro meningkat secara drastis dari 23% pada 2020 menjadi 39% pada 2022, sementara porsi kredit untuk usaha menengah turun dari 45% menjadi 26%. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit lebih banyak mengarah kepada pelaku usaha mikro, yang selama ini dianggap memiliki risiko lebih tinggi, namun juga sangat penting untuk pemberdayaan ekonomi skala kecil. Memasuki tahun 2023 hingga 2025, porsi kredit kepada segmen mikro terus mendominasi, yang konsisten berada di kisaran 44-46%. Segmen kecil juga menunjukkan kenaikan stabil dari 32% pada 2020 menjadi sekitar 34% pada 2025. Sebaliknya, porsi kredit untuk segmen menengah yang sebelumnya merupakan yang terbesar menjadi semakin berkurang dan stabil di angka sekitar 22-23% sejalan dengan pergeseran masyarakat dari kelas formal menjadi informal.

Diagram 3 – Porsi Kredit UMKM menurut Segmen Usaha



Sumber: LBUT Mei 2025, diolah

Grafik 4 – Pertumbuhan Kredit UMKM menurut Segmen Usaha



Sumber: LBUT Mei 2025, diolah

Sementara itu, dari sisi pertumbuhan kredit UMKM terlihat adanya fluktuasi sepanjang periode pengamatan. Pada Desember 2019, ketiga kategori ini menunjukkan pertumbuhan positif: mikro sebesar 12,99%, kecil 10,24%, dan menengah 3,21%. Namun pada tahun berikutnya, terjadi kontraksi yang cukup dalam pada segmen mikro (-12,83%, yoy) sedangkan segmen menengah dan segmen kecil masih tumbuh positif meskipun melambat masing-masing sebesar 1,59% (yoy) dan 2,79% (yoy). Puncak pertumbuhan terjadi pada Desember 2021 untuk segmen mikro (57,68%) dan kecil (30,20%), menandakan fokus pembiayaan yang sangat kuat pada usaha dengan skala kecil dan mikro. Sebaliknya, segmen menengah mengalami kontraksi tajam sebesar -23,91% (yoy) di periode yang sama, mengindikasikan pergeseran penyaluran kredit dari usaha menengah ke usaha yang lebih kecil. Setelah puncak tersebut, tren pertumbuhan segmen mikro dan kecil menurun secara bertahap, dengan segmen mikro masih menunjukkan pertumbuhan positif 9,28% (yoy) pada Mei 2024 namun kemudian berkontraksi -1,48% (yoy) pada Mei 2025. Segmen kecil mempertahankan pertumbuhan positif yang stabil dan mencapai 9,58% (yoy) sedangkan segmen menengah masih berkontraksi -1,48% (yoy) pada Mei 2025.

Segmen menengah catat risiko kredit tertinggi karena lebih lambat pulih dari dampak Pandemi Covid-19 dan diperberat oleh ketidakpastian ekonomi sehingga memengaruhi kemampuan bayar debitur....

Rasio NPL UMKM pada segmen mikro masih tergolong cukup terkendali meskipun meningkat secara bertahap dari 1,79% pada Desember 2019 menjadi 4,03% pada Mei 2025. Segmen kecil memiliki rasio NPL yang lebih tinggi dibanding mikro namun masih tetap terjaga di bawah 5%. Rasio NPL segmen kecil sedikit naik dari 3,53% pada Desember 2019 menjadi 4,425% pada Mei 2025 dengan fluktuasi kecil di sepanjang periode. Segmen menengah mencatat rasio NPL tertinggi di antara ketiga segmen dengan angka yang cukup fluktuatif dan sebagian besar berada di atas 5% sejak Desember 2020. Pada Desember 2021, rasio NPL menengah mencapai puncaknya sebesar 6,24% kemudian menurun pada beberapa periode meskipun tetap berada di kisaran 5-5,5% hingga Mei 2025. Hal ini menunjukkan bahwa risiko kredit yang relatif lebih tinggi di segmen menengah dan perlu menjadi perhatian agar kualitas kredit tetap terjaga.

Tabel 1 – Perkembangan NPL Kredit UMKM menurut Segmen Usaha

NPL	Dec-19	Dec-20	Dec-21	Dec-22	Dec-23	May-24	Dec-24	Apr-25	May-25
Mikro	1.79%	1.87%	2.12%	2.08%	2.65%	3.24%	3.04%	3.77%	4.03%
Kecil	3.53%	3.51%	3.31%	3.48%	4.24%	4.92%	4.02%	4.47%	4.42%
Menengah	4.77%	5.34%	6.24%	5.37%	5.09%	5.44%	4.78%	5.34%	5.53%
UMKM	3.62%	3.96%	3.82%	3.42%	3.71%	4.27%	3.76%	4.36%	4.49%

Sumber: LBUT Mei 2025, diolah

Di sisi lain, data *Loan at Risk (LaR)* UMKM menurut segmen usaha memperlihatkan tren risiko kredit yang mengalami fluktuasi signifikan selama periode pengamatan. Pada Desember 2019, tingkat *LaR* relatif terkendali pada semua segmen, yaitu 9,32% untuk mikro, 14,03% untuk kecil, dan 13,85% untuk menengah. Namun, pada Desember 2020, semua segmen mengalami lonjakan signifikan dengan segmen mikro mencapai 45,36%, kecil 42,35%, dan menengah 33,33%. Lonjakan ini akibat pukulan berat dari Pandemi Covid-19 dan kondisi ekonomi global yang memburuk sehingga meningkatkan potensi kredit bermasalah. Lonjakan *LaR* pada segmen mikro dan kecil yang lebih tinggi daripada segmen menengah juga menegaskan bahwa skala usaha tersebut lebih rentan terdampak oleh situasi ketidakpastian ekonomi. Seiring berjalannya waktu, terjadi penurunan risiko secara bertahap di semua segmen mulai tahun 2021 hingga 2023 didukung pemulihan kondisi ekonomi dan intervensi kebijakan restrukturisasi kredit serta mitigasi risiko yang diterapkan oleh perbankan. Setelahnya, perkembangan *LaR* tidak sefluktuatif tahun-tahun sebelumnya namun masih terdapat kecenderungan meningkat, terutama pada segmen usaha mikro.

Tabel 2 – Perkembangan LaR Kredit UMKM menurut Segmen Usaha

LaR	Dec-19	Dec-20	Dec-21	Dec-22	Dec-23	May-24	Dec-24	Apr-25	May-25
Mikro	9.32%	45.36%	23.08%	13.76%	11.37%	12.04%	10.84%	12.14%	12.13%
Kecil	14.03%	42.35%	29.51%	20.22%	16.32%	16.03%	13.27%	13.92%	13.70%
Menengah	13.85%	33.33%	32.30%	22.08%	16.21%	14.34%	12.15%	12.64%	13.05%
UMKM	12.74%	38.99%	28.31%	18.15%	14.04%	13.83%	11.93%	12.85%	12.87%

Sumber: LBUT Mei 2025, diolah

Pemerintah tingkatkan pemberdayaan UMKM dengan fokus *scaling up* dan pembiayaan produktif sebagai upaya untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%....

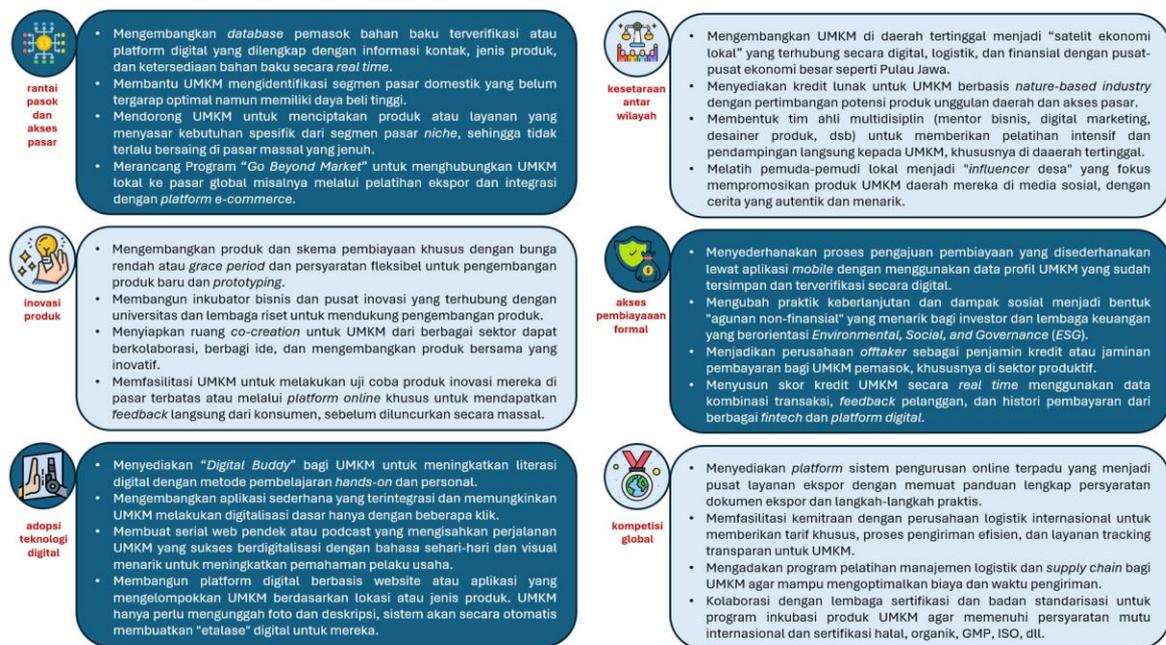
Dalam menghadapi berbagai tantangan global, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi semakin krusial. Kondisi ekonomi dunia yang masih dibayangi oleh ketegangan geopolitik, perang dagang, serta tren proteksionisme menuntut respons yang cepat dan adaptif dari seluruh sektor, termasuk UMKM. Namun, permasalahan struktural yang melekat pada sektor ini menuntut upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi serta daya saing UMKM agar mampu merespons dinamika global secara tepat dan efektif. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan berbagai kebijakan dan program strategis yang difokuskan pada pemberdayaan UMKM, terutama untuk mendorong pelaku usaha naik kelas (*scaling up*). Hal ini menjadi bagian penting dari strategi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, mengingat struktur UMKM saat ini masih didominasi oleh kategori usaha mikro dan lebih rentan terhadap tekanan eksternal.

Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih terfokus pada sektor-sektor produktif. Kebijakan ini membuka peluang besar bagi UMKM, terutama di sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, untuk tumbuh lebih cepat melalui akses pembiayaan yang lebih tepat sasaran. Dengan dukungan pembiayaan yang terarah, UMKM di sektor-sektor strategis tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, serta mengadopsi teknologi baru yang mendukung daya saing di era global. Selain itu, Pemerintah juga berupaya menciptakan siklus pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan di berbagai wilayah, tak hanya di kota besar, tapi juga menjangkau desa dan kelurahan. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mendorong pengembangan UMKM secara berkelanjutan sekaligus menciptakan lapangan kerja yang luas. Dengan demikian, kehadiran UMKM

tidak hanya menopang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat dalam jangka panjang.

Memahami urgensi penguatan UMKM sebagai pilar ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak global dan memperhatikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong UMKM naik kelas, diperlukan strategi yang komprehensif. Berikut ini beberapa rekomendasi strategis untuk menghadapi berbagai tantangan struktural yang menghambat pertumbuhan UMKM agar dapat lebih adaptif, inovatif, dan berdaya saing di tengah dinamika ekonomi global:

Gambar 1 – Rekomendasi Strategis Untuk Pengembangan UMKM berdasarkan Identifikasi Permasalahan Struktural



Dukungan kebijakan OJK untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga kelangsungan usaha UMKM serta stabilitas keuangan nasional...

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 249-251 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), OJK tengah menyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait akses pembiayaan mikro, kecil, dan menengah (RPOJK UMKM). Saat ini, RPOJK UMKM sedang berada dalam tahap finalisasi harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebelum diundangkan. OJK menargetkan POJK UMKM ini akan resmi diterbitkan pada Agustus 2025. Ke depan, POJK ini diharapkan dapat memberikan kerangka kebijakan yang lebih inklusif sehingga memudahkan UMKM dalam memperoleh pembiayaan dari Bank maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).

Tidak hanya itu, bentuk dukungan OJK dalam mendorong pengembangan UMKM agar dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mereka juga telah diwujudkan melalui berbagai upaya, seperti:

1. Akses Pembiayaan
 - a. Meluncurkan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR);
 - b. Mendorong digitalisasi pembiayaan melalui *Fintech Lending/Peer to Peer Lending*;
 - c. Membentuk KUR Klaster dalam satu ekosistem digital;
 - d. Membangun ekosistem digital Bank Wakaf Mikro (BWM);
 - e. Mendorong alternatif pendanaan UMKM melalui *Securities Crowdfunding*;

- f. Mendukung program Digital Kredit UMKM (DigiKU) untuk membantu UMKM memperoleh akses pembiayaan;
 - 2. Akses Pemasaran
 - a. Membangun *platform* pemasaran UMKM digital melalui UMKMMU;
 - b. Digitalisasi Pemasaran BWM melalui aplikasi BWM – Bumdes
 - 3. Pembinaan/Pendampingan UMKM
 - a. Bekerjasama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) perluas inklusi keuangan dan pembinaan UMKM;
 - b. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), meliputi:
 - 1) Fasilitasi pengembangan ekosistem UMKM berbasis digital.
 - 2) Perluasan akses pembiayaan UMKM.
 - 3) Peningkatan literasi dan inklusi keuangan UMKM.
 - c. *Business Matching* UMKM dengan lembaga jasa keuangan;
 - d. Fasilitasi pendirian Kampus UMKM dengan fokus program:
 - 1) Edukasi yang berkesinambungan.
 - 2) Penyaluran pendanaan.
 - 3) Pemasaran *online*.
 - 4) Sistem pembayaran dan logistik.
- Penyaluran program unggulan berbasis ekspor.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Lampiran

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN I

Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko

No.	Nama	Rumus
Indikator Kinerja Perbankan		
1.	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	$\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}$
2.	<i>Return on Asset (ROA)</i>	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$
3.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$
4.	<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
5.	<i>Net Operation Margin (NOM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Operasional Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
6.	<i>Cash Ratio (CR)</i>	$\frac{\text{Total Alat Likuid}}{\text{Total Hutang Lancar}}$
Risiko Kredit		
7.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Gross</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
8.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Net</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah – CKPN atas Kredit/Pby Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
9.	Rasio <i>Loan at Risk (LaR)</i>	$\frac{\text{Restru Kredit kol. 1 + Kredit kol. 2 + Kredit NPL}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
Risiko Pasar		
10.	Rasio PDN	$\frac{\text{Posisi Devisa Netto}}{\text{Total Modal}}$
11.	Rasio <i>Interest Risk Rate in the Banking Book (IRRBB)</i>	$\frac{\text{Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}{\text{Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}$
Risiko Likuiditas		
12.	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	$\frac{\text{Total Kredit kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
13.	<i>Finance to Deposit Ratio (FDR)</i>	$\frac{\text{Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
14.	AL/DPK	$\frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
15.	AL/NCD	$\frac{\text{Alat Likuid}}{30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}}$
16.	<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	$\frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Net Cash Outflow (NCO)}}$
17.	<i>Net Stable Funding Ratio (NSFR)</i>	$\frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}}$

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN II**GLOSSARY**

Istilah	Keterangan
A	
Aktivitas Bank	Jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
AL/DPK	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid ($AL = \text{Final Excess Reserve} + \text{Kas} + \text{Penempatan pada BI lainnya} + \text{Reserve Repo}$) terhadap Dana Pihak Ketiga ($DPK = \text{Tabungan} + \text{Giro} + \text{Deposito}$). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> $AL/DPK > 10\%$.
AL/NCD	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap <i>Non Core Deposit</i> ($NCD = 30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}$). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> $AL/NCD > 50\%$.
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Jumlah aset dalam neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen ATMR dibagi menjadi tiga, yaitu: ATMR Kredit, ATMR Operasional, dan ATMR Pasar.
B	
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.
C	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	Penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan $(\text{modal}/\text{ATMR}) \times 100\%$, dengan <i>threshold</i> yang ditetapkan oleh BIS (<i>Bank for International Settlements</i>) sebesar minimal 8%.
<i>Cash Ratio</i> (CR)	Perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS).
<i>Concentration Ratio</i> (CR)	<i>Concentration Risk</i> digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada sejumlah entitas. Dalam hal ini, pengukuran pada perbankan diukur melalui total aset.

Istilah	Keterangan
D	
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.
Deposito	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
F	
<i>Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVTOCI)</i>	Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai "tersedia untuk dijual" diakui dalam pendapatan komprehensif lain.
<i>Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)</i>	Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan, yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
G	
Giro	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Giro Wajib Minimum (GWM)	Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. (PBI No.19/6/PBI/2017)
I	
<i>Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)</i>	Risiko suku bunga pada aset di <i>banking book</i> , atau risiko yang ada saat ini atau yang akan datang terhadap permodalan dan penghasilan bank yang timbul dari pergerakan suku bunga yang memengaruhi posisi <i>banking book</i> pada bank.
K	
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	Kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh OJK (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum)
KUR (Kredit Usaha Rakyat)	Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup (Permenko No.11 Tahun 2017).

Istilah	Keterangan
L	
Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif).
Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	Merupakan unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Kaitannya dengan pemerintah, LNPRT merupakan mitra dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti penegakan hukum, perlindungan konsumen, pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup. Contoh: Ormas, LSM, Lembaga Keagamaan. Sumber: BPS
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	Merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank. LCR merupakan perbandingan antara <i>High Quality Liquid Asset (HQLA)</i> dengan total arus keluar bersih (<i>Net Cash Outflow/NCO</i>) selama 30 hari kedepan dalam scenario stress. Kelompok Bank yang wajib menerapkan LCR adalah BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang dimiliki Asing baik KCBA maupun <i>Local entity</i> (Non KCBA). LCR ditetapkan paling rendah sebesar 100%. (POJK Nomor 42/POJK.03/2015)
<i>Loan at Risk (LaR)</i>	<i>Loan at Risk (LaR)</i> merupakan indikator risiko atas kredit yang disalurkan yang terdiri atas kredit kolektibilitas 1 (kualitas Lancar) yang telah direstrukturisasi, kolektibilitas 2 (kualitas Dalam Perhatian Khusus), serta kredit bermasalah atau <i>Non Performing Loan (NPL)</i> .
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank (PBI No.15/15/PBI/2013).
M	
Modal Inti	Komponen permodalan yang terdiri dari modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>) dan modal inti tambahan (<i>Additional Tier 1</i>). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, <i>minority interest</i> hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur sekuritisasi. Sementara

Istilah	Keterangan
	modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Mudharabah</i>	Perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).
N	
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).
<i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR)	Rasio Pendanaan Stabil Bersih atau NSFR adalah perbandingan antara Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF) dengan Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF). NSFR ditujukan untuk mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. NSFR ditetapkan paling rendah 100%. (POJK No. 50/POJK.03/2017)
<i>Non Performing Loan/Finance</i> (NPL) atau (NPF), Kredit/Pembiayaan Bermasalah	Kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
P	
<i>Pembiayaan Istishna'</i>	Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Mudharabah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Murabahah</i>	Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)

Istilah	Keterangan
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Qardh</i>	Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pendanaan Non Inti	Pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi: (1) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp2 miliar; (2) seluruh transaksi antar Bank; dan (3) seluruh pinjaman (<i>borrowing</i>) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal. (SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum)
Posisi Devisa Neto (PDN)	Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (PBI No.6/20/PBI/2004 Perubahan Atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum)
Produk Bank	Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
R	
Rencana Bisnis Bank (RBB)	Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek dan jangka menengah, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
<i>Return on Asset (ROA)</i>	Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.
Risiko Nilai Tukar	Risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan nilai tukar terhadap posisi portofolio bank. Risiko nilai tukar berasal dari dampak pergerakan nilai tukar terhadap portofolio valas bank baik di sisi aset maupun kewajiban.

Istilah	Keterangan
Risiko Operasional	Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara lain sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional bank. Risiko inheren operasional pada perbankan dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, <i>fraud</i> , serta kejadian eksternal.
Risiko Pasar	Potensi kerugian yang dihadapi sebagai akibat pergerakan dalam harga pasar baik berupa nilai tukar maupun suku bunga.
Risiko Suku Bunga	Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat dari perubahan suku bunga yang dapat terekspose pada instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai <i>trading book</i> maupun <i>banking book</i> .
T	
Tabungan	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)

Halaman ini sengaja dikosongkan



**Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan
Menara Radius Prawiro, Gedung A, Lantai 10
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat
Telp: 021-29600000
e-mail: dsapi@ojk.go.id**

